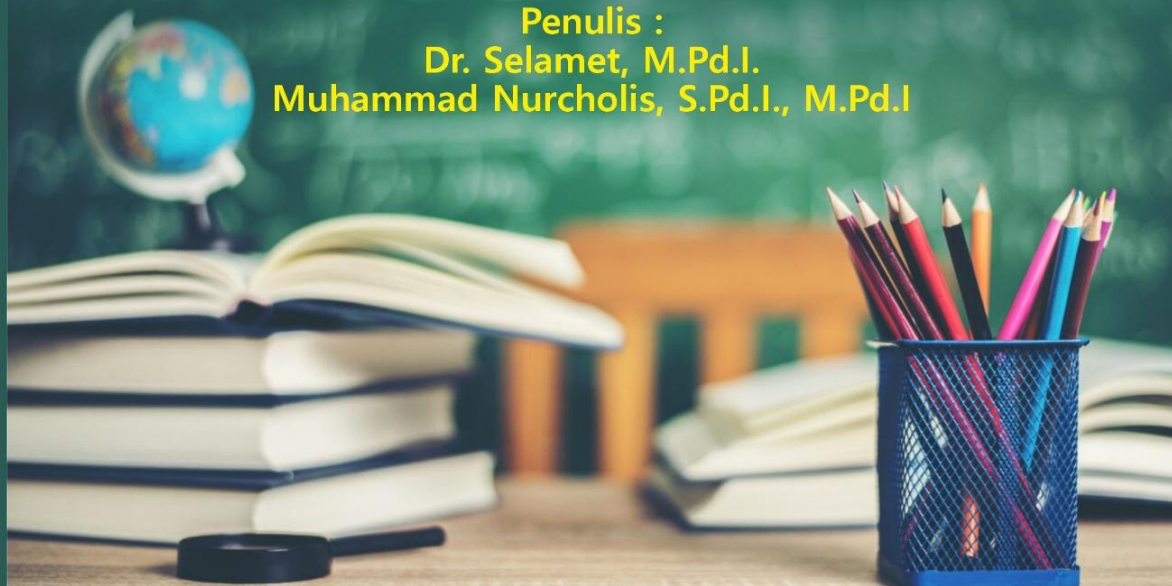


INOVASI PENDIDIKAN ISLAM

Peta Transformasi, Pedagogi Digital,
dan Arah Masa Depan

Penulis :
Dr. Selamat, M.Pd.I.
Muhammad Nurcholis, S.Pd.I., M.Pd.I





BRANDED
TECH
PUBLISHER

Dr. Selamat, M.Pd.I.
Muhammad Nurcholis, S.Pd.I., M.Pd.I

INOVASI PENDIDIKAN ISLAM

Peta Transformasi, Pedagogi
Digital, dan Arah Masa Depan



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Diterbitkan oleh:



BRANDED
TECH
PUBLISHER

INOVASI PENDIDIKAN ISLAM

Peta Transformasi, Pedagogi Digital, dan Arah
Masa Depan

Ditulis Oleh: **Dr. Selamat, M.Pd.I. &
Muhammad Nurcholis, S.Pd.I., M.Pd.I**

ISBN : Proses Pengajuan
Halaman : xvi, 240, Ukuran: 15.5 x23 cm
Cetakan Pertama : Agustus 2026

Editor : Imron Nur Syafaat, M.Pd.,
Layouter : Cindy Charisma Satriyo
Desain Cover : Abd Qohar

Diterbitkan Pertama Kali Oleh :
Branded Tech Publisher
(Grup Penerbitan CV Branded Tech Indonesia)

Alamat: Dusun Krajan RT 02 RW 01 Tempuran Bantaran
Probolinggo Jawa Timur 67261| Hp : 0811101665
Website: www.brandedtechpublisher.biz.id
E-mail: brandedtechIndonesia@gmail.com

Anggota IKAPI Nomor: 458/JTI/2025
Tanggal: 1 November 2025

Hak Cipta pada penulis, Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2026 by Branded Tech Publisher | All Right Reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga buku ajar *"Inovasi Pendidikan Islam: Peta Transformasi, Pedagogi Digital, dan Arah Masa Depan"* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa dunia pendidikan Islam saat ini berada pada persimpangan jalan yang sangat krusial. Di tengah gelombang disrupsi digital, Revolusi Industri 4.0, dan perubahan sosial yang berlangsung dengan kecepatan luar biasa, institusi pendidikan Islam dituntut untuk tidak sekadar bertahan, tetapi juga memimpin transformasi. Tanpa inovasi yang berakar pada nilai-nilai tauhid dan dilandasi oleh pemahaman filosofis yang kokoh, pendidikan Islam berisiko kehilangan relevansinya di hadapan generasi digital natives yang terbiasa dengan akses informasi tanpa batas.

Buku ini hadir sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan bahan ajar yang membahas secara komprehensif inovasi pendidikan Islam dalam kerangka pedagogi digital dan transformasi kelembagaan. Buku ini disusun dengan pendekatan multidisipliner, memadukan wawasan keislaman, teori pendidikan, dan perkembangan teknologi mutakhir. Kami berharap, buku ini dapat menjadi panduan bagi mahasiswa, calon guru, praktisi pendidikan, serta para pemangku kepentingan dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi pendidikan Islam yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

Materi yang disajikan dalam buku ini mencakup sepuluh bab yang saling terkait, mulai dari fondasi inovasi pendidikan Islam, tren global, teknologi sebagai penggerak inovasi, model pembelajaran inovatif, kurikulum adaptif dan inklusif, peran guru dalam ekosistem inovatif, infrastruktur pendukung, tantangan dan solusi implementasi, penilaian dan evaluasi inovasi, hingga masa depan inovasi pendidikan Islam. Setiap bab dirancang secara sistematis dengan tujuan pembelajaran yang jelas dan relevansi kontekstual yang kuat, sehingga pembaca tidak hanya memahami konsep secara

teoretis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik nyata di lapangan.

Buku ini juga sejalan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) mata kuliah Inovasi Pendidikan Islam, yaitu mahasiswa mampu menganalisis teori-teori dan konsep-konsep inovasi pendidikan (CPMK1), mengimplementasikan ilmu inovasi pendidikan dengan baik (CPMK2), mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis (CPMK3), serta menyusun artikel ilmiah yang berkaitan dengan inovasi pendidikan (CPMK4).

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan pendidikan Islam yang lebih inovatif, bermartabat, dan berdaya saing global.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyelesaian buku ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan menjadikan buku ini sebagai amal jariyah yang bermanfaat bagi umat.

Ciamis ,12 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	VII
CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	XIII
BAB I.....	1
FONDASI INOVASI PENDIDIKAN ISLAM	1
A. PENGERTIAN DAN SEJARAH INOVASI PENDIDIKAN ISLAM.....	2
1. Membedah Anatomi Konsep Inovasi Pendidikan Islam	2
2. Trajektori Historis Transformasi Kelembagaan	3
B. PRINSIP DASAR INOVASI DALAM KONTEKS PENDIDIKAN MODERN	6
1. Dialektika Kesenambungan dan Perubahan.....	6
2. Kesatuan Epistemologis dan Integritas Aksiologis	7
3. Relevansi Kontekstual dengan Kebutuhan Zaman	8
4. Agilitas Kelembagaan dan Pemecahan Kebuntuan Birokrasi ..	8
5. Inklusivitas dan Pemerataan Akses (Demokratisasi Pengetahuan)	9
C. PERAN GURU SEBAGAI AGEN PERUBAHAN	10
D. INDIKATOR KEBERHASILAN INOVASI PENDIDIKAN ISLAM	13
E. SIMPULAN	15
F. SOAL LATIHAN.....	16
BAB II	19
TREN GLOBAL INOVASI PENDIDIKAN ISLAM	19
A. DAMPAK REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM.....	20
B. INOVASI PENDIDIKAN ISLAM DI NEGARA MAJU	22
1. Singapura: Sinkretisasi Kurikulum Global dan Standar Nasional	23
2. Finlandia: Pedagogi Kritis dan Kebebasan Otonom	24
3. Jepang: Hibridisasi Karakter (Akhlaq dan Tokkatsu).....	25
C. ADAPTASI INOVASI PENDIDIKAN ISLAM DI ASIA TENGGARA ..	26
D. PREDIKSI TREN PENDIDIKAN 2030	29
E. SIMPULAN	31
F. SOAL LATIHAN.....	32
BAB III.....	35
TEKNOLOGI SEBAGAI PENGGERAK INOVASI PENDIDIKAN	35

A. INTEGRASI AI DAN <i>MACHINE LEARNING</i> DALAM PEMBELAJARAN	36
B. REALITAS VIRTUAL (VR) DAN AUGMENTED REALITY (AR) DI KELAS	38
C. PLATFORM DIGITAL: LMS, MOOCs, DAN EdTECH	41
D. KEAMANAN DATA DAN ETIKA TEKNOLOGI PENDIDIKAN	44
E. SIMPULAN	46
F. SOAL LATIHAN.....	47
BAB IV	49
MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF.....	49
A. PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (<i>PROJECT-BASED LEARNING</i>).....	50
B. FLIPPED CLASSROOM DAN BLENDED LEARNING.....	52
C. GAMIFIKASI UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR	55
D. <i>PERSONALIZED LEARNING PATH</i> (JALUR PEMBELAJARAN TERPERSONALISASI)	58
E. SIMPULAN	61
F. SOAL LATIHAN.....	62
BAB V.....	65
KURIKULUM ADAPTIF DAN INKLUSIF.....	65
A. DESAIN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI ABAD 21	66
B. PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS	68
C. INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN LITERASI DIGITAL . 71	
1. Kritik Epistemologis terhadap Reduksionisme Literasi Digital Sekuler	72
2. Operasionalisasi Hifz al-'Irdh dan Hifz al-'Aql dalam Era Post-Truth	73
3. Limitasi Ontologis Teknologi dan Vitalitas Uswah Hasanah	74
4. Presensi Digital Pendidik dan Pembentukan Intelektual Publik	74
D. KURIKULUM NASIONAL VS. GLOBAL: HARMONISASI INOVASI 75	
1. Ancaman Imperialisme Epistemologis dalam Kurikulum Global.....	76
2. Glokalisasi Berbasis Wasathiyyah	77
3. Hermeneutika Peleburan Cakrawala: Integrasi STEM dan Maqashid Syariah	79
4. Pemetaan Silang (Cross-Mapping) Capaian Pembelajaran dan Akreditasi.....	80
5. Agilitas Struktural Kurikulum dan Profil Ulul Albab.....	81

E. SIMPULAN	82
F. SOAL LATIHAN.....	83
BAB VI	85
PERAN GURU DALAM EKOSISTEM INOVATIF	85
A. PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (<i>PROFESSIONAL DEVELOPMENT</i>)	86
B. GURU SEBAGAI FASILITATOR, BUKAN PENGAJAR TRADISIONAL 92	
1. Dasar Hermeneutik Peran Fasilitator: Dialektika dan Peleburan Cakrawala.....	93
2. Re-kalibrasi Otoritas: Menjawab Keraguan Teologis.....	94
3. Pilar Epistemologis dan Metodologis	95
4. Pilar Etis dan Eksistensial: Transformasi Murabbi dan Muaddib	95
C. KOLABORASI GURU DENGAN ORANG TUA DAN KOMUNITAS ..	97
1. Trikotomi Epistemologis dan Konsepsi Bi'ah Shalihah.....	97
2. Blended Learning dan Transformasi Orang Tua sebagai Ko- Fasilitator	98
3. Komunitas sebagai Laboratorium Sosial dan Ekosistem Kognitif Otentik	99
4. Restorasi Ta'awun, Ukhuwah, dan Aktualisasi Insan Kamil	100
D. ALAT PENILAIAN KINERJA GURU INOVATIF	101
1. Rekonstruksi Ontologis: Dari Pengawasan Panoptik Menuju Muhasabah Formatif.....	102
2. Pergeseran Paradigma Evaluasi Kinerja	103
3. Portofolio Digital Berkelanjutan sebagai Jejak Ijtihad Pedagogis	104
4. Penilaian 360-Derajat Berbasis Komunitas.....	105
5. Integrasi Rubrik Evaluasi Berbasis Maqashid Syariah dan Etika Digital	110
G. SIMPULAN	115
H. SOAL LATIHAN.....	116
BAB VII.....	119
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG INOVASI PENDIDIKAN	119
A. PEMBANGUNAN <i>SMART SCHOOL</i> DAN KAMPUS DIGITAL	120
1. Merancang Ruang Belajar yang Fleksibel dan Terintegrasi	121
2. Membangun Infrastruktur yang Inklusif	122
3. Mengembangkan Tata Kelola Digital	122
B. AKSES INTERNET DAN PERANGKAT UNTUK SEMUA SISWA.....	123

1. Mewujudkan Pemerataan Akses sebagai Prioritas Pengembangan.....	125
2. Mengoptimalkan Filantropi dan Kemitraan untuk Mendukung Infrastruktur.....	125
3. Mengembangkan Solusi Teknologi yang Sesuai dengan Kondisi Lokal	126
4. Meningkatkan Literasi Digital Bersama Akses Teknologi ..	127
C. PENDANAAN DAN KEMITRAAN PUBLIK–PRIVAT.....	128
1. Membangun Kemitraan yang Berlandaskan Kepentingan Pendidikan.....	129
2. Mengembangkan Skema Pendanaan yang Beragam	130
3. Membangun Tata Kelola Kemitraan yang Transparan	130
4. Menjaga Keseimbangan antara Inovasi dan Nilai-Nilai Pendidikan Islam	131
D. SIMPULAN	132
E. SOAL LATIHAN.....	133
BAB VIII	135
TANTANGAN DAN SOLUSI IMPLEMENTASI.....	135
A. HAMBATAN BUDAYA DAN RESISTENSI PERUBAHAN	136
1. Memperkuat Inovasi melalui Pendekatan Kultural	137
2. Membangun Ruang Belajar yang Aman bagi Pendidik	138
B. KESENJANGAN DIGITAL (<i>DIGITAL DIVIDE</i>).....	140
1. Mengembangkan Infrastruktur yang Sesuai dengan Kondisi Daerah	141
2. Memperkuat Dukungan melalui Filantropi dan Kemitraan ..	142
3. Meningkatkan Literasi Digital Pendidik	143
C. STRATEGI MENGATASI MASALAH EVALUASI DAN SERTIFIKASI	146
1. Mengembangkan Penilaian yang Lebih Menyeluruh	147
2. Memperluas Pengakuan terhadap Berbagai Bentuk Pembelajaran	150
3. Membangun Sistem Sertifikasi yang Lebih Adaptif.....	152
D. MANAJEMEN RISIKO DALAM INOVASI PENDIDIKAN ISLAM... 	155
1. Mengantisipasi Risiko Etika dan Nilai.....	156
2. Mengelola Risiko Keuangan dan Organisasi	158
3. Menjaga Kepercayaan Masyarakat	160
E. SIMPULAN	161
F. SOAL LATIHAN.....	162
BAB IX	165

PENILAIAN DAN EVALUASI INOVASI PENDIDIKAN	165
A. METODE PENILAIAN AUTENTIK DAN FORMATIF	166
1. Penilaian Autentik.....	167
2. Penilaian Formatif.....	169
B. PENGUKURAN DAMPAK INOVASI DENGAN <i>DATA ANALYTICS</i> .	171
1. Memahami Pola Keterlibatan Peserta Didik	172
2. Menilai Efektivitas Program dan Pembelajaran	174
3. Menjaga Etika dalam Pengelolaan Data.....	176
C. SERTIFIKASI KOMPETENSI BERBASIS PORTOFOLIO	177
1. Membangun Portofolio Digital yang Komprehensif	178
2. Menghubungkan Tradisi Keilmuan dengan Sistem Kredensial Modern.....	179
3. Mengakui Pengalaman Belajar di Berbagai Lingkungan.....	181
D. <i>BENCHMARKING</i> DENGAN STANDAR INTERNASIONAL	182
1. Menjadikan Benchmarking sebagai Proses Pembelajaran ...	183
2. Menyelaraskan Standar Mutu dengan Tujuan Pendidikan Islam	184
3. Memperluas Pengakuan Mutu melalui Akreditasi Internasional	186
E. SIMPULAN	188
F. SOAL LATIHAN.....	189
BAB X.....	191
MASA DEPAN INOVASI PENDIDIKAN ISLAM	191
A. VISI PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PASCA-PANDEMI	192
1. Integrasi Kesadaran Ekologis dan Maqashid Syariah.....	194
2. Ketahanan Institusional dan Adaptabilitas Digital yang Berkeadilan	197
3. Penguatan Modal Sosial dan Ketahanan Komunitas	201
B. KOLABORASI GLOBAL UNTUK PENDIDIKAN MERATA	203
1. Membangun Kemitraan Akademik Lintas Negara	205
2. Memperluas Akses terhadap Sumber Belajar Terbuka.....	207
3. Memperkuat Solidaritas Kemanusiaan melalui Pendidikan.	209
C. ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INOVASI PENDIDIKAN	210
1. Menjaga Martabat Manusia dalam Pemanfaatan Teknologi	211
2. Mewujudkan Keadilan dalam Penyebaran Inovasi.....	214
3. Mengarahkan Riset untuk Kepentingan Masyarakat	215
D. <i>ROADMAP</i> IMPLEMENTASI BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN .	217
1. Peran Pemerintah dan Regulator.....	218

2. Peran Pimpinan Lembaga Pendidikan	221
3. Peran Guru dan Tenaga Pendidik	223
E. SIMPULAN	226
F. SOAL LATIHAN.....	227
DAFTAR PUSTAKA	229
BIOGRAFI PENULIS	237



BRANDED
TECH
PUBLISHER

CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Sikap (S)

- a) (S-1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- b) (S-3) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- c) (S-5) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- d) (S-7) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- e) (S-10) Memiliki semangat juang, pantang menyerah, proaktif dalam persaingan, serta mampu mengenali keunggulan lembaga pendidikan tempat berkarya untuk dapat menjadi pemenang dalam persaingan.

2. Keterampilan Umum (KU)

- a) (KU-1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- b) (KU-2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- c) Keterampilan Khusus (KK)
- d) (KK-3) Terampil menganalisis kurikulum mata pelajaran PAI (di sekolah), Qur'an Hadits, Fiqih, Akidah Akhlak, dan SKI (di madrasah).

3. Pengetahuan (P)

- a) (P-3) Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik.
- b) (P-5) Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran.
- c) (P-6) Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran PAI.

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- 1. CPMK1 (Pengetahuan) - Mahasiswa mampu menganalisis teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan dalam memahami Inovasi Pendidikan. (P-3, P-5, P-6)
- 2. CPMK2 (Sikap) - Mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu tentang Inovasi Pendidikan dengan baik. (S-1, S-3, S-5, S-7, S-10)
- 3. CPMK3 (Keterampilan Umum) - Mahasiswa menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik mengenai Inovasi Pendidikan. (KU-1, KU-2)

4. CPMK4 (Keterampilan Khusus) - Mahasiswa mampu menyusun artikel ilmiah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang diperlukan dalam menafsirkan Inovasi Pendidikan. (KK-3)

C. Pemetaan CPL dengan CPMK

1. CPMK1 (Pengetahuan) dibebankan pada CPL: P-3, P-5, P-6.
2. CPMK2 (Sikap) dibebankan pada CPL: S-1, S-3, S-5, S-7, S-10.
3. CPMK3 (Keterampilan Umum) dibebankan pada CPL: KU-1, KU-2.
4. CPMK4 (Keterampilan Khusus) dibebankan pada CPL: KK-3.

Catatan: *Capaian pembelajaran ini menjadi acuan dalam penyusunan setiap bab pada buku "Inovasi Pendidikan Islam: Peta Transformasi, Pedagogi Digital, dan Arah Masa Depan". Setiap bab dirancang untuk mencapai satu atau lebih CPMK yang telah ditetapkan.*



BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB I

FONDASI INOVASI PENDIDIKAN ISLAM

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan secara komprehensif pengertian, sejarah, dan prinsip dasar inovasi pendidikan Islam sebagai fondasi transformasi kelembagaan.
2. Menganalisis dialektika antara kesinambungan tradisi (*al-muhafazhah*) dan perubahan (*al-akhdzu bi al-jadid*) dalam konteks pendidikan modern.
3. Mengidentifikasi peran guru sebagai agen perubahan berdasarkan trilogi kompetensi *mu'allim*, *murabbi*, dan *muaddib*.
4. Merumuskan indikator keberhasilan inovasi pendidikan Islam yang holistik, mencakup aspek kognitif, afektif (*adab*), relevansi sosial, dan keberlanjutan kelembagaan.

A. Pengertian dan Sejarah Inovasi Pendidikan Islam

Pemahaman yang presisi terhadap terminologi sangat krusial sebelum melakukan pembedahan lebih jauh terhadap praktik pendidikan. Ketiadaan batasan konseptual sering kali menjebak diskursus akademik pada ambiguitas, terutama ketika mengawinkan terma inovasi yang berakar dari sosiologi Barat dengan pendidikan Islam yang memiliki kekayaan epistemologisnya sendiri.

1. Membedah Anatomi Konsep Inovasi Pendidikan Islam

Secara leksikal, kata inovasi diturunkan dari bahasa Latin *innovare* yang bermakna memperbarui atau mengubah. Dalam lanskap sosiologi modern, Rogers (2003) memberikan batasan yang sangat otoritatif; inovasi diposisikan sebagai gagasan, praktik, maupun wujud benda yang dipersepsikan baru oleh individu atau kelompok pengadopsi. Kebaruan di sini tidak selalu bermakna penemuan (*invention*) yang benar-benar belum pernah ada di muka bumi, melainkan sudut pandang subjektif pengguna dalam melihat alternatif solusi atas kebuntuan sistem yang sedang berjalan.

Ketika kerangka sosiologis ini ditarik ke dalam wilayah pendidikan Islam, muncul kompleksitas tersendiri. Tradisi intelektual Islam memiliki sensitivitas tinggi terhadap konsep kebaruan. Sebagian masyarakat Muslim tradisional acap kali mencurigai hal-hal baru sebagai *bid'ah* (penyimpangan agama). Padahal, analisis teologis yang ketat membedakan secara diametral antara inovasi dalam urusan ritual mahdlah dengan inovasi dalam urusan muamalah dan peradaban. Nurcholish Madjid (1992) secara tajam mengkritik pandangan sempit ini dengan menegaskan bahwa ruang kreativitas intelektual dan teknis manusia justru dilindungi oleh spirit *tajdid* (pembaruan) dan *islah* (perbaikan).

Oleh sebab itu, mendefinisikan inovasi pendidikan Islam menuntut perpaduan dua cakrawala. Di satu sisi, ia melibatkan adopsi instrumen, metode, atau rekayasa sistemik untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Di sisi lain, proses tersebut tetap tunduk pada orientasi teologis, yakni melahirkan manusia yang beradab (*insan kamil*). Al-Attas (1979) mengingatkan bahwa hakikat pendidikan Islam berpusat pada penanaman adab (*ta'dib*), bukan sekadar transfer informasi (*ta'lim*) atau pengasuhan fisik (*tarbiyah*).

Berpijak pada sintesis tersebut, inovasi pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai proses rekayasa sistematis dan berkesinambungan baik menyangkut kurikulum, pedagogi, teknologi, maupun manajerial kelembagaan untuk merespons dinamika zaman tanpa mereduksi nilai-nilai fundamental tauhid. Pembaruan ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara idealisme teks suci dengan realitas empiris peserta didik.

2. Trajektori Historis Transformasi Kelembagaan

Membaca sejarah pendidikan Islam sejatinya adalah membaca sejarah inovasi itu sendiri. Institusi keilmuan Islam telah bermetamorfosis melewati berbagai fase kritis, beradaptasi dengan infrastruktur dan tantangan sosio-politik di zamannya.

a. Fase Kenabian dan Inovasi Pedagogi Awal

Pendidikan pada masa awal turunnya wahyu berpusat di Darul Arqam, sebuah rumah yang dirancang sebagai ruang konsolidasi akidah secara rahasia. Ketika peradaban Islam bergeser ke Madinah, masjid mengambil alih peran sentral. Institusi *Suffah* sebuah area khusus di Masjid Nabawi yang menampung sahabat miskin untuk fokus belajar dapat dipandang sebagai prototipe asrama mahasiswa (*boarding school*) paling awal dalam sejarah (Azra, 2012). Secara pedagogis, Rasulullah kerap menggunakan pendekatan *problem-based learning* dan analogi visual jauh sebelum teori-teori pendidikan modern merumuskannya. Menggambar garis di atas pasir untuk menjelaskan jalan kebenaran dan

kesesatan adalah bentuk inovasi media pembelajaran berbasis sumber daya lokal pada masa itu.

b. Fase Klasik: Akulturasi dan Lahirnya *Kuttab*

Ekspansi wilayah Islam pada era Dinasti Umayyah dan awal Abbasiyah membawa umat Muslim bersentuhan langsung dengan warisan intelektual Yunani, Persia, dan India. Respons terhadap akulturasi ini memunculkan inovasi struktural. *Kuttab* muncul sebagai institusi pendidikan dasar yang berfokus pada literasi baca-tulis, puisi, dan berhitung, memisahkan diri dari masjid agar kebersihan tempat ibadah tetap terjaga dari anak-anak kecil (Maksum, 1999).

Puncak pencapaian inovasi klasik terjadi melalui pelembagaan *Bayt al-Hikmah* di Baghdad pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Lembaga ini memperkenalkan metode penerjemahan massal, sinkretisasi filsafat asing dengan kalam Islam, serta integrasi observatorium dalam proses akademik. Penggunaan kertas secara masif sebuah teknologi mutakhir yang diimpor dari Tiongkok menggantikan perkamen kulit hewan, memicu ledakan publikasi buku dan mempercepat difusi ilmu pengetahuan secara eksponensial.

c. Fase Institusionalisasi: Kemenangan Model Madrasah

Memasuki abad ke-11, lanskap pendidikan Islam mengalami revolusi struktural berkat campur tangan negara. George Makdisi (1981) dalam karya monumentalnya *The Rise of Colleges* mendokumentasikan bagaimana wazir Nizam al-Mulk membangun jaringan Madrasah Nizamiyyah. Inovasi yang diperkenalkan sangat radikal untuk ukuran abad pertengahan: standarisasi kurikulum, penyediaan beasiswa penuh bagi mahasiswa, pembangunan asrama terintegrasi, serta sistem pendanaan abadi melalui skema wakaf. Madrasah ini mengakhiri era pendidikan swadaya para ulama, mengubahnya menjadi sistem pendidikan tinggi profesional yang memproduksi birokrat, hakim, dan teolog andal.

d. Benturan Modernitas dan Reformasi Abad ke-19

Trauma kolonialisme yang melanda dunia Islam pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 menyadarkan para pemikir Muslim akan ketertinggalan mereka di bidang sains dan teknologi. Sistem madrasah tradisional dinilai mengalami stagnasi, terjebak pada pengulangan teks-teks klasik (*syarah* dan *hasyiyah*), serta memelihara dikotomi yang tajam antara ilmu agama dan ilmu rasional empiris (Rahman, 1982).

Merespons krisis tersebut, gelombang inovasi baru muncul hampir serempak di berbagai belahan dunia Islam. Di Mesir, Muhammad Abduh memelopori modernisasi kurikulum Universitas Al-Azhar dengan memasukkan disiplin ilmu modern. Di anak benua India, Sayyid Ahmad Khan mendirikan MAO College (kini Aligarh Muslim University) yang mengadopsi penuh sistem pendidikan ala Cambridge namun dengan fondasi teologi Islam.

Di Nusantara, sejarah mencatat inovasi kelembagaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pembaharu. Berdirinya Madrasah Adabiyah di Padang (1909), serta sekolah-sekolah yang diinisiasi oleh Muhammadiyah (1912) dan kemudian Nahdlatul Ulama, menandai proses adopsi sistem klasikal Barat seperti penggunaan bangku, meja, papan tulis, dan pembagian jenjang kelas yang sebelumnya ditolak keras oleh kalangan pesantren tradisional (Steenbrink, 1986). Keputusan untuk merangkul infrastruktur fisik dan metode administrasi Eropa sembari mempertahankan muatan kurikulum Islam merupakan wujud kompromi strategis yang menyelamatkan pendidikan Islam di Indonesia dari kepunahan akibat isolasi.

Rangkaian sejarah panjang ini membuktikan satu tesis penting: inovasi dalam pendidikan Islam bukanlah barang impor yang tiba-tiba hadir di abad ke-21. Karakteristik dasarnya bersifat lentur (*flexible*) sekaligus kokoh (*rigid*). Lentur dalam mengadopsi instrumen fisik, pendekatan pedagogi, maupun manajerial kelembagaan; namun kokoh dalam menjaga basis epistemologi tauhid. Pemahaman historis

ini menjadi modal berharga bagi kita untuk menatap tantangan selanjutnya tanpa dijangkiti kecemasan kultural.

B. Prinsip Dasar Inovasi dalam Konteks Pendidikan Modern

Lanskap pendidikan modern yang ditandai oleh disrupsi teknologi dan pergeseran paradigma sosial menuntut institusi pendidikan Islam untuk bergerak lebih cepat. Namun, kecepatan tanpa kompas navigasi yang jelas berisiko melahirkan disorientasi. Banyak lembaga pendidikan terjebak pada fiksasi teknologi (technocentrism), di mana pengadaan perangkat keras digital dianggap sebagai puncak inovasi, sementara kultur akademik dan pedagogi masih beroperasi pada mode tradisional. Untuk menghindari jebakan superfisial tersebut, inovasi dalam pendidikan Islam harus diletakkan di atas prinsip-prinsip dasar yang solid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun teologis.

Michael Fullan (2007) dalam kajiannya mengenai perubahan pendidikan menegaskan bahwa inovasi bukanlah sekadar adopsi kebijakan atau instrumen baru, melainkan transformasi makna dan praktik di tingkat akar rumput. Ketika kerangka pemikiran ini ditarik ke dalam diskursus pendidikan Islam, transformasi tersebut harus dikawal oleh prinsip-prinsip fundamental agar inovasi yang dihasilkan tidak menceraabut entitas pendidikan dari akar identitasnya.

1. Dialektika Kesenambungan dan Perubahan

Prinsip paling esensial dalam inovasi pendidikan Islam terangkum dalam kaidah ushul fikih yang sangat monumental: *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik). Kaidah ini memberikan kerangka kerja yang sangat dinamis sekaligus terukur bagi para inovator pendidikan.

Inovasi tidak menuntut destruksi total terhadap sistem yang telah berjalan. Pendekatan radikal yang membuang seluruh warisan masa lalu sering kali memicu resistensi kultural yang fatal dari pemangku kepentingan (Azra, 2012). Sebaliknya, inovasi harus dilihat sebagai proses kurasi intelektual. Institusi pendidikan Islam berkewajiban mempertahankan elemen-elemen klasik yang terbukti efektif dalam membentuk karakter, seperti tradisi *sanad* keilmuan, keteladanan (*uswah*), dan kedekatan emosional antara guru dan murid. Bersamaan dengan itu, institusi harus berani mengadopsi elemen-elemen modern yang jauh lebih superior dalam hal efisiensi dan jangkauan, seperti sistem manajemen pembelajaran digital (LMS) atau model evaluasi berbasis data (*data-driven assessment*). Dialektika ini menempatkan inovasi pendidikan Islam bukan sebagai bentuk westernisasi, melainkan sebagai rasionalisasi sistem.

2. Kesatuan Epistemologis dan Integritas Aksiologis

Pendidikan modern sering kali beroperasi di atas paradigma sekuler yang memisahkan ranah sains empiris dari nilai-nilai spiritual. Inovasi yang diadopsi secara mentah dari paradigma ini berpotensi membawa bias materialistik ke dalam ruang kelas. Oleh sebab itu, setiap bentuk pembaruan dalam pendidikan Islam harus tunduk pada prinsip tauhid yang memandang ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan utuh yang bersumber dari Tuhan (Al-Faruqi, 1982).

Ketika sebuah lembaga pendidikan Islam memutuskan untuk berinovasi dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam kurikulumnya, evaluasi yang dilakukan tidak boleh berhenti pada aspek efisiensi teknis. Harus ada telaah aksiologis terkait dampak etis penggunaan teknologi tersebut terhadap perkembangan moral peserta didik. Wan Mohd Nor Wan Daud (1998) menggarisbawahi bahwa setiap alat pendidikan membawa muatan pandangan alam (*worldview*) penciptanya. Inovasi pendidikan Islam

menuntut proses filtrasi dan islamisasi instrumen, sehingga teknologi mutakhir yang digunakan tetap bermuara pada tujuan utama pendidikan, yakni melahirkan manusia beradab yang mengenali posisi dirinya di hadapan Tuhan dan masyarakat.

3. Relevansi Kontekstual dengan Kebutuhan Zaman

Institusi pendidikan yang gagal membaca arah perubahan zaman akan berakhir sebagai monumen sejarah. Prinsip relevansi menuntut inovasi pendidikan Islam untuk memiliki daya tanggap (*responsiveness*) yang tinggi terhadap tuntutan era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Lulusan madrasah maupun perguruan tinggi keislaman tidak hanya dituntut menguasai literatur keagamaan klasik (*turats*), tetapi juga harus dibekali dengan kompetensi abad 21 yang mencakup berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital (Trilling & Fadel, 2009).

Relevansi ini harus tercermin dalam rekonstruksi kurikulum. Kurikulum tidak lagi dapat dipandang sebagai dokumen statis yang berisi daftar mata pelajaran yang terisolasi satu sama lain. Inovasi kurikulum menuntut pendekatan interdisipliner dan transdisipliner. Sebagai contoh, diskursus fikih muamalah kontemporer tidak dapat diajarkan secara terpisah dari pemahaman mengenai ekonomi makro, algoritma *cryptocurrency*, atau sistem perbankan digital. Dengan mengontekstualisasikan materi ajar, pendidikan Islam membuktikan bahwa nalar agama selalu relevan untuk menjawab kompleksitas masalah kemanusiaan modern.

4. Agilitas Kelembagaan dan Pemecahan Kebuntuan Birokrasi

Inovasi pedagogis di ruang kelas akan layu sebelum berkembang apabila tidak didukung oleh struktur kelembagaan yang lincah (*agile*). Clayton Christensen (2008) dalam teorinya mengenai *disruptive innovation* di bidang pendidikan menunjukkan bahwa penghalang terbesar bagi

pembaruan justru sering kali berasal dari regulasi internal yang kaku dan birokrasi yang hierarkis.

Pendidikan Islam modern membutuhkan prinsip agilitas manajerial. Kepemimpinan institusi harus beralih dari model komando yang otoriter menuju kepemimpinan transformasional yang mendistribusikan wewenang. Guru dan dosen harus diberikan otonomi akademik untuk bereksperimen dengan metode pengajaran baru tanpa dibayangi ketakutan akan sanksi administratif jika gagal pada percobaan pertama. Sebuah lingkungan yang mengizinkan *trial and error* secara terkendali merupakan habitat alami bagi tumbuhnya budaya inovasi. Tanpa adanya keberanian struktural untuk merombak tata kelola (*governance*), inisiatif inovasi hanya akan berakhir sebagai dokumen proposal yang tidak pernah menyentuh realitas operasional.

5. Inklusivitas dan Pemerataan Akses (Demokratisasi Pengetahuan)

Salah satu paradoks terbesar dari inovasi pendidikan modern yang bertumpu pada teknologi adalah munculnya ancaman kesenjangan baru (*digital divide*). Inovasi pendidikan Islam akan kehilangan pijakan moralnya apabila ia hanya melayani kelompok elite dan meminggirkan kelompok marginal. Prinsip inklusivitas mewajibkan agar setiap rancangan inovasi memikirkan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta peserta didik berkebutuhan khusus.

Dalam kerangka filosofis Islam, pendidikan adalah hak asasi yang bersifat universal, bukan komoditas eksklusif. Oleh karena itu, inovasi tidak harus selalu identik dengan perangkat berbiaya tinggi. Inovasi yang sejati justru terletak pada kemampuan menciptakan solusi dengan sumber daya terbatas (*frugal innovation*). Misalnya, pemanfaatan radio komunitas atau modul belajar luring yang interaktif untuk daerah tanpa akses internet merupakan bentuk inovasi yang sama

berharganya dengan pembangunan laboratorium *Virtual Reality* di sekolah perkotaan. Orientasi akhir dari inovasi adalah pemberdayaan umat, bukan sekadar etalase kecanggihan infrastruktur.

C. Peran Guru sebagai Agen Perubahan

Sehebat apa pun desain kurikulum yang disusun oleh pemangku kebijakan atau secanggih apa pun infrastruktur teknologi yang dibangun di dalam ruang kelas, seluruh instrumen tersebut pada akhirnya bermuara pada satu titik penentu, yakni guru. Michael Fullan (2007) dalam berbagai studinya mengenai reformasi pendidikan berulang kali membuktikan bahwa pendidik adalah penjaga gerbang utama dari setiap inovasi. Tanpa adanya pemahaman, penerimaan, dan kapasitas eksekusi dari para aktor di garis depan ini, sebuah inovasi berskala nasional sekalipun hanya akan membeku menjadi dokumen administratif. Memposisikan guru murni sebagai teknisi pelaksana kurikulum adalah sebuah reduksi epistemologis yang fatal. Guru wajib direkonseptualisasi sebagai agen perubahan intelektual dan sosial yang proaktif.

Di dalam khazanah pemikiran pendidikan Islam, peran transformatif ini sebenarnya berpijak pada akar kesejarahan dan teologis yang sangat kokoh. Tradisi klasik tidak pernah memandang guru sekadar sebagai penyalur data. Konsep *mu'allim* (penyampai ilmu yang berbasis pada struktur pengetahuan rasional), *murabbi* (pengasuh jiwa yang membina potensi fitrah), serta *muaddib* (pembentuk adab yang menanamkan disiplin moral) merupakan sebuah trilogi kompetensi komprehensif yang menuntut keteladanan paripurna (Al-Attas, 1979). Ketika trilogi peran ini dihadapkan pada realitas disrupsi kultural mutakhir, posisi guru secara otomatis harus dielevasi dari sekadar pengajar di ruang tertutup menjadi desainer pengalaman belajar yang mampu

menghubungkan teks-teks klasik dengan realitas dunia luar yang terus bergerak.

Untuk merealisasikan fungsi sebagai agen perubahan, langkah pertama yang menuntut keberanian adalah membongkar paradigma pedagogi konservatif yang stagnan. Paulo Freire (1970) memberikan kritik tajam terhadap apa yang ia rumuskan sebagai sistem pendidikan gaya bank (*banking concept of education*). Dalam sistem mekanis ini, murid diperlakukan laksana wadah kosong yang pasif menunggu diisi oleh guru yang memegang monopoli kebenaran tunggal. Sayangnya, model transmisi satu arah ini masih kerap dipraktikkan di berbagai institusi keagamaan, sering kali berbalut legitimasi kepatuhan mutlak terhadap figur otoritas. Guru yang berjiwa inovatif harus sanggup mendekonstruksi hierarki kaku tersebut dengan membangun ekosistem kelas yang dialogis. Daya kritis murid dirangsang melalui diskursus yang argumentatif sehingga kepatuhan dimaknai ulang bukan sebagai pembungkaman nalar, melainkan penghormatan terhadap otoritas keilmuan yang dibangun melalui proses penalaran rasional.

Menjadi inisiator pembaruan juga menuntut kelincahan epistemik dan penguasaan orkestrasi metodologis. Dalam kerangka kerja *Technological Pedagogical Content Knowledge* atau TPACK yang diformulasikan oleh Mishra dan Koehler (2006), pendidik inovatif diwajibkan memiliki kemampuan merajut pemahaman ontologi materi, strategi pedagogi, dan pemanfaatan perangkat digital secara simultan. Guru masa kini tidak perlu lagi memosisikan diri sebagai kamus berjalan atau berlomba dengan mesin pencari dalam menyediakan fakta empiris. Fokus fasilitasi belajar harus bergeser secara tajam dari penguasaan memori tingkat rendah menuju kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher-order thinking skills*). Guru mengambil peran strategis sebagai kurator pengetahuan yang bertugas memandu siswa

menavigasi lautan informasi, melakukan verifikasi silang, dan merangkai kesimpulan yang logis serta koheren.

Lebih dari sekadar fungsi kognitif, pendidik mengemban tanggung jawab aksiologis yang jauh lebih berat di tengah gempuran ideologi global. Arus informasi tanpa batas membawa serta beragam bias pandangan alam yang berpotensi menggerus fondasi akidah peserta didik. Konsep *tabayyun* (klarifikasi dan validasi) yang secara klasik diajarkan dalam ilmu hadis perlu diekstraksi dan dikontekstualisasikan menjadi literasi media kritis (*critical media literacy*). Melalui pendampingan yang intensif, siswa dilatih untuk tidak sekadar mengonsumsi konten digital secara mentah. Mereka didorong untuk membedah motif laten, struktur nilai, dan implikasi sosiologis dari informasi yang mereka hadapi.

Namun demikian, tuntutan peran yang begitu kompleks ini kerap kali menabrak dinding hambatan struktural. Andy Hargreaves (2003) mengingatkan bahwa praktik mengajar dalam masyarakat pengetahuan (*knowledge society*) sangat bergantung pada dukungan ekosistem institusional. Pendidik akan kehilangan kapasitas transformatifnya apabila energi mental mereka habis tersedot oleh beban administratif yang repetitif dan regulasi birokrasi yang membelenggu kreativitas. Inovasi pendidikan mengisyaratkan keharusan desentralisasi wewenang di tingkat manajerial madrasah. Kepemimpinan sekolah harus berani menciptakan rasa aman secara psikologis (*psychological safety*) yang memberikan otonomi bagi guru untuk bereksperimen. Sebuah sistem yang sehat tidak akan memberikan sanksi pada kegagalan eksperimen pedagogi di tahap awal, melainkan menjadikannya bahan evaluasi formatif. Transformasi pendidikan Islam yang sejati selalu bermula dari emansipasi guru terhadap rutinitas birokrasi mekanis.

D. Indikator Keberhasilan Inovasi Pendidikan Islam

Mengukur tingkat keberhasilan sebuah inovasi dalam ruang lingkup pendidikan bukanlah perkara ekuivalensi matematis yang sederhana. Berbeda dengan industri manufaktur yang dapat menghitung produktivitas murni dari efisiensi mesin dan kuantitas produk, institusi keilmuan berhadapan dengan subjek manusia yang memiliki kerumitan psikologis, sosial, maupun spiritual. Mengklaim bahwa sebuah madrasah atau perguruan tinggi telah berhasil melakukan pembaruan hanya karena mereka memborong perangkat komputasi awan atau meresmikan gedung laboratorium berdesain futuristik merupakan sebuah kesesatan logika evaluatif. Perubahan fisik dan infrastruktur teknis baru menyentuh lapisan permukaan. Substansi keberhasilan inovasi pendidikan Islam menuntut serangkaian indikator yang jauh lebih holistik, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan ketahanan institusional.

Setidaknya terdapat empat indikator fundamental yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menguji validitas sebuah gagasan pembaruan, guna memastikan apakah langkah tersebut benar-benar memberikan dampak transformatif atau sekadar menjadi proyek artifisial pencitraan birokrasi.

Pertama, terjadinya eskalasi mutu penalaran kritis dan kemandirian kognitif peserta didik. Indikator paling kasat mata dari stagnasi sistem pengajaran adalah ketergantungan mutlak siswa terhadap hafalan teks tanpa pemahaman konteks. Inovasi pedagogi dinyatakan membuahkan hasil apabila ruang kelas berubah wujud menjadi laboratorium pemikiran. Guru melepaskan kebiasaan mendiktekan kesimpulan tunggal, sementara murid secara aktif dilatih membedah anatomi suatu masalah. Darling Hammond (2010) mengemukakan bahwa pembelajaran bermutu tinggi selalu ditandai oleh kapasitas siswa dalam mentransfer pengetahuan teoretis ke dalam kerangka pemecahan masalah empiris. Dalam lanskap

pendidikan Islam, parameter ini termanifestasi manakala peserta didik mampu merelevansikan kaidah-kaidah ushul fikih atau tafsir klasik untuk merespons dilema bioetika kontemporer, etika kecerdasan buatan, maupun peliknya transaksi ekonomi digital.

Kedua, tercapainya koherensi yang solid antara kecerdasan intelektual dan integritas adab. Dimensi ini menjadi titik distingsi paling esensial yang membedakan epistemologi pendidikan Muslim dengan model pendidikan sekuler. Sebuah terobosan kurikulum betapapun mutakhirnya akan dinilai cacat secara filosofis jika institusi tersebut memproduksi lulusan yang brilian secara akademik namun rapuh integritas moralnya. Syed Muhammad Naquib al-Attas (1980) secara konsisten mengingatkan bahwa keruntuhan peradaban selalu berakar dari hilangnya adab (*loss of adab*) yang berujung pada korupsi ilmu pengetahuan. Atas landasan itu, pelacakan keberhasilan pembaruan harus mampu merekam transformasi karakter melalui observasi perilaku longitudinal, tidak lagi bersandar secara eksklusif pada lembar ujian mata pelajaran agama. Kapasitas menahan diri dari kecurangan akademik, empati terhadap kelompok marginal, serta resiliensi emosional dalam menghadapi konflik merupakan parameter kesuksesan yang otentik.

Ketiga, terbentuknya relevansi sosial dan kelenturan adaptasi lulusan di tengah masyarakat majemuk. Produk dari sistem pendidikan Islam tidak dirancang untuk hidup terasing di menara gading keilmuan atau mengisolasi diri secara eksklusif. Mereka disiapkan untuk melebur sebagai aktor sosial yang membawakan misi kerahmatan (*rahmatan lil 'alamin*). Inovasi kelembagaan terbukti tepat sasaran manakala profil lulusan terbukti memiliki daya tahan untuk menavigasi kompleksitas pasar kerja modern tanpa mengalami kegagalan kultural. Kesenjangan antara kompetensi hasil didikan madrasah dengan kualifikasi yang dituntut oleh lingkungan

eksternal harus menyusut secara terukur. Manakala institusi pendidikan Islam berhasil membekali alumninya dengan kelancaran literasi digital, kepekaan lintas budaya, dan kecakapan orkestrasi tim tanpa mencabut akar religiusitas mereka, inovasi tersebut telah mencapai titik resonansi optimalnya (Azra, 2012).

Keempat, pelebagaan inovasi menjadi kultur organisasi yang berkelanjutan (*sustainable institutionalization*). Kerap kali dijumpai di lapangan, inisiatif pembaruan hanya hidup selama periode kepemimpinan kepala sekolah atau rektor tertentu, lalu layu perlahan dan mati ketika terjadi pergantian rezim. Michael Fullan (2001) dalam pembedahannya mengenai teori perubahan pendidikan menegaskan bahwa inovasi sejati tidak dievaluasi dari seberapa dramatis acara peluncurannya, melainkan dari kemampuannya bertahan dan melebur menjadi rutinitas sistem yang baru. Dari sudut pandang manajerial, indikator ini menuntut terwujudnya efisiensi tata kelola anggaran, distribusi wewenang pengambilan keputusan secara demokratis, serta berjalannya siklus penjaminan mutu internal secara proaktif. Apabila budaya riset kolaboratif, tradisi refleksi kritis antar-guru, dan keterbukaan terhadap evaluasi telah berjalan otomatis tanpa memerlukan instrumen paksaan dari atasan, maka institusi tersebut dipastikan telah meraih kematangan inovatif yang permanen.

E. Simpulan

Bab ini mendasari seluruh diskursus inovasi pendidikan Islam dengan membangun fondasi filosofis, teologis, dan historis yang kokoh. Inovasi pendidikan Islam didefinisikan sebagai proses rekayasa sistematis dan berkesinambungan dalam kurikulum, pedagogi, teknologi, dan manajerial kelembagaan untuk merespons dinamika zaman tanpa mereduksi nilai-nilai fundamental tauhid.

Secara historis, pendidikan Islam telah mengalami transformasi kelembagaan dari fase kenabian (Darul Arqam, Suffah), fase klasik (Kuttab, Bayt al-Hikmah), fase institusionalisasi (Madrasah Nizamiyyah), hingga reformasi abad ke-19 yang merespons kolonialisme. Ini membuktikan bahwa inovasi bukanlah barang impor abad ke-21, melainkan karakter intrinsik peradaban Islam yang lentur dalam instrumen namun kokoh dalam epistemologi tauhid.

Prinsip dasar inovasi mencakup: (1) dialektika kesinambungan dan perubahan (al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah); (2) kesatuan epistemologis dan integritas aksiologis; (3) relevansi kontekstual dengan kebutuhan zaman; (4) agilitas kelembagaan; dan (5) inklusivitas serta pemerataan akses.

Guru diposisikan sebagai agen perubahan dengan trilogi kompetensi mu'allim, murabbi, dan muaddib. Indikator keberhasilan inovasi meliputi: (1) eskalasi penalaran kritis peserta didik; (2) koherensi antara kecerdasan intelektual dan integritas adab; (3) relevansi sosial lulusan; dan (4) pelebagaan inovasi sebagai kultur organisasi berkelanjutan.

F. Soal Latihan

1. Esai Reflektif

Jelaskan secara komprehensif pengertian inovasi pendidikan Islam dengan memadukan perspektif sosiologi Rogers dan filsafat pendidikan Al-Attas! Berikan contoh konkret bagaimana inovasi di lembaga pendidikan Islam seharusnya diimplementasikan tanpa kehilangan pijakan teologisnya. (CPMK1)

2. Analisis Historis

Buatlah peta waktu (timeline) transformasi kelembagaan pendidikan Islam dari fase kenabian hingga reformasi abad ke-20! Untuk setiap fase,

identifikasi: (a) bentuk institusi, (b) inovasi kunci yang diperkenalkan, dan (c) faktor eksternal yang memicu perubahan. (CPMK1, CPMK3)

3. Tugas 3: Studi Kasus

Carilah satu lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah, atau PTKI) yang telah melakukan inovasi! Analisis menggunakan kerangka lima prinsip dasar inovasi: (1) bagaimana lembaga menjaga dialektika tradisi-modernitas; (2) bagaimana kesatuan epistemologis dipertahankan; (3) bagaimana relevansi kontekstual diwujudkan; (4) bagaimana agilitas kelembagaan ditunjukkan; dan (5) bagaimana inklusivitas diimplementasikan. (CPMK2, CPMK3)

4. Proyek Desain Indikator

Rumuskan 10 indikator keberhasilan inovasi pendidikan Islam yang holistik untuk sebuah madrasah! Indikator harus mencakup empat dimensi: (1) kognitif/penalaran kritis, (2) afektif/adab, (3) relevansi sosial, dan (4) keberlanjutan kelembagaan. Sertakan rubrik penilaian sederhana untuk setiap indikator. (CPMK2, CPMK4)

5. Analisis Peran Guru

Pilihlah satu isu kontemporer (misalnya: penggunaan AI di kelas, digital parenting, atau radikalisme di media sosial). Rancang peran guru sebagai agen perubahan dalam merespons isu tersebut berdasarkan trilogi mu'allim-murabbi-muaddib. Tuliskan dalam format makalah singkat (3-5 halaman). (CPMK2, CPMK3)



BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB II

TREN GLOBAL INOVASI PENDIDIKAN ISLAM

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap epistemologi, otoritas keagamaan, dan pedagogi dalam pendidikan Islam.
2. Membandingkan model inovasi pendidikan Islam di negara maju (Singapura, Finlandia, Jepang) berdasarkan pendekatan struktural, pedagogis, dan kultural.
3. Mengadaptasi praktik terbaik (*best practices*) dari tren global ke dalam konteks pendidikan Islam di Asia Tenggara dengan prinsip wasathiyah (jalan tengah).

Memprediksi tren pendidikan 2030 (personalisasi, micro-credentials, metaverse, eko-teologi) dan merumuskan strategi antisipasi bagi lembaga pendidikan Islam. Arus globalisasi dan lompatan eksponensial dalam bidang teknologi telah meruntuhkan sekat-sekat geografis, memaksa setiap institusi[©] untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap cara mereka beroperasi. Pendidikan Islam kini berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Mempertahankan model pedagogi abad ke-20 untuk mendidik generasi yang akan hidup di pertengahan abad ke-21 adalah sebuah bunuh diri peradaban. Bab ini akan memetakan konstelasi tren global yang sedang merombak lanskap pendidikan secara masif, menelusuri bagaimana negara-negara maju mendesain ulang kurikulum mereka, serta memproyeksikan arah adaptasi yang harus ditempuh oleh madrasah dan perguruan tinggi Islam demi mempertahankan signifikansinya di pentas dunia.

A. Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap Pendidikan Islam

Gagasan mengenai Revolusi Industri 4.0 pertama kali diartikulasikan secara terstruktur oleh Klaus Schwab pada Forum Ekonomi Dunia. Schwab (2016) merumuskan era ini sebagai fusi teknologi yang mengaburkan batas antara domain fisik, digital, dan biologis. Manifestasi teknis dari revolusi ini mencakup integrasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *Internet of Things* (IoT), *Big Data*, dan sistem siber-fisik ke dalam seluruh denyut nadi peradaban manusia. Ketika gelombang raksasa ini menghantam sektor pendidikan, muncul sebuah paradigma baru yang kerap diidentifikasi sebagai *Education 4.0*.

Bagi institusi pendidikan Islam, benturan dengan Revolusi Industri 4.0 memicu guncangan yang berdimensi ganda. Guncangan pertama terjadi pada level epistemologis dan otoritas keagamaan. Selama berabad-abad, transmisi pengetahuan Islam sangat bergantung pada model komunikasi

asimetris dan kehadiran fisik. Figur *kyai*, *ustadz*, atau dosen memegang otoritas tunggal sebagai sumber ilmu, dan validitas pengetahuan diukur melalui persambungan *sanad* (rantai transmisi) yang bersifat tatap muka (*talaqqi*). Kini, algoritma pencarian dan kecerdasan buatan telah mendemokratisasi akses terhadap teks-teks keagamaan secara radikal. Bunt (2018) dalam kajiannya mengenai otoritas siber Islam menyoroti lahirnya fenomena syekh Google atau otoritas algoritmik, di mana generasi Muslim muda cenderung mencari fatwa dan referensi keagamaan melalui ruang maya ketimbang mendatangi majelis taklim konvensional.

Kondisi tersebut memaksa lembaga pendidikan Islam untuk meredefinisi fungsi utamanya. Jika madrasah hanya menempatkan dirinya sebagai pusat distribusi informasi keagamaan, peran tersebut akan dengan mudah digantikan oleh mesin yang mampu menyajikan ribuan referensi tafsir dalam hitungan milidetik. Pendidik Muslim dituntut bermetamorfosis dari sekadar penceramah menjadi kurator makna. Tugas utama mereka saat ini adalah membekali peserta didik dengan kerangka epistemologi yang ketat untuk menavigasi, memverifikasi, dan menyaring lautan informasi digital agar tidak tergelincir pada radikalisme atau pendangkalan pemahaman agama.

Guncangan kedua melanda wilayah pedagogi dan arsitektur kurikulum. Paradigma *Education 4.0* meniscayakan personalisasi pembelajaran (*personalized learning*). Peter Fisk (2017) memaparkan bahwa pendidikan di era ini ditandai oleh fleksibilitas ruang dan waktu, di mana pembelajaran berpusat pada proyek-proyek riil, dan data analitik digunakan untuk melacak perkembangan kognitif setiap individu secara presisi. Pola pendidikan Islam yang masih mengandalkan klasikal massal, hafalan mekanis tanpa kontekstualisasi, serta penyeragaman instrumen ujian harus segera didekonstruksi. Hafalan al-Qur'an dan Hadis tetap menjadi fondasi esensial,

namun kompetensi analitik untuk membumikan teks-teks tersebut ke dalam realitas sains, ekonomi digital, dan rekayasa genetika menjadi jauh lebih mendesak.

Implikasi lebih jauh dari revolusi ini adalah tuntutan integrasi multidisipliner. Pemisahan kaku antara ilmu-*ilmu qauliyah* (wahyu) dan ilmu-*ilmu kauniyah* (alam semesta/sains empiris) semakin kehilangan pijakan rasionalnya. Peserta didik di madrasah aliyah atau perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) harus mulai diakrabkan dengan *computational thinking* (pemikiran komputasional), literasi data, dan etika teknologi. Sebagai contoh praktis, kajian fikih kontemporer (*fiqh al-nawazil*) tidak akan mampu memberikan fatwa yang komprehensif mengenai *cryptocurrency*, rekayasa DNA, atau hak cipta algoritma kecerdasan buatan apabila para lulusannya mengalami kegagalan dalam memahami anatomi teknologi tersebut (Azra, 2012).

Meski disruptsi ini membawa ancaman marjinalisasi bagi lembaga yang lambat beradaptasi, Revolusi Industri 4.0 sesungguhnya menyediakan panggung pementasan yang luar biasa besar bagi universalitas ajaran Islam. Teknologi *Virtual Reality* (VR) dapat merekonstruksi sejarah peradaban Islam secara imersif, membawa siswa merasakan atmosfer Andalusia atau Baghdad pada masa keemasannya. Sistem *Blockchain* dapat diadaptasi untuk memastikan keaslian sertifikasi hafalan al-Qur'an lintas negara yang anti-pemalsuan. Kesiapan institusi pendidikan Islam dalam mengeksplorasi infrastruktur 4.0 tanpa kehilangan roh spiritualitasnya akan menjadi determinan utama apakah mereka akan menjadi subjek pencetak peradaban baru atau sekadar objek penderita dari kemajuan zaman.

B. Inovasi Pendidikan Islam di Negara Maju

Melacak jejak inovasi pendidikan Islam tidak harus selalu terpusat pada negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Timur Tengah atau Asia Selatan.

Paradigma yang jauh lebih segar justru dapat ditemukan ketika kita membedah bagaimana komunitas Muslim minoritas bernegosiasi, beradaptasi, dan merancang bangun ekosistem pendidikan mereka di tengah hegemoni sistem pendidikan negara-negara sekuler maju. Jepang, Finlandia, dan Singapura menawarkan tiga model komparasi yang sangat kontras namun sama-sama brilian dalam mengakselerasi transformasi pendidikan Islam. Ketiga negara ini merepresentasikan titik temu yang langka antara ortodoksi kurikulum keagamaan dengan infrastruktur pedagogi paling mutakhir di dunia.

1. Singapura: Sinkretisasi Kurikulum Global dan Standar Nasional

Singapura menghadirkan potret paling progresif mengenai rasionalisasi kelembagaan madrasah. Berada di bawah payung regulasi *Majlis Ugama Islam Singapura* (MUIS), madrasah-madrasah di negara kota ini tidak dibiarkan beroperasi sebagai institusi marginal yang eksklusif. Sebaliknya, mereka dipaksa untuk bertarung dalam arena kompetisi akademik yang sangat ketat melalui implementasi *Joint Madrasah System* (JMS) yang diluncurkan pada tahun 2007.

Inovasi paling radikal dari sistem JMS adalah spesialisasi kelembagaan dan integrasi kurikulum hibrida. Madrasah tidak lagi dituntut mengajarkan seluruh spektrum ilmu agama dan umum secara pukul rata yang sering kali membebani kapasitas kognitif siswa. Siswa diarahkan pada jalur akademik yang spesifik baik jalur sains, humaniora, maupun *ukhrawi* (keagamaan murni) berdasarkan pemetaan bakat sejak pendidikan dasar. Secara pedagogis, madrasah di Singapura seperti Madrasah Irsyad Zuhri mengadopsi penuh kurikulum nasional untuk mata pelajaran sains, matematika, dan bahasa Inggris, sehingga siswanya wajib mengikuti ujian nasional *Primary School Leaving Examination* (PSLE).

Integrasi ini menuntut guru-guru madrasah untuk melekat teknologi (EdTech) dan menerapkan model *inquiry-based*

learning ala Cambridge. Mutalib (2012) mencatat bahwa keberhasilan madrasah Singapura terletak pada keberanian mereka mengawinkan epistemologi rasional-saintifik Barat dengan *turats* Islam, tanpa merasa inferior. Lulusan mereka tidak hanya fasih membaca kitab kuning, tetapi juga mampu menembus universitas terkemuka dunia di bidang kedokteran dan rekayasa perangkat lunak, sekaligus mematahkan stigma bahwa pendidikan agama selalu berbanding terbalik dengan kecakapan sains.

2. Finlandia: Pedagogi Kritis dan Kebebasan Otonom

Jika Singapura menonjolkan inovasi struktural yang sangat tersentralisasi, Finlandia menyajikan antitesis melalui otonomi pedagogi yang radikal. Reputasi Finlandia sebagai kiblat pendidikan dunia bertumpu pada kepercayaan absolut negara terhadap kapasitas guru, ketiadaan ujian terstandardisasi secara masif, dan pendekatan kesejahteraan siswa (*student well-being*).

Dalam konteks pendidikan Islam, Finlandia menerapkan kebijakan inklusi yang sangat unik. Regulasi pendidikan nasional mewajibkan sekolah negeri untuk menyediakan kelas pendidikan agama sesuai keyakinan siswa, asalkan terdapat minimal tiga siswa dengan agama yang sama di sekolah tersebut (Rissanen, 2014). Inovasi pendidikan Islam di sini tidak terjadi pada level pembangunan fisik madrasah swasta, melainkan pada transformasi metodologi pengajaran di dalam ruang kelas publik.

Guru-guru pendidikan agama Islam di Finlandia merevolusi cara teks-teks suci diajarkan. Mereka membuang pendekatan indoktrinasi yang dogmatis, menggantinya dengan model dialogis dan reflektif. Siswa Muslim didorong untuk mempertanyakan, mendiskusikan, dan merasionalisasi nilai-nilai keislaman lalu mengontekstualisasikannya dengan etika kewarganegaraan Finlandia yang egaliter. Evaluasi pembelajaran tidak diukur dari seberapa presisi siswa

menghafal rukun wudu, tetapi dari kemampuan mereka menyusun esai analitis mengenai relasi antara ajaran zakat dengan sistem negara kesejahteraan (*welfare state*). Pendekatan ini melahirkan generasi Muslim Eropa yang memiliki resiliensi teologis yang tangguh sekaligus kecerdasan kewarganegaraan yang tinggi.

3. Jepang: Hibridisasi Karakter (Akhlak dan Tokkatsu)

Eksperimen pendidikan Islam di Jepang bergerak pada ranah hibridisasi kultural, menyatukan kedisiplinan komunal Asia Timur dengan kerangka adab Islam. Ekosistem pendidikan Jepang terkenal dengan konsep *Tokkatsu* (kegiatan khusus), sebuah pendekatan holistik di luar jam pelajaran akademik yang dirancang khusus untuk membentuk karakter, kerja sama tim, dan tanggung jawab sosial. Praktik membersihkan ruang kelas bersama-sama, melayani makan siang untuk teman sekelas, hingga musyawarah kelas merupakan rutinitas harian yang membentuk etos kerja bangsa Jepang.

Sekolah-sekolah Islam yang mulai bermunculan di Jepang, seperti YUAI International Islamic School di Tokyo, menangkap peluang ini dengan sangat cerdas. Mereka melakukan sinkretisasi antara konsep *Tarbiyah* dalam Islam dengan *Shitsuke* (pembiasaan disiplin) ala Jepang. Inovasinya terletak pada kemampuan meleburkan identitas teologis ke dalam laku sosiologis (Tsuneyoshi, 2013). Ajaran tentang kebersihan (*thaharah*) tidak sekadar diajarkan melalui praktik wudu, tetapi dieksekusi secara nyata melalui partisipasi siswa dalam menjaga sanitasi lingkungan sekolah dan ruang publik.

Di sisi infrastruktur, sekolah-sekolah ini memanfaatkan ekosistem masyarakat Society 5.0 Jepang untuk mengakselerasi pembelajaran literasi digital dan robotika sejak dini, namun tetap menempatkan etika Islam sebagai pengontrol algoritmanya. Model ini membuktikan bahwa pendidikan Islam sangat kompatibel dengan kearifan lokal

(*local wisdom*) manapun, selama kearifan tersebut tidak bertabrakan dengan prinsip tauhid.

Ketiga studi kasus di atas menyingkap sebuah konklusi penting. Inovasi pendidikan Islam pada skala global tidak selalu menuntut penciptaan entitas yang sama sekali baru dari ruang hampa. Kapasitas untuk menyerap praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari berbagai peradaban—mulai dari tata kelola mutu Singapura, kemerdekaan pedagogi Finlandia, hingga rekayasa sosial Jepang—lalu melakukan islamisasi terhadap instrumen-instrumen tersebut, merupakan bentuk kecerdasan inovasi yang paling pragmatis sekaligus efektif.

C. Adaptasi Inovasi Pendidikan Islam di Asia Tenggara

Asia Tenggara menempati posisi strategis yang sangat memikat dalam peta diskursus pendidikan Islam global. Berbeda dengan kawasan Timur Tengah yang kerap diwarnai turbulensi geopolitik, lanskap sosiologis ASEAN menawarkan ekosistem yang jauh lebih kondusif bagi eksperimentasi kelembagaan. Wilayah ini menampung spektrum entitas yang luar biasa beragam, membentang dari sistem mayoritas yang disokong penuh oleh aparaturnya negara hingga komunitas minoritas yang harus merancang strategi sintasan (*survival*) di tengah kebijakan asimilasi. Adaptasi inovasi di kawasan ini tidak berpusat pada ambisi penyeragaman kurikulum, melainkan pada pencarian ekuilibrium; sebuah upaya menyeimbangkan pelestarian tradisi intelektual lokal (*local genius*) dengan tuntutan integrasi ekonomi regional, terutama dalam merespons kompetisi pasar kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Di Indonesia, episentrum adaptasi paling masif dan organik terjadi pada institusi pesantren. Sebagai garda terdepan transmisi pengetahuan Islam kultural, pesantren masa lalu identik dengan isolasi sosial dan penolakan terhadap epistemologi Barat. Kini, transformasi kelembagaannya bergerak dengan akselerasi yang mencengangkan. Inovasi

tidak lagi dimaknai sebatas pendirian sekolah formal (SD, SMP, SMA) di dalam kompleks pondok, melainkan telah merambah pada integrasi kurikulum vokasi, kemandirian ekonomi, dan literasi teknologi inkubasi bisnis (pesantrenpreneur). Nizar (2013) menyoroti bahwa rasionalisasi struktural ini juga bergema kuat di level pendidikan tinggi melalui gelombang konversi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Perubahan nomenklatur ini bukan sekadar manuver birokrasi, melainkan sebuah dekonstruksi terhadap dikotomi keilmuan. Pendirian fakultas kedokteran, sains, dan teknologi yang sejajar dengan fakultas ushuluddin melahirkan hibridisasi akademik yang belum pernah memiliki preseden di era sebelumnya.

Bergeser ke Semenanjung Malaya, Malaysia menghadirkan arsitektur adaptasi yang sangat sentralistis dan dikendalikan oleh instrumen negara (*state-driven adaptation*). Departemen Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bersama kementerian pendidikan merancang cetak biru yang secara sistematis menyerap sekolah-sekolah agama rakyat ke dalam arus utama nasional melalui skema Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Mutalib (2012) mencatat bahwa intervensi manajerial ini memungkinkan standardisasi mutu pedagogi secara nasional, penyediaan infrastruktur digital yang merata, hingga penyelarasan kualifikasi guru dengan metrik internasional. Kurikulum dinayah diintegrasikan sedemikian presisi sehingga sertifikat kelulusannya diakui secara global. Pendekatan ini membuka koridor yang sangat lebar bagi siswa madrasah untuk melanjutkan studi tidak hanya ke institusi tradisional seperti Universitas Al-Azhar, tetapi juga bersaing memperebutkan kursi di universitas-universitas sekuler Barat terkemuka.

Dinamika adaptasi menampakkan anatomi yang sepenuhnya berbeda ketika kita membedah wilayah Muslim

minoritas, seperti Patani di Thailand Selatan atau Mindanao di Filipina Selatan. Dalam konteks sosiologis tersebut, institusi pondok atau madrasah tradisional sering kali dicurigai oleh pemerintah pusat sebagai kantong eksklusivisme atau resistensi politik. Oleh sebab itu, inovasi pendidikan di wilayah ini memikul fungsi ganda: sebagai instrumen mobilitas ekonomi sekaligus alat resolusi konflik dan pembangunan perdamaian (Hasan, 2011). Lembaga pendidikan Islam dipaksa bermanuver dengan mengadopsi kurikulum bilingual dan memasukkan mata pelajaran vokasional sekuler demi meraih akreditasi dari kementerian pendidikan setempat. Melalui kompromi kurikulum yang pragmatis ini, madrasah membuktikan bahwa para lulusannya memiliki kecakapan profesional yang kompatibel dengan pasar kerja nasional. Secara berangsur, adaptasi ini berhasil mengikis stigma radikalisme dari luar sekaligus mencegah segregasi sosial bagi alumni di dalam negeri.

Konstelasi pembaruan lintas negara ini menegaskan sebuah postulat penting bahwa inovasi pendidikan Islam tidak bisa direplikasi secara mekanis bagai cetakan pabrik. Karakteristik adaptasi di Asia Tenggara bertumpu kuat pada filosofi *wasathiyyah* (jalan tengah). Institusi pendidikannya tidak serta-merta menelan mentah-mentah tren disrupsi digital atau pedagogi liberal, namun di saat yang sama menolak untuk membeku dalam cangkang puritanisme yang kaku. Kemampuan mengorkestrasi dialog tanpa henti antara arus modernisasi global dengan ketahanan kearifan lokal inilah yang menjadikan model pendidikan Islam Asia Tenggara sangat tangguh. Ia kini tidak lagi hanya menjadi konsumen atas teori-teori pendidikan Barat, melainkan telah menjelma menjadi prototipe alternatif bagi rekonstruksi pendidikan di dunia Islam secara keseluruhan.

D. Prediksi Tren Pendidikan 2030

Memproyeksikan arsitektur pendidikan pada tahun 2030 bukan sekadar latihan imajinasi futuristik, melainkan keharusan strategis. Menjelang akhir dekade ini, dunia akan berhadapan dengan puncak bonus demografi di berbagai negara berkembang sekaligus tenggat waktu pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi melalui inisiatif *OECD Future of Education and Skills 2030* (2018) telah merumuskan bahwa peserta didik masa depan harus memiliki kompas navigasi untuk menghadapi situasi yang serba tidak pasti, ambigu, dan sarat dengan volatilitas. Bagi institusi pendidikan Islam, horizon 2030 menjanjikan serangkaian pergeseran tektonik yang akan mendisrupsi seluruh tata kelola pengajaran konvensional.

Secara spesifik, terdapat empat lintasan tren utama yang diprediksi akan merekonstruksi wajah pendidikan Islam dalam satu dekade ke depan.

Pertama, transisi dari pembelajaran massal menuju hiper-personalisasi berbasis algoritma (*hyper-personalized learning*). Model klasikal yang memaksa empat puluh siswa di dalam satu kelas untuk menyerap materi pada kecepatan yang sama akan dianggap sebagai artefak pedagogi yang usang. Kecerdasan buatan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai mesin pencari, tetapi bermetamorfosis menjadi asisten tutor virtual yang mampu memetakan kurva kognitif dan gaya belajar tiap santri secara *real-time*. Dalam pengajaran tahfiz al-Qur'an, misalnya, peranti lunak akan mampu mendeteksi pola kelemahan *makharijul huruf* (artikulasi fonetik) seorang siswa berdasarkan analisis suara, lalu menyusun program remediasi yang spesifik. Pergeseran ini meniscayakan redefinisi peran pendidik; ketika beban transfer kognitif telah diambil alih oleh mesin, guru agama akan dituntut untuk sepenuhnya

memusatkan energi pada transfer ruhaniah dan bimbingan moral yang mustahil direplikasi oleh kecerdasan silikon.

Kedua, dekonstruksi sistem gelar akademik konvensional melalui invasi kredensial mikro (*micro-credentials*). Pasar tenaga kerja masa depan akan semakin mengabaikan durasi studi empat tahun demi mencari kualifikasi kompetensi spesifik yang siap pakai. Tren ini memaksa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk membongkar kurikulum raksasanya menjadi modul-modul modular yang lincah. Alih-alih hanya menawarkan program sarjana Syariah yang panjang dan padat, universitas Islam di tahun 2030 harus mampu menyediakan sertifikasi intensif berdurasi pendek, seperti diploma audit kehalalan produk bioteknologi, sertifikasi fikih transaksi mata uang kripto, atau spesialisasi mediasi konflik keluarga berbasis hukum Islam. Mahasiswa dapat merakit sendiri portofolio keahlian mereka lintas disiplin, menghancurkan tembok tinggi yang selama ini mengisolasi fakultas agama dari fakultas sains dan ekonomi.

Ketiga, konvergensi ruang belajar ke dalam ekosistem imersif dan *metaverse*. Keterbatasan infrastruktur fisik yang selama ini membelenggu madrasah-madrasah di negara berkembang akan diatasi melalui perluasan realitas maya (VR/AR). Kajian sejarah kebudayaan Islam tidak lagi bertumpu pada teks linear; siswa dapat masuk ke dalam simulasi digital tiga dimensi untuk mengobservasi langsung rancang bangun perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad atau taktik negosiasi Perjanjian Hudaibiyah. Kendati demikian, tren ini akan memicu perdebatan fikih yang sengit terkait batasan teologis antara realitas fisik dan virtual, seperti validitas simulasi manasik haji di *metaverse*. Institusi pendidikan Islam harus mengambil posisi proaktif merumuskan etika realitas maya, memastikan bahwa teknologi imersif digunakan murni sebagai instrumen pedagogi, bukan sebagai substitusi atas kewajiban ibadah yang menuntut kehadiran ragawi.

Keempat, kebangkitan kurikulum eko-teologi (*eco-theology*) sebagai respons eksistensial terhadap krisis iklim global. Bencana ekologis yang kian masif akan memaksa institusi pendidikan untuk memprioritaskan literasi lingkungan. Pesantren dan madrasah pada tahun 2030 tidak akan lagi memperlakukan kajian kelestarian alam sebagai sisipan ekstrakurikuler, melainkan mengintegrasikannya secara organik ke dalam mata pelajaran inti. Fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) akan diajarkan dengan bobot yang setara dengan fikih ibadah. Tren madrasah hijau akan menuntut bukti nyata dalam operasional sekolah, mulai dari kemandirian energi berbasis panel surya, manajemen limbah nirkertas (*paperless*), hingga rekayasa arsitektur ruang kelas yang menekan emisi karbon. Visi *khalifah fil ard* (mandataris Tuhan di bumi) tidak lagi didekati secara normatif, melainkan diterjemahkan ke dalam metrik pelestarian ekologi yang terukur.

Membaca lintasan prediksi tersebut, sangat jelas bahwa keunggulan komparatif lembaga pendidikan Islam di masa depan tidak lagi ditentukan oleh seberapa megah gedung yang mereka bangun atau seberapa panjang sejarah yang mereka miliki. Kelangsungan hidup institusi keilmuan ini akan sangat bergantung pada agilitas manajerial dan keberanian epistemologis dalam mengorkestrasi teknologi. Titik temu antara kecanggihan perangkat keras digital dan perangkat lunak spiritual inilah yang akan membedah secara mendalam peran teknologi dalam bab selanjutnya.

E. Simpulan

Bab ini memetakan konstelasi tren global yang merombak lanskap pendidikan Islam, mulai dari dampak Revolusi Industri 4.0, praktik terbaik di negara maju, adaptasi di Asia Tenggara, hingga prediksi tren 2030.

Revolusi *Industri 4.0* memicu dua guncangan fundamental: (1) guncangan epistemologis dan otoritas keagamaan akibat demokratisasi akses informasi melalui

"syekh Google" dan otoritas algoritmik; (2) guncangan pedagogi dan arsitektur kurikulum yang menuntut personalisasi pembelajaran dan integrasi multidisipliner.

Studi kasus tiga negara maju menunjukkan model inovasi yang berbeda: Singapura menonjolkan sinkretisasi kurikulum global dan standar nasional melalui Joint Madrasah System; Finlandia menawarkan pedagogi kritis dan kebebasan otonom dengan *pendekatan* dialogis-reflektif; Jepang menghadirkan hibridisasi karakter antara akhlak Islam dan Tokkatsu.

Asia Tenggara *menampilkan* adaptasi berbasis wasathiyah: Indonesia melalui transformasi pesantren dan konversi IAIN ke UIN; Malaysia melalui pendekatan sentralistik *JAKIM*; sementara wilayah Muslim minoritas seperti Patani dan Mindanao menggunakan inovasi sebagai instrumen resolusi konflik.

Prediksi tren 2030 mencakup: (1) hiper-personalisasi berbasis algoritma; (2) dekonstruksi sistem gelar melalui micro-credentials; (3) konvergensi ruang belajar ke metaverse; dan (4) kebangkitan kurikulum eko-teologi sebagai respons krisis iklim.

F. Soal Latihan

1. Analisis Dampak Revolusi Industri 4.0

Buatlah esai kritis yang menganalisis dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap otoritas keagamaan dan pedagogi dalam pendidikan Islam! Berikan contoh konkret bagaimana lembaga pendidikan Islam dapat merespons tantangan "syekh Google" tanpa kehilangan otoritas keilmuan tradisional. (CPMK1, CPMK3)

2. Studi Komparatif Negara Maju

Bandingkan model inovasi pendidikan Islam di Singapura, Finlandia, dan Jepang menggunakan tabel analisis! Sertakan aspek: (a) kebijakan struktural, (b)

pendekatan pedagogis, (c) integrasi kurikulum, dan (d) tantangan implementasi. Tarik kesimpulan tentang praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk Indonesia. (CPMK1, CPMK3)

3. Proyek Adaptasi Lokal

Pilihlah salah satu praktik terbaik dari negara maju yang telah dipelajari! Rancang proposal adaptasi untuk konteks pendidikan Islam di Indonesia dengan memperhatikan: (a) prinsip wasathiyah, (b) kondisi sosiokultural lokal, (c) ketersediaan sumber daya, dan (d) potensi hambatan implementasi. (CPMK2, CPMK4)

4. Proyeksi Tren 2030

Buatlah makalah proyeksi tentang salah satu tren pendidikan 2030 (personalisasi, micro-credentials, metaverse, atau eko-teologi)! Analisis: (a) peluang yang ditawarkan bagi pendidikan Islam, (b) tantangan yang mungkin muncul, (c) strategi antisipasi yang perlu disiapkan, dan (d) implikasi terhadap kurikulum dan peran guru. (CPMK3, CPMK4)

5. Analisis Kebijakan Regional

Pilihlah satu negara di Asia Tenggara (selain Indonesia)! Analisis kebijakan inovasi pendidikan Islam di negara tersebut dengan fokus pada: (a) peran pemerintah dalam standardisasi, (b) adaptasi terhadap tuntutan global, (c) respon terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan (d) rekomendasi kebijakan untuk Indonesia. (CPMK1, CPMK3)



BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB III

TEKNOLOGI SEBAGAI PENGGERAK INOVASI PENDIDIKAN

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis potensi dan tantangan integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dan Machine Learning (ML) dalam personalisasi pembelajaran dan analitik data di lembaga pendidikan Islam.
2. Mengevaluasi penggunaan *Virtual Reality (VR)* dan *Augmented Reality (AR)* sebagai medium imersif dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Fikih, serta merumuskan batasan teologisnya.
3. Mengimplementasikan pemanfaatan platform digital (LMS, MOOCs, EdTech) secara kritis untuk mendesain pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif.
4. Merumuskan kerangka etika dan fikih digital untuk mengelola isu keamanan data, privasi, dan bias algoritma dalam ekosistem pendidikan Islam.

A. Integrasi AI dan *Machine Learning* dalam Pembelajaran

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI) dan *Machine Learning* (ML) merepresentasikan lompatan paling radikal dalam sejarah teknologi pendidikan sejak ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. Berbeda dengan perangkat lunak tradisional yang beroperasi berdasarkan perintah statis, sistem algoritmik ini memiliki otonomi untuk belajar dari data, mengenali pola, dan merumuskan prediksi. Di ranah pendidikan, kehadiran teknologi ini memaksa kita untuk meredefinisi ulang batasan kognitif antara manusia dan mesin (Holmes, Bialik, & Fadel, 2019).

Bagi institusi pendidikan Islam, integrasi AI menawarkan peluang luar biasa untuk memecahkan problem klasik terkait standarisasi dan personalisasi. Sistem pendidikan massal selama ini cenderung mengorbankan potensi individual siswa demi mengejar target kurikulum yang seragam. Melalui *Machine Learning*, paradigma klasikal tersebut dapat didekonstruksi. Algoritma cerdas mampu melacak rekam jejak digital peserta didik mulai dari kecepatan membaca, durasi penyelesaian tugas, hingga jenis kesalahan yang berulang lalu menyusun kurva kognitif yang sangat presisi untuk setiap individu (Zawacki-Richter et al., 2019).

Sebagai ilustrasi konkret, mari perhatikan penerapannya dalam pengajaran ilmu *nahwu* dan *sharaf* (tata bahasa Arab) atau tahfiz al-Qur'an. Sistem berbasis AI dapat menganalisis kelemahan spesifik seorang santri, misalnya kesulitan dalam mengidentifikasi pola *fi'il mu'tal* atau kesalahan makhraj pada huruf-huruf tertentu. Berdasarkan diagnosis algoritma tersebut, platform pembelajaran secara otomatis akan menyesuaikan tingkat kesulitan latihan (*adaptive learning*) dan menyodorkan materi pengayaan yang secara spesifik dirancang untuk menambal kelemahan tersebut. Proses remediasi kognitif ini berlangsung secara instan, sesuatu yang

mustahil dilakukan oleh seorang guru yang harus menangani empat puluh siswa sekaligus dalam satu sesi tatap muka.

Namun, mengundang kecerdasan buatan ke dalam ruang kelas madrasah atau perguruan tinggi keagamaan bukan berarti menyerahkan otoritas pedagogi sepenuhnya kepada mesin. Otonomi AI beroperasi secara eksklusif pada dimensi kognitif dan administratif. Peranti lunak ini sangat brilian dalam memeriksa ujian pilihan ganda, memetakan probabilitas kelulusan siswa, atau mendeteksi plagiarisme dalam karya ilmiah. Pengambilalihan beban kognitif tingkat rendah (*low-order tasks*) oleh AI justru menjadi momentum emas bagi pendidik Muslim untuk merebut kembali fungsi asasinya. Ketika waktu mereka tidak lagi tersita oleh rutinitas administratif yang melelahkan, guru dapat sepenuhnya memusatkan energi pada peran *murabbi* (pembina jiwa) dan *muaddib* (penanam adab) dimensi spiritual yang keberadaannya bersifat hampa dalam arsitektur algoritma (Al-Attas, 1979).

Tantangan terbesar dari integrasi ini justru terletak pada aspek epistemologis dan etis. AI bekerja layaknya kotak hitam (*black box*); proses pengambilan keputusannya sering kali tidak transparan. Data latih (*training data*) yang menyusun kecerdasan buatan mayoritas diproduksi oleh korporasi teknologi Barat, yang tentu saja membawa bias pandangan alam (*worldview*) sekuler. Ziauddin Sardar (1988) jauh-jauh hari telah mengingatkan bahwa tidak ada teknologi yang benar-benar netral, setiap peranti membawa muatan nilai budaya penciptanya. Apabila institusi pendidikan Islam mengadopsi AI secara mentah tanpa filter kritis, mereka berisiko mewariskan bias algoritmik kepada peserta didik.

Sebuah sistem analisis teks cerdas (*Natural Language Processing*) mungkin sangat mahir menerjemahkan literatur keislaman klasik secara harfiah, namun ia buta terhadap konteks *asbabun nuzul*, *maqashid syariah*, atau nuansa sufistik

di baliknya. Validitas pengetahuan dalam tradisi Islam mengandalkan persambungan sanad yang melibatkan pertanggungjawaban moral dari manusia ke manusia. Mesin komputasi secanggih apa pun tidak memiliki *ruhani* untuk meneruskan keberkahan ilmu.

Integrasi AI di lembaga pendidikan Islam mensyaratkan sebuah kedaulatan digital. Institusi keagamaan dan universitas Islam harus mulai berinvestasi dalam pengembangan algoritma yang dilatih menggunakan korpus data yang sejalan dengan etika akademik Islam. Keberhasilan inovasi ini tidak diukur dari seberapa banyak mesin menggantikan manusia, melainkan seberapa cerdas manusia memanfaatkan mesin untuk melampaui keterbatasan fisik, sambil tetap mempertahankan kedalaman spiritual yang menjadi ruh pendidikan itu sendiri.

B. Realitas Virtual (VR) dan Augmented Reality (AR) di Kelas

Jika Kecerdasan Buatan (AI) merevolusi dimensi kognitif dan administratif pendidikan, maka *Virtual Reality* (VR) dan *Augmented Reality* (AR) mengambil alih transformasi pada dimensi spasial dan imersif. Selama berabad-abad, transmisi pengetahuan dalam pendidikan Islam terbelenggu oleh medium dua dimensi—lembaran kertas, papan tulis, atau layar datar. Teks-teks klasik yang menyimpan kekayaan sejarah dan kompleksitas hukum Islam kerap direduksi menjadi hafalan mati karena ketidakmampuan medium tradisional untuk menghadirkan konteks spasial secara utuh. Kehadiran teknologi imersif mendobrak batasan fisik ruang kelas, memungkinkan peserta didik untuk melampaui abstraksi tekstual menuju pengalaman indrawi yang nyata (Bower et al., 2014).

Secara konseptual, VR dan AR menawarkan dua modus interaksi yang berbeda namun saling melengkapi. VR mengisolasi pengguna dari dunia fisik dan memindahkannya

secara total ke dalam lingkungan sintetik tiga dimensi. Sebaliknya, AR mempertahankan pijakan pengguna di dunia nyata seraya memproyeksikan objek digital, informasi, atau animasi ke atas lapang pandang fisik tersebut (Azuma, 1997). Dalam ekosistem madrasah dan perguruan tinggi Islam, kedua instrumen ini bukan sekadar alat peraga visual tingkat lanjut, melainkan medium epistemologis yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori tekstual dan praksis lapangan.

Aplikasi paling revolusioner dari teknologi ini terletak pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Pendekatan konvensional sering kali gagal membangkitkan resonansi emosional karena narasi sejarah disampaikan secara linier dan berjarak. Melalui VR, proses pembelajaran bertransformasi menjadi simulasi teleportasi waktu. Meminjam kerangka hermeneutika Hans-Georg Gadamer, teknologi imersif ini memfasilitasi peleburan cakrawala (*fusion of horizons*) yang jauh lebih radikal; cakrawala masa kini milik peserta didik berbenturan langsung dengan visualisasi cakrawala masa lalu secara spasial. Siswa tidak lagi sekadar membaca deskripsi tata kota Madinah pada masa kenabian, melainkan dapat berjalan mengitari replika digital Pasar Madinah, mengobservasi arsitektur awal Masjid Nabawi, atau menganalisis formasi taktis pasukan dalam Perang Badar dari sudut pandang tiga dimensi. Pengalaman spasial semacam ini mengunci memori jangka panjang (*long-term retention*) dengan efektivitas yang mustahil dicapai oleh narasi teks (Dede, 2009).

Pada domain fikih dan ibadah yang menuntut kecakapan psikomotorik, AR dan VR menyelesaikan masalah minimnya infrastruktur praktik. Simulasi manasik haji, misalnya, selama ini dilakukan dengan membangun miniatur Ka'bah dari kayu di halaman sekolah sebuah representasi yang sangat terbatas dalam menyajikan skala dan kompleksitas kerumunan. Melalui *headset* VR, peserta didik dapat dilemparkan ke dalam

simulasi *Tawaf* dan *Sa'i* dengan skala spasial 1:1, lengkap dengan simulasi kepadatan massa, panduan audio untuk doa-doa spesifik di setiap sudut Ka'bah, hingga transisi visual dari siang ke malam di Padang Arafah (Alqahtani et al., 2017). Sementara itu, teknologi AR dapat diaplikasikan untuk merespons objek nyata; siswa dapat mengarahkan kamera tablet ke halaman kitab *Fathul Qarib* pada bab anatomi hewan kurban, lalu sebuah proyeksi holografik tiga dimensi mengenai titik-titik penyembelihan syar'i (*dzabihah*) akan muncul di atas lembaran kertas tersebut.

Kendati menawarkan lompatan pedagogis yang mengagumkan, penetrasi VR dan AR dalam pendidikan Islam menuntut kehati-hatian teologis dan ontologis. Munculnya realitas sintetik ini memaksa para ahli fikih dan pendidik untuk merumuskan batasan yang tegas antara simulasi dan substansi ibadah. Simulasi manasik haji di lingkungan realitas virtual atau *metaverse* harus diposisikan secara ketat sebagai instrumen *tarbiyah* (pendidikan) dan *tadrib* (pelatihan), bukan sebagai substitusi yang menggugurkan kewajiban syar'i (Al-Qaradawi, 2001). Realitas virtual tidak memiliki pijakan material yang menjadi syarat sahnya sebuah ritus fisik; tidak ada perpindahan materi ruang dan waktu geografis yang nyata.

Selain itu, diskursus mengenai adab di ruang virtual menjadi isu krusial yang belum banyak disentuh. Bagaimana seorang Muslim harus berperilaku ketika avatar digitalnya memasuki representasi virtual Masjidil Haram? Pertanyaan-pertanyaan etis ini menuntut kurikulum pendidikan Islam untuk mulai mengintegrasikan fikih digital yang mengatur interaksi manusia dalam ekosistem imersif.

Di luar persoalan teologis, hambatan praktis terbesar bagi institusi pendidikan Islam di negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah tingginya *barrier to entry* atau hambatan masuk. Perangkat keras (Gawai VR) masih membutuhkan investasi kapital yang tidak sedikit, berisiko

memperlebar jurang ketimpangan digital (*digital divide*) antara pesantren mapan di wilayah urban dan madrasah marjinal di pelosok. Lebih jauh lagi, ketersediaan aset digital (konten 3D) yang bermuatan nilai-nilai keislaman masih sangat langka. Mayoritas perangkat lunak imersif yang beredar di pasaran didesain oleh pengembang Barat dengan bias kultural sekuler. Oleh karena itu, tantangan ke depan bukan sekadar mengumpulkan dana untuk membeli kacamata VR, melainkan membangun kedaulatan konten; melatih santri dan mahasiswa Muslim agar memiliki kecakapan *coding* dan desain 3D sehingga mereka mampu merancang ekosistem virtual mandiri yang merepresentasikan pandangan alam Islam secara otentik.

C. Platform Digital: LMS, MOOCs, dan EdTech

Transformasi pedagogi di era kiwari tidak dapat dilepaskan dari penetrasi teknologi pendidikan (*Educational Technology/EdTech*) yang telah melampaui fase embrionik sebagai sekadar alat bantu visual, menjelma menjadi ekosistem pembelajaran yang komprehensif. Dalam diskursus pendidikan Islam, kehadiran platform digital mulai dari *Learning Management System* (LMS) hingga *Massive Open Online Courses* (MOOCs) memprovokasi pergeseran fundamental mengenai di mana dan bagaimana pengetahuan agama diproduksi, didistribusikan, dan divalidasi. Pergeseran dari ruang kelas ber dinding bata menuju ruang hampa digital ini membawa implikasi sosiologis dan epistemologis yang sangat serius bagi kelangsungan transmisi keilmuan Islam (Bunt, 2018).

Pada lapis pertama institusi pendidikan formal, adopsi *Learning Management System* (LMS) seperti Moodle, Canvas, Blackboard, atau platform *in-house* yang dikembangkan oleh berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan pesantren modern, telah mengubah arsitektur tata kelola akademik secara radikal. LMS menstrukturisasi proses

pembelajaran asinkron dan sinkron, memungkinkan pelacakan presisi terhadap partisipasi siswa, dan memfasilitasi interaksi kolaboratif lintas batas geografis. Namun, evaluasi kritis terhadap implementasi LMS di lembaga pendidikan Islam kerap menemukan jebakan mekanistik. Bates (2015) mengingatkan bahwa banyak institusi yang terjebak pada ilusi inovasi; mereka memindahkan kebiasaan pedagogi tradisional yang monolog ke dalam format digital. LMS sering kali direduksi fungsinya menjadi sekadar loker penyimpanan fail (PDF) atau instrumen birokrasi pengumpulan tugas, alih-alih dimanfaatkan sebagai ruang diskursus dialektis yang merangsang daya nalar (*inquiry-based learning*) para mahasiswa dan santri.

Dinamika yang jauh lebih disruptif terjadi pada lanskap pendidikan non-formal dan terbuka melalui ledakan *Massive Open Online Courses* (MOOCs). MOOCs mendemokratisasi akses pengetahuan keislaman dengan meruntuhkan tembok eksklusivitas institusi pendidikan tinggi. Melalui platform digital, seorang santri di pelosok Nusantara dapat mengikuti perkuliahan tafsir dari profesor Universitas Al-Azhar Kairo atau belajar filsafat Islam dari akademisi Oxford, secara gratis dan dengan fleksibilitas waktu yang absolut (Yuan & Powell, 2013). Gelombang demokratisasi ini memecah monopoli pengetahuan yang selama berabad-abad dikuasai oleh segelintir elite keagamaan di pusat-pusat peradaban Islam tradisional.

Kendati demikian, desentralisasi otoritas keilmuan yang dipicu oleh MOOCs dan platform EdTech lainnya memunculkan krisis epistemologis terkait konsep *sanad* (rantai transmisi pengetahuan). Dalam tradisi keilmuan Islam ortodoks, validitas ilmu tidak hanya diukur dari penguasaan materi (*dirayah*), tetapi juga dari otentisitas jalur periwayatan yang menghubungkan murid dengan guru secara fisik dan spiritual (*riwayah*). Ketika pembelajaran agama dikemas ke

dalam modul-modul video pra-rekam yang disebarakan secara massal dan anonim, aspek *mulazamah* (kedekatan personal antara kyai dan santri) menjadi tereduksi (Hefner, 2016). Hilangnya kontak ragawi ini menimbulkan kerentanan: bagaimana institusi memastikan bahwa transfer pengetahuan digital tidak mengalami distorsi pemahaman, mengingat ketiadaan bimbingan langsung untuk meluruskan miskonsepsi yang mungkin terjadi saat siswa menafsirkan teks secara otonom?

Selain LMS dan MOOCs, kemunculan berbagai perusahaan rintisan (*startup*) EdTech yang menargetkan ceruk pasar pendidikan Islam turut mewarnai peta transformasi ini. Aplikasi pembelajaran Al-Qur'an interaktif, platform gamifikasi bahasa Arab, hingga layanan *tutoring* keislaman *on-demand* menawarkan antarmuka yang sangat personal dan memikat secara visual. Fenomena ini memicu komodifikasi pendidikan keagamaan, di mana kurikulum Islam dikemas dengan logika pasar dan prinsip kebermaknaan ekonomi (*economic viability*). Otoritas keagamaan di ruang digital kini tidak lagi dikuasai secara tunggal oleh para ulama konvensional, melainkan mulai bergeser ke tangan para pengembang perangkat lunak (*developer*) dan desainer instruksional (*instructional designers*) yang menentukan algoritma serta antarmuka pembelajaran.

Oleh karena itu, adaptasi platform digital dalam ekosistem pendidikan Islam tidak boleh dilakukan secara tuna-kritis. Institusi keagamaan dituntut untuk merumuskan kerangka fikih digitalisasi, sebuah panduan etis-filosofis yang memastikan bahwa EdTech diposisikan murni sebagai *wasilah* (sarana pencapaian tujuan), bukan *ghayah* (tujuan akhir itu sendiri). Keberhasilan integrasi LMS, MOOCs, dan aplikasi EdTech di madrasah dan perguruan tinggi Islam sangat bergantung pada kemampuan para pendidik untuk merancang desain instruksional yang mampu melampaui batasan layar

memastikan bahwa di tengah arus pertukaran informasi yang sangat mekanis dan asimetris, transformasi spiritual dan keluhuran adab tetap beresonansi di dalam ruang-ruang digital tersebut.

D. Keamanan Data dan Etika Teknologi Pendidikan

Akselerasi adopsi teknologi dalam ekosistem pendidikan sering kali dirayakan dengan eforia yang mengabaikan sisi gelap dari digitalisasi itu sendiri. Ketika madrasah, pesantren, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) berlomba-lomba mengintegrasikan *Learning Management System* (LMS), kecerdasan buatan, hingga aplikasi *EdTech* pihak ketiga, terjadi sebuah pergeseran fundamental yang jarang disadari: ruang kelas bertransformasi menjadi arena ekstraksi data. Di balik retorika tentang efisiensi dan personalisasi pembelajaran, tersembunyi persoalan krusial mengenai keamanan privasi dan etika komersialisasi informasi yang menuntut kerangka mitigasi yang ketat.

Secara struktural, infrastruktur teknologi pendidikan beroperasi melalui mekanisme pengumpulan data berskala masif (*big data*). Setiap kali peserta didik masuk ke dalam portal pembelajaran, mengunduh modul, menjawab kuis interaktif, hingga berdiskusi di forum daring, mereka meninggalkan jejak digital (*digital footprints*). Algoritma analitik pembelajaran (*learning analytics*) merekam metrik perilaku ini untuk memetakan profil kognitif dan psikologis siswa. Masalahnya, arsitektur keamanan siber pada mayoritas institusi pendidikan Islam terutama di negara-negara berkembang masih berada pada fase embrionik. Ketidaksiapan infrastruktur ini memicu kerentanan struktural terhadap peretasan, kebocoran data (*data breaches*), hingga penyalahgunaan rekam jejak akademik siswa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Regan & Jesse, 2019).

Lebih jauh, pada dimensi etis, diskursus ini bersinggungan langsung dengan fenomena yang oleh

Shoshana Zuboff (2019) konseptualisasikan sebagai kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*). Mayoritas platform *EdTech* yang menawarkan layanannya secara gratis kepada lembaga pendidikan sejatinya melakukan monetisasi melalui komodifikasi data pengguna. Data demografis, pola belajar, hingga preferensi emosional santri dan mahasiswa berpotensi diagregasi dan dijual kepada pialang data (*data brokers*) atau digunakan untuk menargetkan iklan secara spesifik. Praktik ini secara telanjang melanggar prinsip otonomi dan persetujuan berbasis informasi (*informed consent*), di mana peserta didik, yang posisinya berada dalam relasi kuasa subordinat terhadap institusi sekolah, dipaksa menyerahkan data pribadi mereka sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan akses pendidikan.

Di sinilah epistemologi hukum Islam dituntut untuk merumuskan respons teologis yang tajam. Dalam kerangka *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam), perlindungan terhadap data pribadi di era digital harus dielevasi ke dalam kategori *hifzh al-irdh* (pemeliharaan kehormatan dan martabat kemanusiaan) serta *hifzh al-mal* (pemeliharaan hak milik). Jasser Auda (2008) dalam reinterpretasinya terhadap *Maqashid* kontemporer menegaskan bahwa eksploitasi dan manipulasi informasi individu merupakan bentuk kezaliman sistemik yang mencederai keadilan sosial. Oleh sebab itu, institusi pendidikan Islam memiliki kewajiban moral (*fardhu kifayah*) untuk tidak sekadar menjadi konsumen teknologi yang naif, melainkan harus menerapkan audit keamanan digital yang ketat sebelum menandatangani kontrak dengan penyedia layanan *EdTech*.

Selain isu privasi, etika pedagogi digital juga berhadapan dengan bahaya bias algoritmik. Sistem prediktif yang tertanam dalam platform pembelajaran sering kali menggunakan data historis untuk menentukan intervensi pedagogis. Jika algoritma tersebut dilatih menggunakan

himpunan data yang mengandung prasangka kelas sosial atau gender, mesin tersebut akan memproduksi diskriminasi yang terautomasi (*automated discrimination*). Misalnya, sebuah sistem secara keliru mengklasifikasikan siswa dari latar belakang ekonomi marginal sebagai kelompok berisiko tinggi mengalami kegagalan akademik, yang pada gilirannya membuat guru memberikan ekspektasi rendah terhadap siswa tersebut (O'Neil, 2016). Determinisme mesin semacam ini bertentangan secara diametral dengan filosofi *tarbiyah* yang meyakini konsep *fitrah* bahwa setiap entitas manusia memiliki potensi tak terbatas untuk bertransformasi melalui bimbingan spiritual, alih-alih dikunci nasibnya oleh probabilitas statistik.

Menghadapi kompleksitas ini, inovasi pendidikan Islam tidak boleh hanya berkutat pada pengembangan instrumen teknis, tetapi harus melahirkan manifestasi Fikih Digital yang komprehensif. Regulasi internal institusi harus menjamin transparansi algoritma, hak siswa untuk dilupakan dari basis data (*right to be forgotten*), dan memastikan kedaulatan data agar informasi peserta didik tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial. Pada akhirnya, kemuliaan sebuah institusi pendidikan Islam di abad ke-21 tidak akan diukur dari seberapa canggih teknologi yang mereka gunakan, melainkan dari seberapa tangguh komitmen etis mereka dalam melindungi harkat dan martabat kemanusiaan peserta didiknya di tengah rimba kapitalisme digital.

E. Simpulan

Bab ini membedah anatomi teknologi pendidikan kontemporer dan merumuskan kerangka strategis penggunaannya dalam pendidikan Islam, mencakup AI dan Machine Learning, VR dan AR, platform digital, serta etika keamanan data.

Integrasi AI dan Machine Learning menawarkan peluang personalisasi pembelajaran dan analitik data yang

presisi, namun menuntut kewaspadaan terhadap bias algoritmik dan keterbatasan ontologis mesin dalam mentransfer nilai spiritual. AI harus diposisikan sebagai alat untuk membebaskan guru dari beban kognitif tingkat rendah agar dapat fokus pada peran murabbi dan muaddib.

VR dan AR merevolusi pembelajaran imersif, terutama untuk Sejarah Kebudayaan Islam dan praktik ibadah, namun memerlukan batasan teologis yang tegas antara simulasi dan substansi ibadah, serta investasi konten yang bermuatan nilai-nilai Islam.

Platform digital (LMS, MOOCs, EdTech) mendemokratisasi akses pengetahuan namun memicu krisis epistemologis terkait konsep sanad dan otoritas keilmuan. Adaptasi platform menuntut kerangka fikih digitalisasi yang memastikan teknologi sebagai wasilah (sarana), bukan ghayah (tujuan).

Keamanan data dan etika teknologi menjadi isu krusial yang menuntut perlindungan data pribadi dalam kerangka Maqashid Syariah (hifz al-'irdh, hifz al-mal), serta kewaspadaan terhadap kapitalisme pengawasan dan bias algoritmik yang dapat mendiskriminasi peserta didik.

F. Soal Latihan

1. Analisis Integrasi AI

Pilihlah satu aplikasi AI yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI (misalnya: ChatGPT untuk tafsir, platform adaptive learning untuk nahwu-sharaf, atau sistem analisis bacaan Al-Qur'an). Analisis: (a) potensi manfaat pedagogis, (b) tantangan etis dan epistemologis, (c) strategi mitigasi bias, dan (d) batasan penggunaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (CPMK1, CPMK3)

2. Desain Pembelajaran VR/AR

Rancanglah skenario pembelajaran berbasis VR atau AR untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

atau Fikih! Sertakan: (a) tujuan pembelajaran, (b) deskripsi pengalaman imersif, (c) batasan teologis yang perlu diperhatikan, (d) kebutuhan infrastruktur, dan (e) strategi evaluasi. (CPMK2, CPMK4)

3. Evaluasi Platform Digital

Pilihlah satu LMS atau platform EdTech yang digunakan di lembaga pendidikan Islam! Lakukan evaluasi kritis dengan kerangka: (a) efektivitas pedagogis, (b) kemudahan akses, (c) kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, (d) keamanan data, dan (e) rekomendasi perbaikan. (CPMK1, CPMK3)

4. Proyek Kerangka Fikih Digital

Susunlah kerangka Fikih Digital untuk sebuah lembaga pendidikan Islam (madrasah atau PTKI)! Kerangka harus mencakup: (a) prinsip-prinsip dasar Maqashid Syariah yang direlevansikan, (b) panduan penggunaan AI, (c) kebijakan perlindungan data pribadi, (d) etika komunikasi digital, dan (e) mekanisme audit etis. (CPMK2, CPMK4)

5. Analisis Kasus Keamanan Data

Carilah satu kasus kebocoran data atau pelanggaran privasi di platform pendidikan (nasional atau internasional)! Analisis kasus tersebut dari perspektif: (a) dampak terhadap peserta didik, (b) pelanggaran terhadap prinsip Maqashid Syariah, (c) kegagalan tata kelola, dan (d) rekomendasi kebijakan untuk mencegah kasus serupa di lembaga pendidikan Islam. (CPMK3, CPMK4)

BAB IV

MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Merancang pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan pemecahan masalah kontekstual.
2. Mengimplementasikan model *Flipped Classroom* dan *Blended Learning* untuk mengoptimalkan interaksi tatap muka (*talaqqi*) dan kemandirian belajar (*self-regulated learning*).
3. Menganalisis efektivitas gamifikasi dalam meningkatkan motivasi belajar serta mengidentifikasi risiko overjustification effect dan trivialisasi nilai.
4. Merancang jalur pembelajaran terpersonalisasi (*Personalized Learning Path*) yang berbasis pada konsep fitrah dan teori kognitif modern, dengan tetap menjaga dimensi sosiologis pembelajaran komunal.

A. Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*)

Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*/PjBL) merupakan antitesis secara diametral terhadap model pengajaran instruksional-transmisif yang selama berdekade-dekade mendominasi institusi pendidikan agama. Secara konseptual, PjBL didefinisikan sebagai arsitektur pembelajaran komprehensif yang melibatkan peserta didik dalam investigasi kolaboratif untuk memecahkan masalah dunia nyata yang kompleks, otentik, dan tidak memiliki jawaban tunggal (Thomas, 2000). Alih-alih menerima materi dalam bentuk paket informasi yang sudah difinalisasi oleh guru layaknya konsep gaya bank (*banking concept of education*) yang dikritik tajam oleh Paulo Freire (1970) PjBL memaksa siswa untuk secara aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui serangkaian tahapan riset, desain, eksekusi, dan evaluasi produk.

Dalam lokus pendidikan Islam, integrasi PjBL menjanjikan penyelesaian atas salah satu krisis epistemologis paling akut: alienasi antara ilmu agama dan realitas sosial. Selama ini, mata pelajaran agama kerap diajarkan di ruang hampa sosiologis. Fikih, sejarah, dan akidah direduksi menjadi dogma-dogma teoretis yang berhenti pada taraf kognisi tingkat rendah (*Low Order Thinking Skills/LOTS*), seperti mengingat dan merangkum. Akibatnya, lulusan lembaga pendidikan Islam sering kali mengalami kegagalan ketika harus menerjemahkan teks-teks klasik untuk menjawab problem sosiokultural di masyarakat.

Melalui PjBL, dikotomi antara *'ilm* (pengetahuan murni) dan *'amal* (tindakan praksis) dirobuhkan. Kurikulum dirancang ulang agar setiap konsep teologis menemukan manifestasi empirisnya. Sebagai contoh empiris, pengajaran *Fikih Muamalah* (hukum ekonomi Islam) di perguruan tinggi atau madrasah aliyah tidak lagi disajikan semata-mata dengan

mendaras kitab mengenai syarat sah *mudharabah* (bagi hasil). Dosen atau fasilitator dapat merancang proyek otentik di mana mahasiswa diterjunkan ke pasar tradisional untuk menganalisis praktik rentenir, lalu ditantang untuk merancang sebuah model koperasi syariah mikro yang *feasible* untuk pedagang kaki lima setempat. Mahasiswa harus melakukan riset lapangan, menyusun skema akad, mempresentasikan rancangan tersebut di depan praktisi perbankan, hingga menerbitkan purwarupa instrumen keuangannya (Bell, 2010).

Integrasi PjBL juga merombak pendekatan dalam mata pelajaran *Sejarah Kebudayaan Islam* (SKI). Alih-alih menghafal tahun peperangan, siswa dapat diberikan proyek untuk menyelenggarakan pameran virtual atau membangun diorama interaktif yang memetakan strategi diplomasi Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah, lalu mengontekstualisasikannya dengan manajemen resolusi konflik pada masyarakat multikultural modern. Proses ini menuntut kecakapan interdisipliner; siswa tidak hanya belajar sejarah, tetapi juga mengasah keterampilan retorika, desain visual, kepemimpinan, dan negosiasi.

Secara filosofis, model PjBL sangat kompatibel dengan paradigma *khalifah fil ard* (mandataris Allah di bumi) yang menjadi visi puncak pendidikan Islam. Seorang khalifah tidak dibentuk untuk menjadi pengamat pasif, melainkan agen perubahan (*agent of change*) yang dituntut merekayasa solusi atas kerusakan struktural di lingkungannya (Al-Attas, 1979). PjBL menerjemahkan konsep teologis mengenai *amal shaleh* menjadi serangkaian metodologi pedagogis yang terukur, di mana kesalehan tidak lagi diukur secara eksklusif melalui intensitas ritual privat, melainkan melalui seberapa besar dampak produk proyek yang dihasilkan siswa bagi kesejahteraan masyarakat sekitar (*rahmatan lil 'alamin*).

Kendati secara konseptual sangat memikat, adopsi PjBL di institusi pendidikan Islam berhadapan dengan turbulensi

institusional yang signifikan. Hambatan pertama bersifat kultural; pergeseran peran guru dari seorang *sage on the stage* (pemegang otoritas absolut di depan kelas) menjadi *guide on the side* (fasilitator dan mentor) kerap memicu resistensi. Banyak pendidik konservatif yang merasa kehilangan wibawa ketika mereka tidak lagi mendominasi panggung wacana.

Hambatan kedua berkaitan dengan rubrik evaluasi. PjBL tidak dapat dinilai menggunakan tes pilihan ganda yang positivistik. Penilaian dalam PjBL menuntut asesmen otentik (*authentic assessment*) yang mengukur proses kolaborasi, ketahanan dalam memecahkan masalah, hingga orisinalitas produk akhir (Markham, 2011). Hal ini membutuhkan investasi waktu dan energi yang berlipat ganda dari para pendidik untuk menyusun rubrik portofolio dan melakukan observasi mendalam, yang sering kali berbenturan dengan rigiditas administrasi kurikulum nasional yang masih sangat berorientasi pada nilai ujian berstandar.

Oleh sebab itu, implementasi PjBL tidak bisa dilakukan sekadar sebagai tambal sulam metodologis. Ia membutuhkan restrukturisasi ekosistem akademik secara menyeluruh, mulai dari pelatihan kapabilitas guru, fleksibilitas alokasi waktu belajar, hingga keberanian institusi untuk menjalin kemitraan strategis dengan elemen masyarakat luar, agar proyek yang dikerjakan peserta didik memiliki jangkauan persoalan yang nyata dan tidak terjebak pada simulasi artifisial belaka.

B. Flipped Classroom dan Blended Learning

Arsitektur ruang dan waktu dalam pendidikan tradisional selalu dibangun di atas premis sinkronisasi absolut; bahwa transfer pengetahuan hanya dapat terjadi ketika pendidik dan peserta didik berada di koordinat fisik dan temporal yang sama. Kemunculan *Blended Learning* (Pembelajaran Bauran) dan varian operasionalnya, *Flipped Classroom* (Kelas Terbalik), mendekonstruksi kekakuan spasiotemporal tersebut. Kedua model ini tidak lahir sekadar

sebagai respons teknis terhadap digitalisasi, melainkan sebagai upaya metodologis untuk merestorasi kualitas interaksi pedagogis yang kerap tereduksi dalam kelas-kelas massal. Bagi institusi pendidikan Islam, adopsi model ini menawarkan sebuah ekuilibrium yang sangat esensial: memeluk efisiensi ekosistem digital tanpa harus mengorbankan tradisi *talaqqi* (perjumpaan fisik) yang menjadi fondasi transmisi spiritual.

Secara konseptual, *Blended Learning* adalah orkestrasi yang disengaja dan sistematis antara pembelajaran tatap muka (*face-to-face*) dengan pembelajaran daring secara asinkron maupun sinkron (Garrison & Kanuka, 2004). Dalam diskursus pendidikan Islam, model ini merupakan *via media* (jalan tengah) yang memecahkan dilema hilangnya sanad keilmuan akibat digitalisasi penuh. Melalui model bauran, institusi seperti pesantren atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dapat mendelegasikan dimensi transmisi kognitif seperti penguasaan fakta sejarah, tata bahasa (*nahwu-sharaf*), atau definisi-definisi fikih dasar ke dalam modul digital berbasis *Learning Management System* (LMS). Mahasiswa atau santri dapat mengakses materi tersebut secara mandiri. Sementara itu, ruang fisik dipertahankan secara eksklusif untuk aktivitas yang menuntut kehadiran ragawi dan transfer nilai, seperti bimbingan akhlak, perbaikan artikulasi bacaan Al-Qur'an (*tahsin*), dan internalisasi adab yang mustahil dikompresi menjadi kode biner.

Turunan paling revolusioner dari *Blended Learning* adalah model *Flipped Classroom*. Model ini membalik urutan tradisional dari taksonomi pembelajaran (Bergmann & Sams, 2012). Pada model konvensional, waktu berharga di dalam kelas dihabiskan oleh guru untuk berceramah mentransfer informasi (*Low Order Thinking Skills/LOTS*), sementara tugas kognitif tingkat tinggi seperti analisis dan sintesis justru dibebankan sebagai pekerjaan rumah di mana siswa kehilangan akses bantuan dari sang ahli. *Flipped Classroom*

menginversi struktur tersebut; asimilasi informasi dasar dilakukan siswa di rumah melalui pendarasan video kuliah, *podcast*, atau pembacaan teks klasik (*turats*), sedangkan waktu di kelas sepenuhnya didedikasikan untuk diskursus kritis, pemecahan masalah, dan debat akademik.

Aplikasi *Flipped Classroom* dalam studi keislaman menciptakan ruang dialektis yang sangat kaya. Sebagai ilustrasi, dalam mata kuliah *Ushul Fiqh* atau *Tafsir Ahkam*, dosen tidak lagi perlu menghabiskan durasi sembilan puluh menit untuk mendiktekan sejarah turunnya ayat (*asbabun nuzul*) atau biografi para mufasir. Mahasiswa diwajibkan untuk menelaah materi prerekam tersebut sebelum kelas dimulai. Mereka datang ke ruang kelas tidak lagi dengan kepala kosong, melainkan telah membawa pra-pemahaman (*pre-understanding*) teoretis. Ketika tatap muka berlangsung, kelas langsung bertransformasi menjadi *majlis mubahatsah* (forum diskusi akademik). Dosen bertindak sebagai fasilitator yang memandu mahasiswa untuk menguji pra-pemahaman mereka, menabrakkannya dengan interpretasi teks dari mazhab yang berbeda, hingga terjadi sebuah peleburan cakrawala (*fusion of horizons*) yang melahirkan pemahaman baru yang lebih tajam dan kontekstual.

Pendekatan ini secara struktural menghidupkan kembali tradisi *Bahtsul Masail* atau *Munadharah* (debat ilmiah) yang sebenarnya sangat mengakar dalam epistemologi pendidikan Islam klasik (Makdisi, 1981). Siswa dituntut untuk aktif mempresentasikan argumen, mempertahankan konklusi hukum dari studi kasus spesifik, dan mengartikulasikan kritik. Melalui mekanika *Flipped Classroom*, kelas agama tidak lagi identik dengan indoktrinasi satu arah yang mematikan daya nalar, melainkan menjadi inkubator bagi lahirnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*).

Meskipun menawarkan rekonstruksi pedagogis yang menjanjikan, implementasi *Flipped Classroom* dan *Blended Learning* memikul prasyarat yang sangat ketat, salah satunya adalah tingkat Pembelajaran Berpola Mandiri (*Self-Regulated Learning/SRL*) yang tinggi dari peserta didik (Abeysekera & Dawson, 2015). Desain kelas terbalik akan runtuh seketika apabila mahasiswa gagal atau enggan mempelajari modul pra-kelas. Ketidaksiapan membaca materi asinkron akan menghasilkan disfungsi komunikasi saat tatap muka, karena pijakan diskursus yang diasumsikan telah terbangun ternyata belum terbentuk.

Tantangan lainnya berakar pada kompetensi desain instruksional para pendidik. Mengelola kelas *Blended Learning* tidak sama dengan sekadar merekam ceramah lalu mengunggahnya ke YouTube. Ia membutuhkan kemampuan menyusun kurikulum hibrida yang saling mengunci antara aktivitas daring dan luring. Pendidik Muslim dituntut untuk mendesain instrumen pemantik (*trigger*) di akhir modul digital berupa pertanyaan dilematis atau anomali teologis yang memprovokasi rasa ingin tahu siswa, sehingga mereka memiliki urgensi untuk mendiskusikannya saat pertemuan fisik. Pada akhirnya, keberhasilan adaptasi kedua model ini sangat bergantung pada kesediaan institusi pendidikan Islam untuk membongkar kultur kemalasan akademik dan membangun ulang etos literasi mandiri sebagai fondasi utama penuntutan ilmu.

C. Gamifikasi untuk Meningkatkan Motivasi Belajar

Diskursus mengenai motivasi belajar dalam institusi pendidikan Islam sering kali terjebak pada pendekatan normatif-dogmatis, di mana peserta didik semata-mata didorong melalui janji pahala eskatologis atau ancaman hukuman teologis. Kendati pendekatan ini memiliki akar teologis yang kuat, ia kerap kali gagal mengartikulasikan resonansi psikologis pada peserta didik generasi digital yang

terbiasa dengan siklus umpan balik instan (*instant feedback loop*). Untuk menjembatani kesenjangan motivasional ini, adopsi gamifikasi (*gamification*) muncul sebagai salah satu rekayasa pedagogis yang paling progresif. Secara definitif, gamifikasi bukanlah upaya mengubah ruang kelas menjadi arena bermain gim secara harfiah, melainkan ekstraksi dan penerapan elemen-elemen desain permainan ke dalam konteks non-permainan untuk menstimulasi keterlibatan dan memodifikasi perilaku manusia (Deterding et al., 2011).

Anatomi gamifikasi beroperasi di atas kerangka psikologi kognitif, secara khusus bersandar pada *Self-Determination Theory* (SDT) yang dirumuskan oleh Ryan dan Deci (2000). Teori ini mempostulatkan bahwa motivasi manusia akan tumbuh subur apabila tiga kebutuhan psikologis dasarnya terpenuhi: kompetensi (*competence*), otonomi (*autonomy*), dan keterhubungan sosial (*relatedness*). Dalam lanskap pendidikan agama yang konvensional, ketiga elemen ini sering kali tereduksi oleh kurikulum yang kaku dan evaluasi yang berpusat pada kepatuhan absolut. Melalui injeksi mekanika permainan seperti sistem poin, lencana (*badges*), papan peringkat (*leaderboards*), narasi (*storytelling*), dan pencapaian level guru dapat mengorkestrasi ekosistem pembelajaran yang secara presisi menstimulasi ketiga kebutuhan psikologis tersebut.

Sebagai praksis operasional, mari kita telaah integrasi gamifikasi dalam pembelajaran *Nahwu-Sharaf* (sintaksis dan morfologi bahasa Arab) sebuah disiplin ilmu yang secara historis dianggap sebagai momok paling menakutkan bagi para santri pemula karena kompleksitas kaidahnya. Alih-alih menyajikan tabel tasrif yang kering dan harus dihafal secara mekanis, pendidik dapat merancang narasi perjalanan pahlawan (*hero's journey*). Siswa memulai pembelajaran sebagai *Mubtadi* (pemula/level 1) yang harus menyelesaikan berbagai misi (menganalisis struktur kalimat) untuk membuka

wilayah baru dalam peta pengetahuan, demi mencapai gelar *Mujtahid* (ahli/level tertinggi). Setiap keberhasilan memecahkan anomali tata bahasa akan diganjar dengan poin pengalaman (*experience points/XP*) yang memvalidasi kompetensi mereka secara instan (Kapp, 2012). Sistem *leaderboard* yang didesain secara etis di mana siswa bersaing dengan pencapaian historis mereka sendiri (kompetisi ipsatif) alih-alih saling menjatuhkan akan memupuk keterhubungan sosial dan resiliensi akademik.

Namun, di balik efikasi kognitifnya yang mengesankan, implementasi gamifikasi di lembaga pendidikan Islam memicu ketegangan filosofis yang sangat serius terkait konsep *niat* dan keikhlasan. Dalam epistemologi pendidikan Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali (2001) dalam *Ihya 'Ulum al-Din*, penuntutan ilmu (*thalab al-'ilm*) adalah ibadah mahdah yang menuntut kemurnian intensi semata-mata karena Allah (motivasi intrinsik absolut). Gamifikasi, pada lapis dasarnya, sangat mengandalkan sistem penghargaan (*rewards*) yang bersifat ekstrinsik. Bahaya laten dari model ini adalah terjadinya pergeseran orientasi teologis; ketika seorang santri menghafal surah Al-Qur'an bukan lagi didorong oleh transendensi spiritual, melainkan demi mengejar lencana digital atau menduduki peringkat teratas di aplikasi pembelajaran.

Fenomena ini dalam psikologi behaviorisme dikenal sebagai *Overjustification Effect* sebuah kondisi di mana pemberian penghargaan ekstrinsik yang berlebihan justru secara perlahan membunuh motivasi intrinsik alami seseorang terhadap suatu aktivitas (Deci, Koestner, & Ryan, 1999). Jika tidak dikalibrasi dengan sangat hati-hati, gamifikasi dapat mendegradasi kesakralan ilmu agama menjadi sekadar komoditas transaksional. Selain itu, terdapat risiko trivialisasi (*trivialization*), di mana narasi sejarah para nabi atau kompleksitas hukum Islam direduksi menjadi sekadar

mekanika permainan dangkal yang mencerabut kedalaman adab dan rasa hormat peserta didik terhadap subjek yang dipelajarinya.

Oleh sebab itu, desain gamifikasi dalam pendidikan Islam tidak boleh berhenti pada tahapan PBL (*Points, Badges, Leaderboards*), melainkan harus berevolusi menuju *Meaningful Gamification* (gamifikasi bermakna). Desain instruksional harus dirancang sebagai sebuah *scaffolding* (perancah) pedagogis yang bersifat temporal. Pada tahap awal pembelajaran, iming-iming ekstrinsik (poin dan lencana) diizinkan sebagai katalisator untuk memecah keengganan awal siswa. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya pemahaman siswa terhadap substansi materi, sistem penghargaan ekstrinsik tersebut harus secara perlahan ditarik (*faded out*), digantikan oleh kepuasan intrinsik yang lahir dari penemuan intelektual dan kenikmatan spiritual dalam memahami ayat-ayat Tuhan (Chou, 2015).

Hanya dengan orkestrasi yang ketat terhadap keseimbangan antara mekanika psikologis dan batasan teologis inilah, gamifikasi dapat berfungsi secara paripurna: meretas kebosanan ruang kelas, membangkitkan gairah kognitif, tanpa harus mengorbankan fondasi keikhlasan yang menjadi jantung dari pendidikan Islam itu sendiri.

D. *Personalized Learning Path* (Jalur Pembelajaran Terpersonalisasi)

Sistem pendidikan massal yang diwariskan oleh revolusi industri abad ke-19 dibangun di atas rasionalitas perakitan pabrik (*factory model of education*). Paradigma ini beroperasi melalui asumsi yang sangat mekanistik: bahwa sekelompok peserta didik dengan usia kronologis yang sama memiliki kapasitas kognitif, kecepatan serap, dan preferensi belajar yang sepenuhnya identik. Akibatnya, kurikulum dirancang sebagai sebuah lintasan tunggal (*one-size-fits-all*) di mana siswa yang lambat akan tertinggal dan terstigma, sementara

siswa yang cepat akan mengalami kebosanan intelektual. Sebagai antitesis terhadap standardisasi massal tersebut, *Personalized Learning Path* (Jalur Pembelajaran Terpersonalisasi) hadir untuk mendekonstruksi kekakuan struktural ini dengan mengembalikan lokus pembelajaran pada keunikan absolut setiap individu (Reigeluth, 2014).

Secara teologis dan historis, konsep personalisasi ini sejatinya bukanlah entitas asing dalam epistemologi pendidikan Islam. Jauh sebelum diskursus pedagogi modern merumuskan teori diferensiasi, pandangan alam Islam telah menegaskan konsep *fitrah* bahwa setiap manusia diciptakan dengan cetak biru potensi yang spesifik dan tidak dapat diseragamkan. Ibnu Khaldun (2001) dalam mahakaryanya, *Muqaddimah*, secara eksplisit memperingatkan para pendidik tentang bahaya menjejalkan pengetahuan yang melampaui ambang batas reseptif atau kapasitas kognitif individual seorang murid (*mura'at mustawa al-muta'allimin*). Pada masa kejayaan intelektual Islam, tradisi *talaqqi* dan *mulazamah* (sistem pendarasan intensif antara guru dan murid) merupakan bentuk purwarupa paling otentik dari pembelajaran terpersonalisasi. Seorang syekh akan mengevaluasi kedalaman nalar masing-masing muridnya, lalu meresepkan literatur dan metode pengajaran yang berbeda untuk Ibnu Sina, misalnya, dibandingkan dengan murid lainnya.

Dalam praksis pendidikan kontemporer, *Personalized Learning Path* diterjemahkan sebagai desain pedagogis di mana tujuan pembelajaran, pendekatan instruksional, dan irama (*pacing*) studi dikalibrasi secara dinamis untuk merespons kebutuhan, profil belajar, dan minat spesifik peserta didik (Pane et al., 2015). Di ranah lembaga pendidikan Islam, model ini merevolusi transisi dari pembelajaran berbasis waktu (*time-based progression*) menuju pembelajaran berbasis penguasaan (*mastery-based progression*).

Sebagai ilustrasi empiris, dalam program *Tahfiz* (penghafalan) Al-Qur'an, pendekatan personalisasi sebenarnya telah terjadi secara organik; santri yang memiliki memori fotografis mungkin mampu menyetorkan satu halaman per hari, sementara santri dengan retensi auditori lambat menyetorkan tiga baris per hari. Keduanya tetap diakomodasi tanpa saling menghakimi. Tantangan terbesarnya adalah mengekstrapolasi model personalisasi ini ke dalam mata pelajaran akademik kognitif seperti *Ushul Fiqh*, *Ilmu Hadis*, atau Sains Terpadu di madrasah. Melalui bantuan teknologi analitik pembelajaran (sebagaimana dibahas pada Bab 3), kurikulum dapat dipecah menjadi unit-unit kompetensi mikro atau daftar putar (*playlists*) pembelajaran. Seorang siswa yang kesulitan memahami konsep pewarisan (*faraid*) secara matematis dapat diarahkan pada lintasan pembelajaran visual atau simulasi studi kasus keluarga, sementara siswa lain yang kuat dalam logika deduktif langsung diarahkan pada analisis teks komparatif lintas mazhab. Keduanya mencapai tujuan akhir pemahaman kompetensi dasar yang sama, namun melalui jalur kognitif yang sepenuhnya berbeda.

Kendati menawarkan emansipasi intelektual yang luar biasa, adopsi *Personalized Learning Path* secara radikal mengundang gugatan filosofis terkait dimensi sosiologis pendidikan Islam. Pendidikan agama tidak semata-mata bertujuan melahirkan individu-individu brilian yang terisolasi dalam kepompong kognitifnya sendiri. Terdapat nilai intrinsik dalam pembelajaran komunal (*jama'ah*). Konsep *berkah* dalam epistemologi penuntutan ilmu sering kali termanifestasi melalui kesabaran seorang siswa cerdas yang harus menunggu dan membantu temannya yang lambat di dalam sebuah *halaqah* (lingkaran diskusi).

Apabila personalisasi pembelajaran ditarik menuju ekstremitas hiper-individualisme di mana setiap siswa hanya berinteraksi dengan kurva belajarnya sendiri melalui layar

algoritma institusi pendidikan berisiko mencerabut kemampuan empati, negosiasi sosial, dan semangat kebersamaan (*ukhuwah*) yang justru menjadi kohesi utama umat (Hefner, 2016). Siswa kehilangan ruang untuk terpapar pada keragaman pandangan yang muncul dari interaksi organik antarteman sebaya.

Oleh sebab itu, implementasi *Personalized Learning Path* di lembaga pendidikan Islam harus didesain sebagai sebuah sistem personalisasi yang terikat (*tethered personalization*). Institusi harus dengan cermat menetapkan batas demarkasi: bagian mana dari kurikulum yang harus ditempuh secara mandiri untuk akselerasi penguasaan materi, dan ruang mana yang mutlak membutuhkan dialektika komunal di ruang kelas. Transformasi peran pendidik juga menjadi prasyarat mutlak; guru tidak lagi beroperasi sebagai orator penyebar informasi, melainkan bermetamorfosis menjadi arsitek pembelajaran (*learning architect*) dan diagnostikus kognitif yang merancang, memantau, dan mengintervensi lintasan personal setiap peserta didiknya secara presisi.

E. Simpulan

Bab ini membahas berbagai model pembelajaran inovatif yang menggeser lokus otoritas dari teacher-centered menuju *student-centered*, serta mendobrak kebakuan tradisi hafalan mekanis dalam pendidikan Islam.

Project-Based Learning (PjBL) merupakan antitesis terhadap banking concept of education, menuntut siswa mengkonstruksi pengetahuan melalui investigasi masalah nyata. Integrasi PjBL dalam *Fikih Muamalah* atau SKI menjembatani kesenjangan antara ilmu agama dan realitas sosial, serta kompatibel dengan paradigma khalifah fil ard.

Flipped Classroom dan *Blended Learning* mendekonstruksi kekakuan spasiotemporal dengan menginversi struktur pembelajaran: asimilasi informasi di

rumah melalui modul digital, sementara waktu kelas didedikasikan untuk diskursus kritis dan pemecahan masalah. Model ini menghidupkan kembali tradisi bahtsul masail dan munadharah dalam pendidikan Islam.

Gamifikasi menawarkan rekayasa motivasional melalui elemen desain permainan, namun memerlukan kalibrasi ketat untuk menghindari overjustification effect dan trivialisasi nilai. Desain harus berevolusi dari PBL (*Points, Badges, Leaderboards*) menuju meaningful gamification yang berorientasi pada penguatan motivasi intrinsik.

Personalized Learning Path merekonstruksi standardisasi massal dengan mengembalikan lokus pembelajaran pada keunikan individu berdasarkan konsep fitrah. Namun, personalisasi harus terikat (*tethered personalization*) dengan dimensi sosiologis pembelajaran komunal agar tidak menceraib nilai ukhuwah dan empati sosial.

F. Soal Latihan

1. Desain *Project-Based Learning*

Rancanglah sebuah proyek PjBL untuk mata pelajaran Fikih Muamalah atau Sejarah Kebudayaan Islam! Sertakan: (a) masalah dunia nyata yang diangkat, (b) tahapan proyek, (c) integrasi nilai-nilai Islam, (d) peran guru sebagai fasilitator, (e) produk akhir yang dihasilkan, dan (f) rubrik penilaian autentik. (CPMK2, CPMK4)

2. Implementasi *Flipped Classroom*

Buatlah rencana pembelajaran Flipped Classroom untuk satu topik dalam mata pelajaran Ushul Fiqh atau Tafsir Ahkam! Sertakan: (a) materi asinkron (video/modul) untuk dipelajari di rumah, (b) aktivitas sinkron di kelas (diskusi, debat, pemecahan kasus), (c) strategi

memastikan kesiapan siswa, dan (d) mekanisme evaluasi pemahaman. (CPMK2, CPMK4)

3. Tugas 3: Analisis Gamifikasi

Pilihlah satu aplikasi gamifikasi yang digunakan dalam pembelajaran agama! Analisis: (a) elemen desain permainan yang digunakan, (b) efektivitas dalam meningkatkan motivasi, (c) risiko overjustification effect dan trivialisasi nilai, serta (d) rekomendasi untuk mengubahnya menjadi meaningful gamification. (CPMK1, CPMK3)

4. Proyek *Personalized Learning Path*

Rancanglah jalur pembelajaran terpersonalisasi untuk program Tahfiz Al-Qur'an atau pembelajaran Nahwu-Sharaf! Sertakan: (a) asesmen awal untuk memetakan kemampuan, (b) jalur berbeda berdasarkan gaya belajar dan kecepatan, (c) strategi menjaga dimensi komunal (jama'ah), (d) peran guru sebagai diagnostikus kognitif, dan (e) sistem monitoring perkembangan. (CPMK2, CPMK4)

5. Studi Komparatif Model Pembelajaran

Bandingkan empat model pembelajaran inovatif (PjBL, Flipped Classroom, Gamifikasi, Personalized Learning) dalam tabel analisis! Sertakan: (a) definisi, (b) keunggulan untuk pendidikan Islam, (c) tantangan implementasi, (d) kesesuaian dengan tradisi keilmuan Islam, dan (e) rekomendasi konteks penggunaannya. (CPMK1, CPMK3)



BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB V

KURIKULUM ADAPTIF DAN INKLUSIF

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Merumuskan desain kurikulum berbasis kompetensi abad 21 (4C) yang direkonstruksi melalui lensa *Maqashid Syariah* dan nilai-nilai *wasathiyah*.
2. Menganalisis prinsip dan strategi implementasi pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus dengan mengintegrasikan teknologi asistif dan Program Pembelajaran Individual (PPI).
3. Mengintegrasikan pendidikan karakter (*tarbiyah*) dan literasi digital melalui kerangka Fikih Digital untuk membangun kesadaran etis di ruang siber.
4. Mengelola harmonisasi antara kurikulum nasional dan global melalui pendekatan glokalisasi, pemetaan silang (*cross-mapping*), dan hermeneutika peleburan cakrawala (integrasi STEM dan *Maqashid*).
5. Mengembangkan profil kurikulum *Ulul Albab* yang memiliki agilitas struktural antara dimensi *qath'i* (permanen) dan *mutaghayyirat* (dinamis).

A. Desain Kurikulum Berbasis Kompetensi Abad 21

Diskursus dominan mengenai kurikulum pendidikan kontemporer hampir secara eksklusif dikendalikan oleh narasi kebutuhan pasar kerja global. Lembaga-lembaga transnasional merumuskan kompetensi abad ke-21 yang populer dengan akronim 4C: *Critical Thinking*, *Creativity*, *Collaboration*, dan *Communication* sebagai prasyarat mutlak kelangsungan hidup di era Revolusi Industri 4.0 (Trilling & Fadel, 2009). Namun, ketika diadopsi secara mentah oleh institusi pendidikan Islam, kerangka ini membawa bias epistemologis Barat yang reduksionistik. Paradigma tersebut cenderung memandang peserta didik semata-mata sebagai *homo economicus* (manusia ekonomi) yang disiapkan untuk menjadi instrumen kapitalisme global, seraya mengesampingkan signifikansi spiritualitas dan transmisi adab.

Pendidikan Islam merespons hegemoni kompetensi ini bukan melalui penolakan secara total, melainkan melalui perombakan filosofis dan Islamisasi konsep (Al-Attas, 1979). Desain kurikulum berbasis kompetensi abad ke-21 di madrasah dan perguruan tinggi Islam menuntut sebuah proses hermeneutis berupa peleburan cakrawala (*fusion of horizons*) antara teks historis (*turats*) dan tantangan kekinian. Kurikulum tidak lagi dirancang untuk sekadar mereproduksi hafalan teks secara mekanis, melainkan memfungsikan teks tersebut sebagai pra-pemahaman (*pre-understanding*) untuk mendekonstruksi dan memecahkan problematika empiris.

Dalam arsitektur kurikulum yang adaptif ini, konsepsi Barat mengenai 4C direkonstruksi secara fundamental melalui lensa *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat) dan nilai-nilai *wasathiyah* (jalan tengah):

Pertama, Berpikir Kritis (*Critical Thinking*) Kompetensi ini tidak lagi dibiarkan beroperasi sebagai skeptisisme radikal yang bertujuan mendekonstruksi sakralitas teks agama, melainkan dielevasi menjadi tradisi *tafakkur* (refleksi

mendalam) dan *tabayyun* (verifikasi yang ketat). Dalam kurikulum Fikih Digital, misalnya, kompetensi berpikir kritis diukur dari kemampuan peserta didik menavigasi lautan informasi siber, membedakan antara fatwa otoritatif yang digawangi oleh ulama bersanad jelas dengan opini keagamaan instan yang diproduksi oleh kecerdasan buatan atau tokoh media sosial nirkapasitas.

Kedua, Komunikasi (*Communication*) Kecakapan ini dilepaskan dari sekadar retorika manipulatif untuk memenangkan persaingan narasi di ruang publik. Kurikulum pendidikan Islam meletakkan etika komunikasi di bawah payung *qawlan sadida* (perkataan yang benar, presisi, dan berdasar) (Q.S. Al-Ahzab: 70). Kurikulum dirancang untuk melatih peserta didik agar mampu mengartikulasikan kompleksitas teologi dan hukum Islam menggunakan bahasa universal yang rasional. Tujuannya adalah melahirkan agen peradaban yang mampu berdialog dalam forum antariman serta memproyeksikan wajah Islam yang argumentatif dan analitis, bukan reaktif, di tengah polarisasi media sosial.

Ketiga, Kolaborasi (*Collaboration*) Kompetensi ini direposisi dari sekadar sinergi pragmatis untuk memaksimalkan akumulasi kapital, menjadi praksis *ta'awun* (tolong-menolong) demi kemaslahatan umat. Di tengah masyarakat yang semakin terfragmentasi oleh algoritma *filter bubble*, kurikulum mendesain proyek-proyek interdisipliner yang menuntut kolaborasi lintas identitas. Mahasiswa atau santri dari latar belakang ormas atau mazhab yang berbeda dikondisikan untuk bekerja sama memecahkan masalah riil seperti merancang instrumen zakat berbasis *blockchain* untuk pengentasan kemiskinan lokal sehingga merajut kohesi sosial (*ukhuwah*) yang melampaui sentimen sektarian (Hefner, 2016).

Keempat, Kreativitas (*Creativity*) Kreativitas disinergikan dengan semangat *ijtihad* (inovasi intelektual yang metodologis). Sepanjang sejarah intelektual Islam, pintu *ijtihad* senantiasa terbuka untuk menjawab problem-problem *nawazil* (perkara kontemporer yang belum ada presedennya). Kurikulum abad ke-21 menstimulasi daya cipta peserta didik untuk merumuskan hukum atau etika terapan yang merespons isu-isu mutakhir, mulai dari bioetika (rekayasa genetika) hingga disrupsi kecerdasan buatan, tanpa menabrak batas-batas aksiologis *qath'i* (absolut) di dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Sardar, 2011).

Transisi menuju kurikulum adaptif ini secara inheren meniscayakan penyesuaian pada anatomi evaluasi. Tes terstandarisasi yang mengeksploitasi kognisi tingkat rendah (*Low Order Thinking Skills*) diimbangi dan secara bertahap diganti dengan asesmen portofolio otentik. Pada titik ini, validitas sebuah kurikulum pendidikan Islam tidak lagi diukur secara kuantitatif dari seberapa tebal literatur klasik yang diselesaikan di ruang kelas, melainkan dari seberapa tajam dan etis analisis peserta didik saat kerangka konseptual Islam dihadapkan pada kompleksitas krisis peradaban modern.

B. Pendidikan Inklusif untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Arsitektur kurikulum yang mengklaim diri sebagai representasi ajaran Islam akan mengalami inkonsistensi epistemologis yang mendasar apabila instrumen tersebut hanya didesain untuk melayani individu dengan kognisi dan fisik yang normatif (*able-bodied*). Secara historis, sejumlah institusi pendidikan keagamaan kerap mereproduksi struktur eksklusif dengan memisahkan penyandang disabilitas ke dalam lokus pendidikan segregatif (seperti Sekolah Luar Biasa), atau membatasi akses mereka dengan alasan ketidaksiapan infrastruktur. Praktik segregasi ini secara prinsipil tidak sejalan dengan fondasi teologis Islam mengenai *karamah al-*

insan (kemuliaan martabat manusia) yang melekat utuh pada setiap individu, terlepas dari variasi fisik maupun neurologisnya (Al-Qaradawi, 2000).

Dalam paradigma pendidikan Islam, disabilitas tidak dipandang melalui kacamata *medical model* Barat yang mereduksi kondisi tersebut semata-mata sebagai defisit biologis yang harus disembuhkan atau dinormalisasi. Sebaliknya, keilmuan Islam memandang keberagaman kondisi manusia sebagai *sunnatullah* dan manifestasi dari kebesaran penciptaan. Peristiwa turunnya Surah 'Abasa yang berisi teguran langsung Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW karena mengabaikan Abdullah bin Ummy Maktum seorang sahabat tunanetra yang datang mencari ilmu merupakan preseden historis dan landasan yurisprudensi yang kokoh mengenai kewajiban negara serta institusi pendidikan untuk menyelenggarakan aksesibilitas yang setara (Mutahhari, 1985).

Oleh karena itu, pendidikan inklusif dalam ekosistem madrasah dan perguruan tinggi Islam bukanlah sekadar adaptasi dari deklarasi hak asasi manusia global (seperti *Convention on the Rights of Persons with Disabilities / CRPD*), melainkan bentuk operasionalisasi langsung dari kerangka *Maqashid Syariah*. Secara khusus, inklusi adalah pemenuhan pilar *hifz al-'aql* (perlindungan dan pengembangan akal) serta *hifz al-nafs* (perlindungan martabat dan hak hidup). Mewujudkan pendidikan inklusif berarti mendekonstruksi kurikulum yang kaku agar memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi spektrum kebutuhan belajar yang beragam, mulai dari disabilitas sensorik (tunanetra, tunarungu), disabilitas fisik, hingga kelompok neurodivergen (spektrum autisme, ADHD, disleksia).

Integrasi teknologi digital, yang menjadi pilar utama transformasi pedagogi kontemporer, menawarkan instrumen pembebasan (*emancipatory tools*) untuk memfasilitasi inklusi

ini secara nyata. Jika pada masa lalu seorang santri tunanetra mengalami hambatan akses terhadap literatur klasik (*turats*) karena keterbatasan ketersediaan naskah Braille, ekosistem pedagogi digital abad ke-21 meretas batasan tersebut. Pemanfaatan teknologi asistif berbasis Kecerdasan Buatan (AI), seperti perangkat *screen readers* yang responsif, *Optical Character Recognition* (OCR) berbahasa Arab, hingga modul *Text-to-Speech* yang sanggup melafalkan teks dengan kaidah intonasi yang presisi, memungkinkan kemandirian akademik bagi siswa difabel sensorik (Hasselbring & Glaser, 2000).

Bagi peserta didik neurodivergen, tantangan utama sering kali bersumber dari lingkungan ruang kelas konvensional yang dipenuhi stimulus suara dan visual, yang berpotensi memicu beban kognitif berlebih (*cognitive overload*). Kurikulum adaptif merespons hal ini dengan mengintegrasikan modifikasi lingkungan belajar melalui teknologi. Penggunaan *Virtual Reality* (VR) dapat dioptimalkan untuk menciptakan ruang simulasi yang ramah sensorik (*sensory-friendly*). Teknologi ini memungkinkan siswa autistik untuk mempraktikkan tata cara ibadah (seperti tawaf atau shalat berjamaah) secara bertahap tanpa risiko kewalahan sensorik (Standen & Brown, 2005).

Lebih lanjut, diferensiasi pengajaran dalam pendidikan inklusif diwujudkan melalui implementasi Program Pembelajaran Individual (PPI) atau *Individualized Education Program* (IEP). Melalui instrumen PPI, target pencapaian akademik dan metode asesmen dikalibrasi secara spesifik mengikuti kurva perkembangan kognitif dan kesiapan emosional masing-masing siswa, bukan dipaksakan pada standar evaluasi seragam yang berisiko melumpuhkan motivasi belajar mereka.

Kendati infrastruktur teknologi menyediakan solusi teknis, hambatan paling krusial dalam mewujudkan inklusivitas di lembaga pendidikan Islam sering kali bersifat

kultural dan struktural. Pada dimensi kultural, institusi harus membongkar sisa-sisa teologi fatalistik di sebagian masyarakat yang masih mengonstruksikan disabilitas sebagai objek karitas belaka. Peserta didik berkebutuhan khusus harus diposisikan kembali sebagai subjek yang memiliki hak akademik setara (Miles & Singal, 2010). Pada dimensi struktural, kebijakan inklusi menuntut komitmen kelembagaan yang melampaui deklarasi administratif, khususnya melalui alokasi anggaran untuk penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang mumpuni serta reformasi rubrik asesmen di tingkat kelembagaan.

Pada puncaknya, kurikulum pendidikan Islam yang inklusif menuntut pergeseran paradigma yang holistik dari seluruh ekosistem akademik. Inklusi tidak tercapai hanya dengan memindahkan siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler lalu membiarkan mereka beradaptasi sendiri (*mainstreaming* pasif). Inklusi yang sejati terwujud ketika institusi pendidikan secara sistematis membongkar hambatan fisik, instruksional, dan psikologis, sehingga setiap peserta didik merasa aman, diakui, dan terfasilitasi secara intelektual. Melalui praksis pendidikan inklusif inilah, institusi pendidikan Islam memanifestasikan klaim universalitasnya sebagai purwarupa masyarakat madani yang merepresentasikan prinsip *rahmatan lil 'alamin*.

C. Integrasi Pendidikan Karakter dan Literasi Digital

Ekspansi teknologi digital yang masif ke dalam ruang-ruang pedagogis membawa serta paradoks sosiologis yang tajam: ketersambungan global (*hyper-connectivity*) sering kali berbanding lurus dengan alienasi moral. Konsepsi Barat mengenai literasi digital, sebagaimana dirumuskan oleh Gilster (1997) dan dikembangkan oleh berbagai institusi global kontemporer, umumnya direduksi pada dimensi kognitif dan pragmatis semata. Literasi digital dalam kerangka sekuler lebih banyak berkutat pada kemampuan teknis

mengoperasikan perangkat lunak, memvalidasi sumber informasi secara algoritmik, serta melindungi privasi data dari ancaman peretasan (Bawden, 2008).

Bagi pendidikan Islam, reduksi teknis semacam ini sangat problematis. Pengetahuan teknis tanpa jangkar aksiologis (nilai etika-spiritual) hanya akan melahirkan individu yang secara digital cakap, namun secara moral tuna-adab sebuah kondisi yang oleh Al-Attas (1979) didiagnosis sebagai akar krisis epistemologis umat Islam, yakni *loss of adab* (hilangnya adab).

1. Kritik Epistemologis terhadap Reduksionisme Literasi Digital Sekuler

Literasi digital yang terpisah dari aspek pembentukan karakter mengasumsikan teknologi sebagai alat yang netral (*technological neutrality*). Padahal, arsitektur dunia digital dirancang dengan logika kapitalisme perhatian (*attention economy*) yang secara implisit mendorong dorongan-dorongan kognitif terkecil manusia demi akumulasi *engagement*. Ketika literasi digital hanya diajarkan sebagai kecakapan teknis instrumental, peserta didik diperlakukan sekadar sebagai pengguna (*users*) atau konsumen informasi yang efektif, bukan sebagai agen moral yang memiliki akuntabilitas transendental.

Oleh karena itu, integrasi pendidikan karakter ke dalam literasi digital menuntut konseptualisasi ulang. Ruang siber bukanlah entitas netral yang hampa nilai; ia adalah lanskap ontologis baru di mana watak dan perilaku manusia kerap kali terdistorsi oleh ilusi anonimitas. Fenomena ini dalam psikologi siber dikenal sebagai *Online Disinhibition Effect* (Efek Disinhibisi Daring), di mana ketiadaan pertemuan fisik dan kesadaran akan jarak geografis membuat seseorang merasa terlepas dari norma-norma sosial serta tanggung jawab etis (Suler, 2004). Efek ini kerap memicu agresi verbal, perundungan siber (*cyberbullying*), hingga penyebaran

kebencian secara masif. Kurikulum pendidikan Islam merespons krisis ini melalui pelebagaan Fikih Digital sebuah kerangka etika terapan yang mengekstrapolasi prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* ke dalam ekosistem virtual.

2. Operasionalisasi *Hifz al-'Irdh* dan *Hifz al-'Aql* dalam Era *Post-Truth*

Dalam praksis kurikulum adaptif, Fikih Digital tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang terisolasi secara kaku, melainkan diintegrasikan ke dalam seluruh rumpun keilmuan. Prinsip-prinsip dasarnya dioperasionalkan untuk menjawab problematika riil di dunia digital:

a. Perlindungan Kehormatan (*Hifz al-'Irdh*)

Konsep ini dikontekstualisasikan untuk mendelegitimasi praktik *doxxing* (penyebaran data pribadi secara culas), *cancel culture*, dan pencemaran nama baik di media sosial. Peserta didik dididik untuk memahami bahwa jejak digital (*digital footprint*) merupakan manifestasi dari *amal shalih* atau *amal sayyi'ah* (perbuatan buruk) yang terekam secara permanen. Jejak digital ini diposisikan sebagai analogi duniawi dari kitab catatan amal (Q.S. Al-Kahfi: 49) yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan (Sardar, 2011).

b. Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Di era *post-truth* yang ditandai oleh rekayasa informasi, *deepfake*, dan bias algoritma Kecerdasan Buatan (AI), literasi digital bermanifestasi melalui revitalisasi epistemologi *tabayyun* (verifikasi kritis lintas sumber). Kurikulum menuntut peserta didik untuk tidak menelan informasi berdasarkan popularitas atau metrik *likes* dan *shares*.

Tabayyun di era digital menuntut skeptisisme metodologis yang sehat. Peserta didik diajarkan cara membaca bias di balik desain algoritma (*algorithmic bias*) yang kerap

menciptakan ruang gema (*echo chambers*). Di dalam ruang gema tersebut, polarisasi sektarian dan pemikiran ekstrem kerap diradikalisasi oleh mesin demi keuntungan komersial perusahaan teknologi. Perlindungan terhadap kejernihan nalar dari manipulasi informasi ini merupakan bentuk aktualisasi kontemporer dari pilar *hifz al-'aql*.

3. Limitasi Ontologis Teknologi dan Vitalitas *Uswah Hasanah*

Meskipun teknologi menyediakan berbagai alat bantu instruksional, transfer nilai-nilai karakter dalam ruang digital menemui hambatan fundamental terkait transmisi spiritual (*sanad*). Algoritma, modul *e-learning*, atau sistem berbasis kecerdasan buatan sehebat apa pun tidak memiliki kapasitas ontologis untuk mentransfer ruh, rasa empati, dan keikhlasan. Pendidikan karakter (*tarbiyah al-akhlak*) mutlak membutuhkan perjumpaan dan keteladanan yang hidup (*uswah hasanah*).

Pada titik ini, paradigma *wasathiyyah* (jalan tengah) mengambil peran sentral dalam memosisikan teknologi secara proporsional. Teknologi digital diposisikan semata-mata sebagai instrumen perpanjangan tangan (*extension*), bukan sebagai substitusi dari figur pendidik. Kecanggihan media pembelajaran berfungsi memperluas jangkauan komunikasi kognitif, sementara figur pendidik tetap menjadi pusat gravitas transmisi moral dan penanaman adab.

4. Presensi Digital Pendidik dan Pembentukan Intelektual Publik

Implikasi dari paradigma *wasathiyyah* ini menuntut guru dan dosen di institusi pendidikan Islam untuk menunjukkan presensi digital yang selaras dengan integritas moral mereka di dunia nyata. Dosen dan guru tidak bisa lagi memisahkan antara persona akademik di ruang kelas dengan aktivitas digital mereka di media sosial atau forum publik.

Interaksi di dalam forum diskusi *Learning Management System* (LMS) maupun grup komunikasi asinkron harus

dirancang untuk mencerminkan adab musyawarah yang santun, menoleransi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*), serta menghindari perdebatan nirmanfaat (*mira'*). Pendidik memberikan contoh konkret bagaimana merespons perbedaan argumen secara rasional tanpa harus meluncur pada serangan personal.

Melalui integrasi antara pendidikan karakter dan literasi digital yang terstruktur ini, kurikulum pendidikan Islam abad ke-21 tidak sekadar mencetak tenaga kerja global yang lincah secara teknis, melainkan melahirkan intelektual publik yang memiliki kedalaman akademik serta sanggup menundukkan dinamika teknologi di bawah otoritas moral dan nilai spiritualitas.

D. Kurikulum Nasional vs. Global: Harmonisasi Inovasi

Institusi pendidikan Islam kontemporer, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, senantiasa beroperasi di dalam pusaran tegangan antara dua episentrum kebijakan yang kerap kali saling berbenturan. Tegangan ini tercipta dari tarik-menarik antara tarikan sentripetal standarisasi kurikulum nasional dan dorongan sentrifugal dari tuntutan kompetensi global. Di satu sisi, kurikulum nasional yang dirumuskan oleh otoritas negara melalui Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berfungsi sebagai instrumen vital kohesi sosial, pembentukan identitas kebangsaan, serta transmisi nilai-nilai ideologis negara. Negara menuntut lembaga pendidikan keagamaan untuk mencetak warga negara yang loyal, toleran, dan memiliki kesadaran kewargaan yang selaras dengan cita-cita integrasi nasional.

Di sisi lain, arus deras globalisasi mendesak lembaga pendidikan Islam untuk mengkalibrasi standar mutu internal mereka dengan metrik-metrik internasional. Tuntutan ini bermanifestasi dalam persaingan indikator capaian global,

seperti *Programme for International Student Assessment* (PISA), maupun dorongan institusional untuk mengadopsi kerangka kurikulum transnasional seperti *Cambridge International Examinations* atau *International Baccalaureate* (IB). Pengadopsian standar transnasional ini dipandang mutlak demi menjamin daya saing para lulusan di pasar kerja global yang kian kompetitif, terintegrasi, dan berbasis pada ekonomi pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Dilema struktural antara kepatuhan nasional dan tuntutan global ini sering kali menjebak madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ke dalam pola adopsi yang bersifat reaktif dan dangkal, yang bermuara pada sinkretisme pedagogis yang membingungkan. Tanpa landasan filosofis dan epistemologis yang kokoh, pengelola lembaga pendidikan cenderung menyelesaikan kompromi ini secara kuantitatif, yakni dengan menumpuk berbagai beban kurikuler (*overcrowded curriculum*). Materi-materi yang dituntut oleh standar internasional ditambahkan secara aditif di atas tumpukan beban kurikulum nasional dan muatan lokal keagamaan.

Penumpukan materi tanpa rekonstruksi konseptual ini mengakibatkan fragmentasi pengetahuan pada diri peserta didik. Kurikulum kehilangan benang merah filosofis yang menyatukannya, sehingga pembelajaran berisiko berubah menjadi sekadar proses pengumpulan kredit akademik dan hafalan materi yang mengalienasi siswa dari kedalaman makna keilmuan itu sendiri.

1. Ancaman Imperialisme Epistemologis dalam Kurikulum Global

Hegemoni kurikulum global, apabila diadopsi secara mentah dan tanpa daya kritis epistemologis, membawa ancaman serius berupa imperialisme epistemologis. Standar-standar pendidikan internasional pada umumnya dirancang di atas tatanan filsafat Barat modern yang kental dengan wawasan dunia (*worldview*) rasionalisme-sekuler. Dalam

kerangka berpikir ini, wahyu dipinggirkan dari domain validitas ilmiah dan direduksi sekadar sebagai urusan privat atau dogma subjektif yang tidak memiliki bobot epistemologis dalam konstruksi ilmu pengetahuan (Al-Attas, 1979).

Lebih jauh lagi, paradigma kurikulum global kontemporer sangat dipengaruhi oleh ideologi neoliberalisme yang memandang pendidikan secara murni instrumental. Pendidikan direduksi menjadi komoditas ekonomi, dan sekolah atau universitas difungsikan sebagai industri pencetak modal manusia (*human capital*). Dalam kalkulasi teknokratis ini, peserta didik dinilai sebatas potensi kapasitas kognitif dan keterampilan vokasionalnya untuk melayani kebutuhan pasar bebas dan akumulasi kapital korporasi global.

Bagi lembaga pendidikan Islam, penundukan total terhadap narasi global yang sekuler dan neoliberal ini akan mencabut akar ontologis institusi. Pengabaian terhadap dimensi transendental dan tanggung jawab eskatologis berisiko mengubah pesantren, madrasah, serta PTKI menjadi sekadar pabrik tenaga kerja berdasi. Institusi keagamaan kehilangan ruh profetiknya untuk menegakkan keadilan sosial, merawat moralitas publik, dan membimbing manusia menuju penghambaan yang murni kepada Tuhan. Oleh karena itu, pengadopsian standar global wajib melalui proses pembedahan epistemologis agar nilai-nilai yang bertentangan dengan tauhid tidak menyusup secara implisit (*hidden curriculum*) ke dalam ruang-ruang kelas.

2. Glokalisasi Berbasis *Wasathiyyah*

Meskipun demikian, merespons ancaman imperialisme epistemologis dengan sikap reaktif, isolasionis, atau penolakan buta (*isolationism*) terhadap seluruh produk keilmuan dan standar global juga merupakan langkah yang keliru. Penolakan ekstrem terhadap perkembangan sains modern, literasi digital, metodologi riset kontemporer, dan indikator mutu internasional hanya akan memperparah ketertinggalan serta

melanggengkan marginalisasi umat Islam dalam peta peradaban dunia. Isolasionisme hanya akan menciptakan benteng ketidakberdayaan yang mengurung generasi muda Muslim dalam romantisme sejarah tanpa kemampuan menawarkan solusi atas krisis kemanusiaan global.

Untuk meretas kebuntuan antara ancaman penetrasi sekularisme global di satu sisi dan jebakan isolasionisme lokal di sisi lain, kurikulum pendidikan Islam harus mengoperasionalkan paradigma *wasathiyyah* (jalan tengah). Dalam ranah sosiologi pendidikan, paradigma ini bermanifestasi melalui mekanisme glokalisasi (Robertson, 1992). Glokalisasi bukanlah sekadar kompromi pragmatis atau penggabungan dua hal yang berbeda secara setengah-setengah, melainkan sebuah proses dialektis yang aktif dan transformatif. Melalui glokalisasi, standar-standar universal dari ranah global diadaptasi, disaring (*tashfiyah*), direkonstruksi, dan diberi makna baru melalui konteks partikularitas nilai-nilai lokal, kebangsaan, dan teologi keislaman.

Dalam praksisnya, glokalisasi kurikulum berfungsi sebagai tindakan dekonstruksi dan rekonseptualisasi terhadap ilmu pengetahuan. Standar mutu, instrumen analitis, dan kecakapan teknis yang berasal dari kurikulum global diadopsi murni sebagai alat metodologis untuk memperajam kapasitas berpikir kognitif dan efisiensi teknis. Sementara itu, pandangan hidup tauhid, etika profetik, serta komitmen kebangsaan diposisikan sebagai jangkar aksiologis, pengarah filosofis, dan batas etisnya. Dengan demikian, institusi pendidikan Islam mampu meraih tingkat kedalaman akademik yang diakui secara internasional tanpa harus mengorbankan identitas spiritual dan tanggung jawab keilmuannya.

3. Hermeneutika Peleburan Cakrawala: Integrasi STEM dan Maqashid Syariah

Secara metodologis, harmonisasi antara standar kurikulum nasional dan tuntutan global meniscayakan pendekatan hermeneutika filosofis berupa peleburan cakrawala (*fusion of horizons*) (Gadamer, 2004). Kurikulum tidak boleh dirancang dengan memisahkan ilmu keagamaan dan ilmu umum secara dikotomis-dikotomi yang selama ini menjadi akar krisis keilmuan di dunia Islam. Sebaliknya, pandangan hidup tauhid (*Islamic worldview*) didudukkan sebagai cakrawala epistemologis utama yang menyerap, menaungi, dan melebur dengan temuan-temuan sains dan teknologi modern.

Aplikasi praktis dari peleburan cakrawala ini dapat dilacak pada model madrasah unggulan maupun program studi sains di PTKI yang mengintegrasikan kerangka *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) berskala internasional dengan kerangka etika keislaman. Kerangka STEM atau standar kurikulum transnasional dimanfaatkan secara maksimal untuk melatih ketajaman riset, nalar logis, kecakapan komputasi, dan kemampuan eksperimentasi peserta didik. Namun, seluruh aktivitas eksplorasi ilmiah tersebut tidak dibiarkan berjalan dalam ruang yang hampa nilai.

Maqashid Syariah dan metodologi *Ushul Fiqh* diintegrasikan secara organik sebagai kompas etis dalam seluruh proses penemuan ilmiah. Sebagai gambaran, ketika peserta didik mempelajari topik-topik krusial seperti rekayasa genetika, penyuntingan gen (*CRISPR*), atau pemanfaatan kecerdasan buatan dari literatur ilmiah global, mereka tidak hanya didorong untuk memahami mekanisme teknisnya. Secara simultan, kurikulum mewajibkan mereka untuk menganalisis implikasi bioetika dan dampaknya terhadap eksistensi kemanusiaan dengan menguji apakah inovasi tersebut selaras dengan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan dan martabat manusia), *hifz al-nafs* (perlindungan

jiwa), serta *hifz al-bi'ah* (perlindungan kelestarian lingkungan). Integrasi ini memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan selalu berada di bawah kendali moralitas keagamaan.

4. Pemetaan Silang (*Cross-Mapping*) Capaian Pembelajaran dan Akreditasi

Harmonisasi kurikulum yang efektif juga menuntut kecakapan tata kelola institusional dalam melakukan pemetaan silang (*cross-mapping*) terhadap capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Para desainer kurikulum di madrasah dan perguruan tinggi Islam tidak perlu terjebak dalam kerumitan administratif dengan menyusun dua arsitektur kurikulum yang terpisah demi memenuhi tuntutan akreditasi nasional dan standar akreditasi internasional, seperti FIBAA (*Foundation for International Business Administration Accreditation*) atau AUN-QA (*ASEAN University Network-Quality Assurance*).

Langkah strategis yang harus ditempuh adalah membangun satu arsitektur kurikulum inti yang terintegrasi secara utuh. Indikator-indikator pendalaman teks klasik keislaman (*turats*) dan penguasaan metodologi pemikiran Islam dipetakan secara presisi ke dalam rubrik-rubrik evaluasi internasional yang berbasis pada *Student-Centered Learning* (SCL) dan *Outcome-Based Education* (OBE). Proses pembelajaran dirancang agar penelusuran literatur klasik tidak lagi berhenti pada hafalan doktrinal, melainkan ditransformasikan menjadi riset-riset kritis yang membedakan problem kemanusiaan kontemporer.

Melalui pendekatan pemetaan silang ini, proyek-proyek akhir dan karya ilmiah mahasiswa diarahkan untuk menghasilkan luaran berupa publikasi pada jurnal-jurnal bereputasi internasional. Internasionalisasi dalam konteks ini mengalami demistifikasi: ia tidak lagi dipahami sebagai proses pembaratan (*Westernization*) atau peniruan gaya hidup Barat, melainkan sebagai peningkatan ketatnya (*rigor*) kualitas

akademik dan metodologi riset. Hal ini memungkinkan diskursus kekayaan intelektual Islam dan kearifan lokal dapat diartikulasikan, diuji secara terbuka, dan diakui kontribusinya dalam panggung akademik global.

5. Agilitas Struktural Kurikulum dan Profil Ulul Albab

Pada akhirnya, kurikulum pendidikan Islam yang sanggup bertahan dan memimpin di tengah gelombang perubahan zaman adalah kurikulum yang memiliki kelenturan struktural (*structural agility*). Kelenturan ini hanya dapat dicapai apabila desainer kurikulum mampu membedakan secara tegas dan metodologis antara dimensi mendasar yang bersifat permanen dengan dimensi operasional yang bersifat dinamis:

a. Dimensi *Qath'i* (Absolut)

Merupakan bagian kurikulum yang berakar kuat pada ajaran teologi tauhid, nilai-nilai etika profetik, serta prinsip-prinsip syariat mendasar. Dimensi ini bersifat permanen, tidak berkurang, dan tidak dapat ditawar oleh pergeseran waktu, tempat, maupun tren politik-ekonomi global. Dimensi inilah yang menjadi panduan moral dan pembentuk karakter esensial peserta didik.

b. Dimensi *Mutaghayyirat* (Dinamis)

Merupakan ranah kurikulum yang bersifat fleksibel, adaptif, dan kontekstual. Dimensi ini mencakup instrumen teknologi pembelajaran, metodologi pengajaran, penyesuaian konten keterampilan vokasional, serta indikator-indikator teknis yang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja modern.

Sintesis harmonis antara kepatuhan pada prinsip *qath'i* dan kelenturan dalam aspek *mutaghayyirat* ini bermuara pada satu tujuan utama pendidikan Islam, yaitu melahirkan profil *Ulul Albab*. *Ulul Albab* sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an merepresentasikan figur intelektual kosmopolitan abad ke-21. Mereka adalah pribadi yang memiliki ketajaman nalar

kritis dan kecakapan teknis tingkatan tinggi untuk menavigasi kompleksitas peradaban global, namun pada saat yang sama tetap teguh dalam pijakan spiritualitasnya sebagai hamba Allah serta memiliki komitmen kebangsaan yang mendalam sebagai warga negara.

E. Simpulan

Bab ini mengkaji desain kurikulum pendidikan Islam yang adaptif terhadap dinamika global dan inklusif merespons pluralitas, dengan fokus pada penyelarasan kompetensi abad 21 dengan kerangka nilai transendental.

Desain kurikulum berbasis kompetensi abad 21 (4C: Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication) direkonstruksi melalui lensa Maqashid Syariah dan wasathiyyah. Critical Thinking dielevasi menjadi tafakkur dan tabayyun; Communication di bawah payung qawlan sadida; Collaboration sebagai praksis ta'awun; Creativity disinergikan dengan semangat ijtihad.

Pendidikan inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus diwujudkan melalui: (1) paradigma yang memandang disabilitas sebagai sunnatullah, bukan defisit; (2) pemanfaatan teknologi asistif berbasis AI; (3) implementasi Program Pembelajaran Individual (PPI); dan (4) pembongkaran hambatan kultural dan struktural.

Integrasi pendidikan karakter dan literasi digital menuntut Fikih Digital yang mengoperasionalkan Maqashid Syariah: hifz al-'irdh (perlindungan kehormatan) untuk mencegah doxxing dan cancel culture; hifz al-'aql (perlindungan akal) untuk menavigasi era post-truth melalui tabayyun.

Harmonisasi kurikulum nasional dan global dilakukan melalui: (1) glokalisasi berbasis wasathiyyah; (2) hermeneutika peleburan cakrawala antara STEM dan Maqashid Syariah; (3) pemetaan silang (cross-mapping) capaian pembelajaran; dan (4) agilitas struktural kurikulum

dengan dimensi qath'i (permanen) dan mutaghayyirat (dinamis) yang bermuara pada profil Ulul Albab.

F. Soal Latihan

1. Rekonstruksi Kurikulum 4C

Pilihlah salah satu mata pelajaran PAI (misalnya: Fikih, Akidah Akhlak, atau SKI)! Rancang ulang kurikulumnya dengan mengintegrasikan kompetensi abad 21 (4C) dan nilai-nilai Maqashid Syariah. Sertakan: (a) tujuan pembelajaran, (b) materi yang direlevansikan, (c) strategi pembelajaran, dan (d) instrumen evaluasi. (CPMK2, CPMK4)

2. Proyek Pendidikan Inklusif

Rancanglah program pendidikan inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus (pilih satu jenis disabilitas: tunanetra, tunarungu, autisme, atau disleksia) di sebuah madrasah! Sertakan: (a) modifikasi lingkungan belajar, (b) pemanfaatan teknologi asistif, (c) Program Pembelajaran Individual (PPI), (d) pelatihan guru, dan (e) mekanisme evaluasi. (CPMK2, CPMK4)

3. Analisis Fikih Digital

Pilihlah satu fenomena digital (misalnya: cyberbullying, doxxing, deepfake, atau echo chamber) yang mengancam pendidikan karakter! Analisis fenomena tersebut dari perspektif: (a) dampak terhadap peserta didik, (b) pelanggaran terhadap Maqashid Syariah (hifz al-'irdh, hifz al-'aql), (c) strategi pendidikan karakter untuk mengatasinya, dan (d) peran guru dalam menanamkan tabayyun. (CPMK1, CPMK3)

4. Harmonisasi Kurikulum Nasional-Global

Buatlah proposal harmonisasi kurikulum untuk sebuah madrasah yang ingin mengadopsi standar internasional (misalnya: Cambridge atau IB) tanpa kehilangan

identitas keislaman! Sertakan: (a) pemetaan silang capaian pembelajaran, (b) integrasi STEM dan Maqashid Syariah, (c) strategi glokalisasi, dan (d) pengembangan profil Ulul Albab. (CPMK2, CPMK4)

5. Studi Kasus Kurikulum Inovatif

Carilah satu lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah, atau sekolah Islam terpadu) yang telah mengembangkan kurikulum adaptif dan inklusif! Analisis: (a) struktur kurikulum, (b) integrasi nilai-nilai Islam dan kompetensi abad 21, (c) strategi inklusivitas, (d) keunggulan dan kelemahan, serta (e) rekomendasi perbaikan. (CPMK1, CPMK3)



BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB VI

PERAN GURU DALAM EKOSISTEM INOVATIF

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Merancang program pengembangan profesional berkelanjutan (*Continuous Professional Development*) yang berbasis kebutuhan, kolaboratif (PLC), dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
2. Mengimplementasikan peran guru sebagai fasilitator (*guide on the side*) dalam kerangka hermeneutika Gadamer untuk menciptakan ruang dialogis dan peleburan cakrawala pemahaman.
3. Membangun strategi kolaborasi tri-pusat pendidikan (sekolah, orang tua, komunitas) untuk menciptakan *bi'ah shalihah* (lingkungan pendidikan yang kondusif).
4. Mengembangkan alat penilaian kinerja guru inovatif berbasis portofolio digital, penilaian 360-derajat, dan rubrik evaluasi yang mengintegrasikan *Maqashid Syariah* dan etika digital.

A. Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Professional Development)

Perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan berlangsung semakin cepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini membawa konsekuensi bahwa guru tidak lagi dapat mengandalkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh ketika menempuh pendidikan formal. Kompetensi yang dimiliki saat pertama kali menjadi guru perlu terus diperbarui agar tetap relevan dengan perubahan kurikulum, karakteristik peserta didik, perkembangan teknologi pembelajaran, serta tuntutan dunia kerja di masa depan. Oleh karena itu, pengembangan profesional berkelanjutan atau *Continuous Professional Development* (CPD) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang pendidik.

Dalam konteks pendidikan Islam, pengembangan profesional bukan sekadar upaya meningkatkan kemampuan mengajar, tetapi juga merupakan bagian dari amanah keilmuan. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, melainkan juga membimbing pembentukan karakter, akhlak, dan cara berpikir peserta didik. Tugas tersebut menuntut guru untuk terus belajar agar mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan.

Selama ini masih terdapat pandangan bahwa setelah seorang guru menyelesaikan pendidikan tinggi dan memperoleh sertifikat pendidik, maka proses belajarnya dianggap telah selesai. Pandangan tersebut kurang sesuai dengan dinamika pendidikan saat ini. Ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat. Berbagai pendekatan pembelajaran, media digital, hasil penelitian pendidikan, hingga teknologi kecerdasan buatan terus mengalami pembaruan. Materi dan metode yang dianggap efektif

beberapa tahun lalu belum tentu masih relevan dengan kondisi peserta didik saat ini.

Apabila guru tidak mengikuti perkembangan tersebut, proses pembelajaran berpotensi menjadi monoton dan kurang mampu menjawab kebutuhan peserta didik. Pembelajaran cenderung berlangsung dengan pola yang sama dari tahun ke tahun, sementara karakter generasi peserta didik telah berubah. Generasi yang lahir di era digital memiliki cara belajar yang lebih visual, interaktif, kolaboratif, dan terbiasa memperoleh informasi secara cepat. Kondisi ini menuntut guru untuk mampu menyesuaikan strategi pembelajaran tanpa mengurangi kualitas materi maupun nilai-nilai pendidikan yang ingin ditanamkan.

Darling-Hammond, Hyler, dan Gardner (2017) menjelaskan bahwa pengembangan profesional yang efektif merupakan proses berkelanjutan yang terintegrasi dengan praktik mengajar sehari-hari. Pelatihan guru tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sesaat, tetapi harus menjadi proses pembelajaran yang terus berlangsung sepanjang karier profesional. Dengan demikian, CPD bukan sekadar kewajiban administratif untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat, melainkan investasi jangka panjang dalam peningkatan mutu pendidikan.

Di berbagai negara, program CPD telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan. Guru didorong mengikuti pelatihan, lokakarya, sertifikasi, konferensi ilmiah, maupun komunitas belajar profesional. Akan tetapi, pada praktiknya masih banyak program pengembangan guru yang lebih berorientasi pada pemenuhan administrasi dibandingkan peningkatan kompetensi nyata di kelas. Keberhasilan sering diukur dari jumlah sertifikat yang dimiliki, banyaknya pelatihan yang diikuti, atau lamanya jam pelatihan yang tercatat, sementara perubahan kualitas pembelajaran belum tentu terjadi secara signifikan.

Pendekatan seperti ini perlu dikaji kembali dalam pendidikan Islam. Pengembangan profesional tidak boleh berhenti pada peningkatan keterampilan teknis semata, misalnya kemampuan mengoperasikan aplikasi pembelajaran, menggunakan *Learning Management System* (LMS), atau membuat media digital. Kompetensi tersebut memang penting, tetapi harus berjalan seiring dengan penguatan nilai, etika, dan tanggung jawab moral sebagai seorang pendidik.

Dalam perspektif Islam, belajar merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Prinsip *thalab al-'ilm* minal mahdi ilal lahdi mengajarkan bahwa setiap Muslim, termasuk guru, memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Semangat belajar sepanjang hayat inilah yang menjadi fondasi utama pengembangan profesional berkelanjutan. Guru dituntut memiliki sikap terbuka terhadap ilmu baru, bersedia memperbaiki praktik pembelajaran, dan mampu mengambil manfaat dari perkembangan teknologi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Guru pendidikan Islam juga memiliki tanggung jawab untuk menjembatani warisan keilmuan Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Penguasaan terhadap kitab-kitab klasik (*turats*) tetap menjadi modal penting, namun pada saat yang sama guru juga perlu memahami perkembangan sains, teknologi informasi, literasi digital, serta isu-isu sosial kontemporer. Dengan demikian, peserta didik memperoleh pendidikan yang tidak hanya kuat secara keagamaan, tetapi juga mampu menghadapi tantangan kehidupan modern.

Pengembangan profesional yang ideal tidak dilakukan secara individual, melainkan dibangun melalui budaya belajar bersama di lingkungan sekolah atau madrasah. Oleh karena itu, model pelatihan satu arah yang hanya berlangsung beberapa hari perlu dilengkapi dengan pembelajaran yang berkesinambungan di tempat kerja. Webster-Wright (2009)

menegaskan bahwa pengembangan profesional akan lebih efektif apabila berlangsung melalui pengalaman nyata yang dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Salah satu bentuk yang dapat dikembangkan adalah Professional Learning Communities (PLC) atau Komunitas Belajar Profesional. Dalam komunitas ini, guru tidak belajar sendiri, tetapi saling berbagi pengalaman, mendiskusikan permasalahan pembelajaran, melakukan refleksi bersama, serta mencari solusi secara kolaboratif. Tradisi ini sebenarnya memiliki kesesuaian dengan budaya keilmuan Islam melalui kegiatan halaqah, musyawarah, bahtsul masail, dan mudzakah yang telah lama berkembang di lingkungan pesantren.

Melalui PLC, guru agama, guru sains, maupun guru mata pelajaran lainnya dapat saling bertukar pengalaman. Misalnya, mereka bersama-sama menganalisis rendahnya motivasi belajar peserta didik, mendiskusikan penggunaan media digital yang efektif, atau menyusun strategi pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan mata pelajaran umum. Hasil diskusi tersebut kemudian diuji dalam praktik pembelajaran dan dievaluasi bersama sehingga terjadi proses perbaikan yang berkelanjutan.

Selain membangun komunitas belajar, guru juga perlu meningkatkan kemampuan melakukan penelitian terhadap praktik pembelajaran yang mereka lakukan sendiri. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menjadi salah satu sarana penting untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, menerapkannya di kelas, kemudian mengevaluasi hasilnya. Dengan cara ini, guru tidak hanya menjadi pengguna hasil penelitian orang lain, tetapi juga menjadi penghasil pengetahuan yang lahir dari pengalaman praktik di lapangan.

Aspek lain yang semakin penting dalam CPD adalah penguasaan literasi digital. Kemajuan teknologi telah

menghadirkan berbagai perangkat pembelajaran baru seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *Learning Analytics*, aplikasi kolaboratif, simulasi virtual, hingga *Large Language Models* (LLM). Guru perlu memahami manfaat sekaligus keterbatasan teknologi tersebut agar dapat memanfaatkannya secara tepat.

Sebagai contoh, penggunaan AI dapat membantu guru menyusun perangkat pembelajaran, membuat soal, merancang rubrik penilaian, atau memberikan umpan balik awal terhadap tugas peserta didik. Namun demikian, guru tetap harus melakukan verifikasi terhadap hasil yang diberikan AI karena teknologi tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan, bias informasi, maupun ketidakakuratan sumber. Oleh sebab itu, CPD perlu membekali guru dengan kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan teknologi, bukan sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat lunak.

Literasi digital dalam pendidikan Islam juga harus mencakup aspek etika. Guru perlu memahami persoalan hak cipta, plagiarisme, keamanan data pribadi, jejak digital, etika bermedia sosial, hingga penggunaan AI secara bertanggung jawab. Ketika peserta didik bertanya mengenai penggunaan ChatGPT, AI generatif, atau teknologi digital lainnya, guru mampu memberikan penjelasan yang proporsional berdasarkan pertimbangan akademik sekaligus nilai-nilai Islam.

Di samping penguasaan teknologi, pengembangan profesional juga harus memperhatikan pembinaan karakter guru. Kompetensi pedagogik dan kompetensi digital tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak disertai integritas moral. Guru tetap menjadi teladan utama bagi peserta didik. Cara berbicara, sikap, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap peserta didik merupakan bagian penting dari proses pendidikan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.

Karena itu, program CPD di lingkungan pendidikan Islam sebaiknya memberikan ruang bagi pembinaan spiritual melalui kajian keislaman, penguatan akhlak, refleksi profesi, maupun kegiatan yang mendukung kesehatan mental guru. Upaya ini penting mengingat tuntutan pekerjaan guru pada era digital semakin kompleks. Guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga mengelola administrasi, berkomunikasi dengan orang tua, memanfaatkan berbagai platform digital, dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan pendidikan yang berlangsung cepat.

Keseimbangan antara peningkatan kompetensi teknis (*maharah*) dan pembinaan spiritual (*tazkiyatun nafs*) akan menghasilkan guru yang profesional sekaligus berkarakter. Guru mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa kehilangan identitasnya sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran manusia dalam proses pendidikan.

Pada akhirnya, pengembangan profesional berkelanjutan merupakan budaya belajar yang harus tumbuh di setiap lembaga pendidikan Islam. Guru yang terus belajar akan lebih siap menghadapi perubahan, lebih terbuka terhadap inovasi, dan lebih mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Sebaliknya, guru yang berhenti belajar akan semakin sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga kualitas pembelajaran berpotensi mengalami penurunan.

Dengan menjadikan CPD sebagai bagian dari budaya organisasi, madrasah, sekolah Islam, maupun perguruan tinggi keagamaan Islam dapat membangun sumber daya manusia yang adaptif, profesional, dan berintegritas. Guru tidak hanya menjadi penyampai materi pelajaran, tetapi juga pembelajar sepanjang hayat yang mampu membimbing peserta didik menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, kreatif, serta siap

menghadapi tantangan masyarakat global tanpa kehilangan jati diri keislamannya.

B. Guru sebagai Fasilitator, Bukan Pengajar Tradisional

Konstruksi pedagogi tradisional dalam ekosistem lembaga pendidikan Islam secara historis kerap beroperasi di atas kerangka otoritas hierarkis yang kaku dan tersentralisasi. Model ini menempatkan guru, *ustadz*, atau kiai sebagai *sage on the stage*, sebuah sosok sentral yang diposisikan sebagai sumber absolut kebenaran, pemilik tunggal pengetahuan, dan satu-satunya saluran transmisi keilmuan yang sah di dalam ruang kelas. Secara operasional, pendekatan pengajaran monologis ini bermanifestasi dalam apa yang secara kritis diidentifikasi oleh Paulo Freire (1970) sebagai *konsep pendidikan gaya bank (banking concept of education)*. Dalam paradigma ini, proses pembelajaran direduksi menjadi tindakan transaksi pasif: peserta didik diperlakukan sebagai bejana kosong (*tabula rasa*) yang sabar menerima, menghafal, dan menampung deposit data dari pendidiknya tanpa ruang untuk menguji atau mempertanyakan secara kritis.

Kendati model *banking education* ini secara historis memiliki nilai guna tersendiri khususnya dalam menjaga preservasi dan purifikasi teks-teks klasik (*turats*) pada era kelangkaan informasi (*information scarcity*) dan keterbatasan akses literatur, model tersebut mengalami disfungsi struktural yang masif tatkala dihadapkan pada realitas abad ke-21. Kita kini berada di era hiper-ketersediaan data (*data hyper-abundance*), di mana batas-batas pengetahuan fisik telah runtuh oleh penetrasi jaringan digital global.

Ketika mesin pencari cerdas, sistem basis data terbuka, dan algoritma Kecerdasan Buatan (*Generative AI/LLM*) mampu menyajikan definisi hukum fikih, kompilasi sanad hadis, rekonstruksi sejarah peradaban, hingga komparasi penafsiran ayat dalam hitungan detik, mempertahankan monopoli informasi di depan kelas bukan lagi sekadar bentuk

kemunduran pedagogis. Lebih jauh dari itu, ia merupakan bentuk fiksasi otoritas yang semu. Menggantungkan penghormatan murid semata-mata pada penguasaan hafalan data faktual adalah strategi yang rapuh di hadapan generasi *digital natives*. Oleh sebab itu, ekosistem pendidikan Islam yang inovatif menuntut pergeseran ontologis yang radikal: guru harus berani melepaskan jubah pengajar tradisional sebagai transmitter informasi (*information transmitter*) dan bermetamorfosis menjadi seorang fasilitator, kurator pengetahuan, serta arsitek pengalaman belajar (*guide on the side*) (King, 1993).

1. Dasar Hermeneutik Peran Fasilitator: Dialektika dan Peleburan Cakrawala

Dalam diskursus hermeneutika filosofis, transisi peran guru dari pengajar instruksional menjadi fasilitator menemukan artikulasi teoritis yang sangat presisi melalui kerangka pemikiran Hans-Georg Gadamer (2004). Dalam magnum opusnya, *Truth and Method*, Gadamer menegaskan bahwa pemahaman (*Verstehen*) bukanlah sebuah proses reproduksi mekanis dari pikiran sang penutur kepada pendengar, melainkan sebuah peristiwa dialektis yang terjadi melalui perjumpaan dua realitas.

Peserta didik abad ke-21 tidak pernah hadir di ruang kelas agama dengan kondisi mental yang steril atau kepala kosong. Mereka senantiasa melangkah masuk dengan membawa struktur pra-pemahaman (*pre-understanding/Vorverständnis*) dan prasangka kognitif (*prejudices/Vorurteile*) yang secara intensif telah dibentuk oleh paparan algoritma media sosial, budaya populer, krisis ekologis, dan fragmentasi informasi di dunia siber.

Jika seorang pendidik Muslim memaksakan penafsiran tunggal secara instruksional tanpa memedulikan lanskap kognitif siswa, proses tersebut tidak akan menghasilkan pemahaman otentik, melainkan alienasi intelektual

(*intellectual alienation*). Teks-teks keagamaan yang adiluhung akan dipersepsikan oleh siswa sebagai dogma usang, kaku, dan terputus dari realitas eksistensial hidup mereka.

Di sinilah peran vital guru sebagai fasilitator, mengorkestrasi terjadinya peleburan cakrawala (*fusion of horizons / Horizontverschmelzung*). Seorang fasilitator tidak bertugas mendiktekan hasil akhir penafsiran suatu ayat atau doktrin hukum secara doktriner. Ia membimbing peserta didik untuk membenturkan secara jujur pra-pemahaman kekinian mereka dengan cakrawala sejarah dan teologi yang dikandung oleh teks masa lalu.

Dalam proses ini, ruang kelas bertransformasi dari tempat penjejalan materi menjadi sebuah *laboratorium hermeneutis*. Guru memfasilitasi dialog, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sokratik yang mengusik kenyamanan kognitif (*cognitive dissonance*), serta menyediakan ruang yang aman (*safe space*) bagi siswa untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi pemikiran. Melalui metodologi dialektis ini, kebenaran nilai-nilai agama tidak lagi sekadar dihafal secara mekanis demi kelulusan ujian, melainkan diinternalisasi secara mendalam sebagai makna yang hidup, kontekstual, dan solutif bagi kehidupan nyata.

2. Re-kalibrasi Otoritas: Menjawab Keraguan Teologis

Kendati demikian, upaya mengadopsi konsep fasilitator dari tradisi Barat ke dalam jantung pendidikan Islam sering kali memicu kekhawatiran teologis yang krusial. Muncul ketakutan bahwa pergeseran dari pengajar menjadi fasilitator akan meruntuhkan hierarki adab, mengikis rasa hormat kepada pendidik, serta memutus mata rantai transmisi keilmuan (*sanad*) yang sangat disucikan dalam tradisi keislaman. Ketakutan ini umumnya bersumber dari kesalahan dalam memahami makna fasilitasi itu sendiri.

Menjadi fasilitator dalam pendidikan Islam sama sekali tidak bermakna melepaskan otoritas keilmuan secara abai

(*laissez-faire*) atau menjerumuskan peserta didik ke dalam relativisme radikal khas postmodernisme, di mana semua pendapat dianggap benar secara setara (Al-Attas, 1979). Guru sebagai fasilitator tidak menghilangkan otoritasnya, melainkan melakukan re-kalibrasi lokus otoritas: bergeser dari sekadar otoritas penyedia informasi menuju otoritas metodologis dan moral-spiritual.

3. Pilar Epistemologis dan Metodologis

Di ranah metodologis, guru bertindak sebagai penjaga gawang epistemologis (*epistemological gatekeeper*). Dalam skenario pembelajaran modern seperti *Project-Based Learning* (PBL) atau *Flipped Classroom*, di mana siswa dituntut mengeksplorasi materi secara mandiri di ruang digital, fasilitator hadir untuk melatih kecakapan *tabayyun* (akreditasi dan verifikasi kritis lintas sumber).

Fasilitator memandu siswa untuk membedah dan membedakan antara literatur ilmiah-keagamaan yang memiliki *sanad* keilmuan otentik dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan pseudo-pengetahuan atau narasi ekstremis yang sekadar direplikasi oleh mesin pencari dan algoritma media sosial (Sardar, 2011). Guru tidak menyuapkan jawaban, melainkan membekali siswa dengan *manhaj* (metodologi berpikir yang sah), seperti prinsip-prinsip *Ushul Fiqh* atau kerangka *Maqashid Syariah*. Dengan pisau analisis metodologis ini, tatkala peserta didik menyelami samudra internet yang sarat informasi sampah (*digital garbage*), mereka memiliki kompas intelektual yang tangguh untuk menyaring, mengevaluasi, dan menyintesis data menjadi pengetahuan yang mencerahkan.

4. Pilar Etis dan Eksistensial: Transformasi *Murabbi* dan *Muaddib*

Di ranah moral dan eksistensial, peran fasilitator bersinggungan langsung dengan fungsi intrinsik pendidik Muslim sebagai *murabbi* (pengasuh dan pemelihara jiwa) serta

muaddib (penanam adab dan etika). Transfer informasi dan manipulasi data teknis memang dapat didelegasikan kepada perangkat Kecerdasan Buatan. Namun, transfer kebijaksanaan (*hikmah*), penanaman rasa empati, penyucian jiwa, dan pembentukan karakter (*akhlakul karimah*) mutlak membutuhkan perjumpaan fisik serta emosional antar-kemanusiaan (*human-to-human encounter*).

Sebagai *muaddib*, fasilitator hadir di dalam dinamika kelompok belajar siswa bukan untuk memberi dogma, melainkan mengamati bagaimana etika berdiskusi dijalankan. Ia mengintervensi tatkala terjadi pergesekan ego antar-siswa, mengajarkan cara menghargai perbedaan pendapat (*ikhtilaf*), membimbing kesadaran akan hak cipta (kejujuran akademik), dan mendemonstrasikan keteladanan moral (*uswah hasanah*) secara organik saat memecahkan masalah-masalah sosial yang kompleks.

Pergeseran dari pengajar tradisional menuju fasilitator ini pada akhirnya menuntut kebesaran jiwa, fleksibilitas mental, dan *tawadhu* (kerendahan hati intelektual) yang tinggi dari para pendidik di madrasah, pesantren, maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Meninggalkan zona nyaman monolog satu arah di depan podium dan memberanikan diri masuk ke dalam gelanggang dialog yang dinamis sebuah ruang di mana argumentasi guru sangat mungkin dipertanyakan, diuji, dikritik, atau bahkan diperkaya oleh perspektif baru dari muridnya adalah wujud nyata dari pelebagaan pendidikan Islam yang membebaskan (*emancipatory education*).

Pada puncaknya, keberhasilan dan keagungan seorang fasilitator dalam ekosistem inovatif tidak lagi diukur dari seberapa fasih ia berbicara dan memukau audiens dengan memorinya, melainkan dari seberapa terampil ia menyalakan api rasa ingin tahu, merangsang nalar kritis, serta membimbing peserta didiknya untuk tumbuh menjadi pribadi yang berpikir mandiri, bijaksana, dan beradab.

C. Kolaborasi Guru dengan Orang Tua dan Komunitas

Institusionalisasi pendidikan yang lahir dari rahim modernitas industrial secara historis telah menciptakan ilusi keterpisahan (*segregation*) yang tajam antara ruang kelas fisik dengan realitas sosiologis di luar tembok sekolah. Lembaga pendidikan termasuk madrasah dan sekolah Islam modern kerap kali terjebak beroperasi sebagai menara gading yang terisolasi dari dinamika masyarakatnya. Dalam struktur isolasionis ini, otoritas pedagogis dimonopoli secara eksklusif oleh guru dan birokrasi sekolah, sementara orang tua direduksi perannya sekadar sebagai klien konsumen jasa pendidikan atau penyedia dukungan finansial pasif.

Interaksi antara sekolah dan keluarga dalam ekosistem konvensional umumnya bersifat transaksional, formalitas, dan sporadis terbatas pada ritual pembagian buku rapor di akhir semester atau pemanggilan darurat akibat eskalasi masalah indiscipliner peserta didik. Namun, di tengah gempuran disrupsi digital, hiper-konektivitas, dan kompleksitas krisis moral abad ke-21, model isolasionisme institusional ini mengalami disfungsi struktural yang parah. Transformasi pendidikan Islam meniscayakan dekonstruksi radikal terhadap dinding-dinding pemisah tersebut, guna mengembalikan pendidikan pada hakikat teologis dan sosiologisnya sebagai tanggung jawab kolektif-komunal (*fardhu kifayah*).

1. Trikotomi Epistemologis dan Konsepsi *Bi'ah Shalihah*

Secara teologis dan sosiologis, epistemologi pendidikan Islam tidak pernah mengenal trikotomi yang rigid antara pendidikan formal (sekolah/madrasah), informal (keluarga), dan non-formal (masyarakat). Ketiganya bukanlah entitas independen yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan ekosistem organik yang saling mengintervensi dan melengkapi dalam membentuk *bi'ah shalihah* suatu lingkungan ekologis yang kondusif bagi pertumbuhan moral, spiritual, dan kognitif peserta didik.

Adagium klasik yang menyatakan bahwa *al-ummu madrasatul ula* (ibu dan lingkungan keluarga adalah madrasah pertama) secara fundamental menempatkan keluarga sebagai episentrum ontologis pendidikan. Dalam pandangan ini, sekolah formal sejatinya hanyalah kepanjangan tangan (*extension*) yang mengorkestrasi keahlian teknis-pedagogis untuk memperluas cakrawala berpikir anak (Ulwan, 1992).

Prinsip *Fardhu Kifayah* dalam Pendidikan: Penyelenggaraan pendidikan Islam yang berkualitas tidak dapat dibebankan secara tunggal kepada institusi madrasah. Pendidikan adalah *mas'uliyah ijtimaiyyah* (tanggung jawab sosial kolektif). Kegagalan mendidik satu generasi akibat ketimpangan sinergi antara rumah, sekolah, dan masyarakat merupakan kegagalan moral seluruh komunitas (*dosa kolektif*).

Ketika terjadi benturan nilai antara apa yang diajarkan di sekolah dengan pola asuh di rumah serta budaya yang berkembang di masyarakat, proses pendidikan akan mengalami *anomi pedagogis*. Oleh karena itu, rekonstruksi peran guru sebagai inovator mewajibkan pembongkaran batas-batas institusional demi terciptanya konvergensi nilai di ketiga ranah tersebut.

2. *Blended Learning* dan Transformasi Orang Tua sebagai Ko-Fasilitator

Transisi menuju model *Blended Learning* dan *Flipped Classroom* secara radikal telah menghapus batas demarkasi spasiotemporal antara ruang domestik rumah dan ruang publik sekolah. Ketika sebagian besar proses asimilasi informasi dasar, eksplorasi materi, dan penyelesaian tugas mandiri (*asynchronous learning*) bergeser ke lingkungan rumah melalui platform digital, orang tua tidak lagi memiliki kemewahan untuk bersikap pasif. Keadaan memaksa keluarga untuk bermetamorfosis menjadi ko-fasilitator (*co-facilitators*) pembelajaran yang aktif.

Dimensi Peran	Model Konvensional	Model Kolaboratif Digital
Lokus Pembelajaran	Terisolasi di dalam kelas fisik.	Terdistribusi (Rumah, Sekolah, Ruang Siber).
Peran Orang Tua	Pengawas nilai dan penyedia fasilitas.	Ko-fasilitator dan pendamping kritis.
Fokus Komunikasi	Laporan hasil akhir (Sumatif/Rapor).	Pemantauan proses dan pertumbuhan (<i>Formatif</i>).
Literasi Utama	Literasi baca-tulis konvensional.	Literasi Digital dan Fikih Digital Keluarga.

Pada titik krusial inilah, peran guru berkembang dari sekadar pengajar siswa menjadi kolaborator strategis bagi orang tua. Guru dituntut untuk tidak hanya memikirkan silabus murid, tetapi juga mendesain program pemberdayaan orang tua (*parent empowerment*). Pendidik harus mengedukasi dan membekali orang tua dengan kapabilitas literasi digital (*digital parenting*) serta pemahaman tentang Fikih Digital. Hal ini bertujuan agar pola pendampingan, batas toleransi penggunaan gawai, serta navigasi etis di rumah berjalan seirama dengan visi filosofis yang dibangun oleh madrasah.

Tanpa kolaborasi yang terstruktur ini, akan terjadi benturan horizon (*clash of horizons*) yang parah: nilai-nilai kritis dan karakter profetik yang ditanamkan guru di sekolah akan runtuh seketika oleh kelalaian pengawasan (*digital neglect*) atau pembiaran konsumsi media yang tidak sehat di rumah (Epstein, 2011). Akibatnya, peserta didik akan mengalami kebingungan kognitif, disorientasi moral, dan krisis identitas.

3. Komunitas sebagai Laboratorium Sosial dan Ekosistem Kognitif Otentik

Lebih jauh dari sekadar merangkul lingkungan keluarga, kolaborasi guru harus diekspansi secara masif untuk melibatkan komunitas masyarakat luas. Pengoperasian kurikulum adaptif dan model pembelajaran berbasis proyek

(*Project-Based Learning / PjBL*) mensyaratkan tersedianya laboratorium sosial yang otentik. Masyarakat di luar sekolah adalah laboratorium nyata tersebut. Guru sebagai inovator tidak boleh lagi mencari sumber belajar secara eksklusif dari buku teks yang statis, melainkan harus lincah menjalin kemitraan strategis dengan beragam elemen komunitas mulai dari praktisi industri, tokoh agama, pelaku UMKM, peneliti lokal, hingga aktivis lingkungan hidup.

Melalui skema pembelajaran terintegrasi ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai penonton pasif di luar pagar sekolah, melainkan diakui sebagai ekosistem kognitif (*cognitive ecosystem*) yang valid dan kaya akan pengetahuan kontekstual. Siswa belajar bahwa ilmu agama (*fikih thaharah* dan *khalifah fil ardhi*) serta ilmu sains-teknologi (IoT dan teknik lingkungan) bukanlah abstraksi teoretis di atas kertas, melainkan instrumen nyata untuk memecahkan problematika kemasyarakatan.

4. Restorasi *Ta'awun*, *Ukhuwah*, dan Aktualisasi Insan Kamil

Kolaborasi yang terencana dan intensif antara guru, orang tua, dan komunitas secara fundamental merestorasi prinsip-prinsip luhur keislaman, khususnya *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa) dan *ukhuwah* (persaudaraan kolektif). Pendidikan tidak lagi dipandang secara sempit sebagai proses mekanis pencetakan tenaga kerja (*labor force*) untuk memenuhi pasar industri kapitalistik, melainkan dihayati sebagai sebuah proyek peradaban (*civilizational project*) yang digotong bersama oleh seluruh elemen umat.

Guru yang inovatif dalam ekosistem Islam menyadari secara penuh keterbatasan otoritas, waktu, dan kapasitas pribadinya. Ia melepaskan beban puitis sebagai pahlawan tunggal dan memosisikan dirinya sebagai seorang dirigen yang mengorkestrasi simfoni pendidikan multi-aktor. Guru memastikan bahwa nada yang dimainkan di dalam ruang kelas

berupa penalaran kritis dan pondasi metodologis, resonansi yang memantul di ruang keluarga berupa pembiasaan adab, kasih sayang, dan pengawasan etis, serta, gaung yang bergema di tengah masyarakat berupa kesempatan aksi sosial dan pengabdian nyata, dapat bertaut harmonis tanpa disonansi. Integrasi simfonik antara guru, orang tua, dan komunitas inilah yang menjadi syarat mutlak bagi lahirnya generasi *Insan Kamil* manusia paripurna yang tidak hanya unggul secara intelektual dan mahir secara teknologis, tetapi juga matang secara emosional, berakar kuat pada tradisi spiritualnya, serta memiliki komitmen sosial yang nyata bagi kemaslahatan semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*).

D. Alat Penilaian Kinerja Guru Inovatif

Transformasi paradigma mengenai peran dan pengembangan profesional guru di era digital tidak akan pernah berdampak pada tataran praksis apabila institusi pendidikan Islam masih menggunakan instrumen evaluasi kinerja yang usang. Selama berdekade-dekade, Alat Penilaian Kinerja Guru (PKG) di banyak madrasah, sekolah Islam, hingga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) terperangkap dalam kerangka rasionalitas-instrumental dan positivisme birokrasi yang kaku. Penilaian kinerja kerap kali direduksi menjadi sekadar daftar centang administratif (*administrative checklists*) yang mengukur kepatuhan formal seperti kelengkapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), presensi kehadiran fisik, atau tingkat ketuntasan penyampaian silabus daripada mengukur kedalaman dampak pedagogis dan transformasi karakter peserta didik (Darling-Hammond, 2013).

Pendekatan reduksionis semacam ini, yang mengakar kuat pada sains manajemen industrial abad ke-20 (*Taylorism*), mereduksi posisi ontologis guru dari seorang *murabbi*, *muaddib*, dan intelektual publik menjadi sekadar operator klerikal. Evaluasi kerja tradisional cenderung difungsikan

sebagai mekanisme pengawasan panoptik (*panoptic surveillance*) yang berorientasi pada kontrol, kepatuhan, dan penghukuman (*punitive*) (Foucault, 1975). Guru dinilai berdasarkan sejauh mana mereka mematuhi petunjuk teknis birokrasi, bukan seberapa berani mereka melakukan eksperimentasi pedagogis untuk memecahkan masalah belajar di kelas.

Dalam ekosistem inovatif yang menempatkan *Maqashid Syariah* dan pedagogi transformatif sebagai landasan filosofis, alat penilaian kinerja guru harus direkonstruksi secara ontologis dan epistemologis. Penilaian kinerja tidak lagi dirancang sebagai alat kontrol eksternal, melainkan direkonseptualisasi sebagai mekanisme *muhasabah* (refleksi diri kritis) yang memberdayakan (*formative-empowering*). Instrumen ini harus mampu menangkap spektrum kinerja guru yang holistik: mulai dari kecakapan mendesain inovasi pedagogi digital, kemampuan memfasilitasi dialog hermeneutis, hingga keteladanan moral (*uswah hasanah*) yang dipancarkan dalam tindakan nyata.

1. Rekonstruksi Ontologis: Dari Pengawasan Panoptik Menuju *Muhasabah* Formatif

Dalam tradisi etika Islam, *muhasabah* adalah proses evaluasi diri yang dilakukan secara penuh kesadaran spiritual untuk mengukur sejauh mana tindakan seseorang telah sejalan dengan nilai-nilai keilahian dan kemaslahatan umum. Ketika prinsip *muhasabah* ditransformasikan ke dalam tata kelola lembaga pendidikan, penilaian kinerja guru mengalami pergeseran makna: dari instrumen penghukuman menjadi sarana penyucian profesi dan pengembangan kapasitas (*tazkiyah wa tarqiyah*).

Alat penilaian kinerja yang membebaskan tidak menuntut kesempurnaan tanpa cela (*flawless performance*), melainkan menghargai proses *ijtihad* pedagogis. Dalam kerangka hukum Islam, seorang *mujtahid* yang berikhtiar

benar-benar memecahkan masalah akan mendapatkan pahala, baik ikhtiarnya mencapai hasil optimal maupun mengalami kegagalan teknis. Penilaian kinerja guru inovatif harus memberikan ruang aman bagi guru untuk melakukan uji coba metodologi baru, mengevaluasi kegagalan penerapan teknologi di kelas, dan melakukan perbaikan secara iteratif tanpa bayang-bayang sanksi administratif.

2. Pergeseran Paradigma Evaluasi Kinerja

Transformasi pendidikan Islam menuntut perubahan cara pandang dalam mengevaluasi kinerja guru. Selama ini, penilaian sering berfokus pada pemenuhan administrasi dan dilakukan secara berkala untuk kepentingan pelaporan. Model tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan kualitas pembelajaran, kreativitas guru, maupun dampaknya terhadap perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, evaluasi perlu diarahkan menjadi proses pembinaan profesional yang berkelanjutan, mendorong guru untuk terus berkembang, berinovasi, dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang dijalankan.

Perubahan paradigma evaluasi kinerja guru dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut.

- a. Paradigma Dasar: Beralih dari pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan administratif menuju pendekatan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai *Maqashid Syariah*.
- b. Sifat Evaluasi: Bergeser dari penilaian sumatif yang dilakukan pada waktu tertentu menjadi evaluasi formatif yang berlangsung secara berkelanjutan sebagai sarana pembinaan dan pengembangan profesional.
- c. Sumber Data: Tidak lagi hanya mengandalkan dokumen administrasi dan hasil supervisi singkat, tetapi juga memanfaatkan portofolio digital, hasil karya peserta

didik, dokumentasi praktik pembelajaran, serta refleksi guru.

- d. Aktor Penilai: Penilaian tidak hanya dilakukan oleh kepala madrasah atau pengawas, tetapi melibatkan rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua melalui pendekatan *360-degree feedback* sehingga hasil evaluasi menjadi lebih objektif dan komprehensif.
- e. Fokus Penilaian: Beralih dari sekadar memeriksa kelengkapan administrasi menuju pengukuran kualitas pembelajaran, kemampuan berinovasi, dampak terhadap peserta didik, serta penerapan etika digital dan nilai-nilai pendidikan Islam.

Melalui perubahan paradigma ini, evaluasi kinerja guru tidak lagi dipandang sebagai instrumen pengawasan, tetapi sebagai bagian dari budaya belajar organisasi yang mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Guru memperoleh ruang untuk berefleksi, menerima masukan, dan terus mengembangkan kompetensinya demi terciptanya pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan berkarakter.

3. Portofolio Digital Berkelanjutan sebagai Jejak Ijtihad Pedagogis

Penilaian kinerja guru pada era pendidikan digital tidak lagi cukup mengandalkan kelengkapan administrasi, seperti perangkat pembelajaran atau laporan supervisi yang disusun pada waktu tertentu. Sistem tersebut sering kali belum mampu menggambarkan kualitas pembelajaran yang sesungguhnya maupun perkembangan kompetensi guru dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih autentik melalui Portofolio Digital Berkelanjutan (*Continuous Digital Portfolio*), yaitu kumpulan bukti nyata yang mendokumentasikan praktik pembelajaran, inovasi, dan refleksi profesional guru secara berkesinambungan.

Portofolio digital terintegrasi dengan *Learning Management System* (LMS) sehingga seluruh proses pembelajaran dapat terdokumentasi secara sistematis. Fokus

utamanya bukan pada kelengkapan dokumen administratif, tetapi pada bukti nyata perkembangan profesional guru. Portofolio tersebut dapat memuat beberapa komponen berikut.

- a. Dokumentasi Praktik Pembelajaran, berupa video, foto, atau rekaman pelaksanaan pembelajaran yang menunjukkan penerapan metode inovatif, pemanfaatan teknologi, serta integrasi nilai-nilai Islam.
- b. Hasil Belajar Peserta Didik, berupa contoh proyek, karya, maupun penilaian yang memperlihatkan perkembangan kemampuan siswa sebagai dampak dari strategi pembelajaran yang diterapkan.
- c. Jurnal Refleksi Guru, berisi evaluasi terhadap keberhasilan, kendala, serta rencana perbaikan pembelajaran, termasuk pengalaman memanfaatkan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) atau *Virtual Reality* (VR).
- d. Bukti Pengembangan Profesional, seperti pelatihan, seminar, penelitian tindakan kelas, publikasi ilmiah, maupun keterlibatan dalam *Professional Learning Communities* (PLC).

Melalui portofolio digital, kinerja guru tidak hanya dinilai berdasarkan hasil akhir, tetapi juga berdasarkan proses belajar, kemampuan berinovasi, kemauan melakukan refleksi, dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam perspektif pendidikan Islam, portofolio ini menjadi sarana *muhasabah* profesional yang mendorong guru untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan menjalankan amanah pendidikan secara lebih berkualitas.

4. Penilaian 360-Derajat Berbasis Komunitas

Peningkatan mutu guru tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengajar di dalam kelas, tetapi juga oleh kemampuan membangun hubungan yang baik dengan seluruh ekosistem pendidikan. Guru berinteraksi setiap hari dengan peserta didik, bekerja sama dengan sesama guru,

berkomunikasi dengan orang tua, serta menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap kinerja guru tidak seharusnya hanya bersumber dari satu pihak, misalnya kepala sekolah atau pengawas. Penilaian yang hanya mengandalkan satu sudut pandang berpotensi menghasilkan kesimpulan yang kurang utuh karena tidak mampu menangkap berbagai aspek yang muncul dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Dalam pendidikan Islam, proses penilaian yang adil memiliki kedekatan dengan prinsip *tabayyun*, yaitu melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap informasi sebelum mengambil keputusan. Prinsip ini mengajarkan bahwa suatu penilaian hendaknya dibangun atas dasar informasi yang lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika prinsip *tabayyun* diterapkan dalam evaluasi guru, maka informasi mengenai kinerja pendidik tidak hanya berasal dari observasi formal, tetapi juga diperoleh melalui berbagai sumber yang saling melengkapi. Pendekatan ini membantu mengurangi subjektivitas sekaligus memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kualitas pembelajaran.

Salah satu pendekatan yang relevan adalah penerapan Penilaian 360-Derajat (*360-Degree Feedback*). Model ini telah banyak digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia karena mampu menghimpun umpan balik dari berbagai pihak yang memiliki hubungan langsung dengan individu yang dinilai. Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan tersebut dapat disesuaikan dengan nilai-nilai kolaborasi, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Tujuannya bukan untuk mencari kelemahan guru, melainkan menjadi sarana refleksi (*muhasabah*) dan perbaikan berkelanjutan.

Penilaian 360-Derajat memandang guru sebagai bagian dari komunitas belajar. Keberhasilan seorang guru tidak hanya diukur dari kemampuan menyampaikan materi, tetapi juga dari

kemampuannya bekerja sama dengan rekan sejawat, membangun komunikasi yang positif dengan peserta didik, serta menghadirkan dampak pendidikan yang dirasakan oleh keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, hasil evaluasi diperoleh melalui triangulasi berbagai sumber sehingga menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan berimbang.

a. Umpan Balik Rekan Sejawat (*Peer Review* melalui *Professional Learning Communities*)

Rekan sejawat merupakan pihak yang paling memahami tantangan profesi guru karena mereka menghadapi situasi pembelajaran yang relatif sama. Oleh sebab itu, masukan dari sesama guru memiliki nilai yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui *Professional Learning Communities* (PLC), guru dapat saling berbagi pengalaman, mengobservasi pembelajaran, mendiskusikan perangkat ajar, dan memberikan saran terhadap strategi yang digunakan di kelas.

Dalam tradisi pendidikan Islam, praktik ini memiliki kesamaan dengan budaya *halaqah*, *mudzarahah*, dan *bahtsul masail*, yaitu forum ilmiah yang mempertemukan para pendidik untuk saling bertukar gagasan, menguji argumentasi, dan mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan. Budaya ilmiah seperti ini membangun semangat belajar sepanjang hayat sekaligus mengurangi kecenderungan guru bekerja secara individual.

Melalui *peer review*, guru dapat memberikan masukan mengenai kesesuaian tujuan pembelajaran dengan kurikulum, kualitas integrasi nilai-nilai Islam dalam mata pelajaran, penggunaan media digital, variasi metode pembelajaran, serta efektivitas asesmen yang diterapkan. Selain itu, observasi sejawat juga dapat membantu mengidentifikasi praktik-praktik baik (*best practices*) yang dapat direplikasi oleh guru lain.

Agar proses ini berjalan efektif, sekolah perlu membangun budaya saling percaya. Masukan yang diberikan

tidak diarahkan untuk menghakimi, tetapi untuk membantu guru berkembang. Dengan demikian, *peer review* menjadi bagian dari budaya belajar profesional yang mendorong inovasi secara berkelanjutan.

b. Umpan Balik Peserta Didik

Peserta didik merupakan pihak yang mengalami secara langsung proses pembelajaran yang dirancang oleh guru. Mereka mengetahui bagaimana guru menjelaskan materi, mengelola kelas, memberikan motivasi, memanfaatkan teknologi, hingga membangun komunikasi selama proses belajar berlangsung. Oleh karena itu, perspektif peserta didik menjadi sumber informasi yang sangat berharga dalam mengevaluasi efektivitas pembelajaran.

Umpan balik dari peserta didik tidak dimaksudkan untuk menilai kepribadian guru, melainkan untuk mengetahui kualitas pengalaman belajar yang mereka rasakan. Beberapa aspek yang dapat dievaluasi meliputi kejelasan penyampaian materi, kesempatan untuk berdiskusi, keterbukaan guru terhadap pertanyaan, penggunaan teknologi yang mendukung pembelajaran, serta kemampuan guru menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menghargai keberagaman.

Dalam pendidikan Islam, guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membimbing peserta didik agar mampu memahami makna ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, evaluasi dari peserta didik juga dapat menggambarkan sejauh mana guru berhasil menghubungkan materi pelajaran dengan nilai-nilai Islam, kehidupan sosial, maupun tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini.

Pada era digital, aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan guru menciptakan lingkungan belajar yang aman di ruang virtual. Peserta didik dapat memberikan penilaian mengenai bagaimana guru mengelola diskusi daring, mencegah *cyberbullying*, menjaga etika

komunikasi digital, serta memberikan pendampingan ketika peserta didik mengalami kesulitan belajar.

c. Umpan Balik Orang Tua dan Komunitas

Pendidikan tidak berhenti ketika peserta didik meninggalkan ruang kelas. Nilai-nilai yang dipelajari di sekolah diharapkan tercermin dalam perilaku mereka di rumah dan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, orang tua memiliki posisi yang sangat penting dalam memberikan informasi mengenai dampak pembelajaran terhadap perkembangan anak.

Melalui komunikasi yang terstruktur, orang tua dapat memberikan masukan mengenai perubahan sikap, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian sosial, kebiasaan belajar, maupun etika penggunaan teknologi yang ditunjukkan oleh anak setelah mengikuti pembelajaran di sekolah. Informasi tersebut menjadi pelengkap bagi hasil observasi yang dilakukan di lingkungan sekolah.

Selain orang tua, masyarakat juga dapat menjadi bagian dari proses evaluasi, terutama pada lembaga pendidikan Islam yang aktif melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, praktik kerja lapangan, atau program pemberdayaan sosial. Tokoh masyarakat, pengurus masjid, pembina organisasi kepemudaan, maupun mitra sekolah dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana peserta didik menerapkan nilai-nilai yang diperoleh dari gurunya dalam kehidupan nyata.

Masukan dari komunitas menjadi indikator penting karena keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kontribusi nyata peserta didik terhadap lingkungan. Ketika masyarakat merasakan adanya perubahan positif dalam perilaku, kepedulian sosial, dan akhlak peserta didik, hal tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Agar Penilaian 360-Derajat memberikan manfaat yang maksimal, seluruh hasil evaluasi perlu dianalisis secara terpadu. Informasi dari kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua tidak diposisikan sebagai penilaian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sumber data yang saling melengkapi. Apabila berbagai sumber menunjukkan temuan yang sama, maka hasil tersebut dapat dijadikan dasar dalam menyusun program pengembangan profesional guru.

Pendekatan ini juga mendorong terbentuknya budaya refleksi di lingkungan sekolah. Guru memperoleh kesempatan untuk memahami bagaimana pembelajaran yang dirancangnya dipersepsikan oleh berbagai pihak. Sebaliknya, sekolah memperoleh data yang lebih akurat untuk menentukan kebutuhan pelatihan, pendampingan, maupun pengembangan kompetensi guru pada masa mendatang.

5. Integrasi Rubrik Evaluasi Berbasis *Maqashid Syariah* dan Etika Digital

Perubahan paradigma pembelajaran pada era digital menuntut perubahan pula pada sistem penilaian kinerja guru. Selama ini, evaluasi guru sering kali masih berfokus pada aspek administratif, seperti kelengkapan perangkat pembelajaran, jumlah pelatihan yang diikuti, atau kemampuan menggunakan media digital tertentu. Padahal, ukuran tersebut belum tentu mencerminkan kualitas pembelajaran yang sesungguhnya. Seorang guru dapat menguasai berbagai aplikasi pembelajaran, menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), atau menerapkan *Virtual Reality* (VR) di kelas, tetapi jika proses pembelajaran tersebut tidak membentuk karakter peserta didik, tidak menumbuhkan sikap kritis, dan bahkan mengabaikan etika digital, maka inovasi tersebut belum dapat dikatakan berhasil.

Dalam perspektif pendidikan Islam, keberhasilan guru tidak hanya diukur dari kecakapan teknis, tetapi juga dari kemampuannya membimbing peserta didik menuju

perkembangan intelektual, spiritual, sosial, dan moral secara seimbang. Oleh karena itu, evaluasi kinerja guru inovatif memerlukan instrumen yang lebih komprehensif. Penilaian tidak cukup berorientasi pada hasil belajar akademik atau penggunaan teknologi, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mendukung tujuan pendidikan Islam yang berlandaskan nilai-nilai *Maqashid Syariah*.

Maqashid Syariah memberikan kerangka etik yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun rubrik evaluasi guru. Kerangka ini membantu lembaga pendidikan memastikan bahwa setiap inovasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan kepribadian mereka. Dengan demikian, teknologi dipandang sebagai sarana pendidikan, bukan tujuan akhir pendidikan.

Prinsip utama dalam evaluasi berbasis *Maqashid Syariah* adalah bahwa keberhasilan inovasi pembelajaran tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan oleh manfaat yang dihasilkan bagi manusia. Penggunaan *Learning Management System* (LMS), AI, *virtual laboratory*, atau media digital lainnya harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat karakter, menjaga martabat peserta didik, serta memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan. Apabila teknologi justru menimbulkan ketergantungan, mengurangi interaksi manusiawi, atau membuka peluang penyalahgunaan data dan perilaku tidak etis, maka inovasi tersebut perlu dievaluasi kembali.

Berdasarkan prinsip tersebut, rubrik evaluasi guru dapat dikembangkan melalui empat dimensi utama yang saling melengkapi.

Pertama, perlindungan agama dan pembentukan adab (*Hifz al-Din*). Evaluasi tidak hanya melihat kemampuan guru

menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga bagaimana nilai-nilai Islam hadir secara alami dalam proses pembelajaran. Guru diharapkan mampu menghubungkan materi pelajaran dengan nilai tauhid, kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan kepedulian sosial tanpa menjadikan pembelajaran bersifat indoktrinatif. Dalam pembelajaran digital, guru juga perlu menanamkan etika bermedia, seperti menghargai karya orang lain, menghindari plagiarisme, menjaga sopan santun dalam komunikasi daring, serta membiasakan peserta didik melakukan tabayyun sebelum menyebarkan informasi.

Indikator pada dimensi ini dapat meliputi kemampuan guru mengintegrasikan nilai karakter ke dalam pembelajaran, membimbing siswa menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, memberikan keteladanan dalam penggunaan media sosial, serta membangun budaya digital yang santun di lingkungan sekolah.

Kedua, perlindungan akal (*Hifz al-'Aql*). Salah satu tantangan terbesar pada era kecerdasan buatan adalah munculnya kecenderungan peserta didik menerima informasi secara instan tanpa proses berpikir kritis. Oleh karena itu, guru perlu dievaluasi berdasarkan kemampuannya mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*), literasi informasi, dan literasi digital.

Guru yang baik tidak sekadar mengajarkan cara menggunakan AI, tetapi juga mengajarkan kapan AI boleh digunakan, bagaimana memverifikasi hasilnya, bagaimana mengenali bias algoritma, serta bagaimana membedakan informasi yang valid dengan hoaks atau manipulasi digital. Dalam konteks ini, teknologi menjadi alat untuk memperkuat kemampuan berpikir peserta didik, bukan menggantikan proses berpikir tersebut.

Rubrik evaluasi pada aspek ini dapat mencakup kemampuan guru membangun diskusi kritis, memberikan

tugas berbasis pemecahan masalah, melatih peserta didik melakukan verifikasi informasi, serta membimbing penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab.

Ketiga, perlindungan jiwa dan kehormatan peserta didik (*Hifz al-Nafs wa al-'Irdh*). Pembelajaran digital membuka peluang yang lebih luas untuk belajar, tetapi juga menghadirkan berbagai risiko baru, seperti *cyberbullying*, penyebaran ujaran kebencian, pencurian identitas digital, kecanduan gawai, hingga kelelahan mental akibat penggunaan teknologi secara berlebihan. Oleh sebab itu, guru perlu memiliki kompetensi dalam menciptakan lingkungan belajar digital yang aman, sehat, dan inklusif.

Evaluasi guru tidak hanya melihat kemampuan mengelola kelas secara tatap muka, tetapi juga kemampuan mengelola interaksi pada kelas virtual. Guru perlu mampu membangun komunikasi yang positif, mencegah terjadinya diskriminasi dalam forum daring, memberikan pendampingan kepada peserta didik yang mengalami tekanan psikologis, serta menjaga kerahasiaan data pribadi siswa.

Indikator evaluasi pada dimensi ini dapat berupa kemampuan membangun budaya saling menghormati, menangani konflik digital secara bijaksana, menjaga keamanan data peserta didik, serta memperhatikan kesejahteraan psikologis siswa selama mengikuti pembelajaran daring maupun hibrida.

Keempat, perlindungan harta dan lingkungan (*Hifz al-Mal wa al-Bi'ah*). Penggunaan teknologi juga harus memperhatikan efisiensi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Guru didorong menggunakan sumber belajar digital secara hemat, memanfaatkan perangkat lunak legal, mengurangi penggunaan kertas melalui digitalisasi dokumen, serta mengembangkan pembelajaran yang menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Selain itu, guru perlu memastikan bahwa inovasi pembelajaran tidak memperbesar kesenjangan sosial. Penggunaan aplikasi yang membutuhkan perangkat mahal atau koneksi internet berkecepatan tinggi perlu dipertimbangkan kembali apabila sebagian peserta didik belum memiliki akses yang sama. Inovasi yang baik adalah inovasi yang dapat diakses oleh seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Dalam praktiknya, sekolah dapat menyusun instrumen evaluasi yang memadukan observasi kelas, refleksi guru, umpan balik peserta didik, penilaian kepala sekolah, serta portofolio pembelajaran digital. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih utuh dibandingkan hanya mengandalkan supervisi sesaat atau pemeriksaan administrasi pembelajaran.

Sebagai contoh, seorang guru mungkin mampu merancang pembelajaran berbasis AI yang menarik dan menghasilkan presentasi interaktif. Namun selama proses pembelajaran, ia tidak memberikan arahan mengenai etika penggunaan AI, membiarkan peserta didik menyalin jawaban secara utuh tanpa analisis, serta mengabaikan perilaku saling mengejek dalam forum diskusi daring. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan teknologinya memang tinggi, tetapi kualitas pembelajarannya masih memerlukan perbaikan. Sebaliknya, guru yang menggunakan teknologi sederhana namun berhasil membangun budaya diskusi yang santun, melatih peserta didik berpikir kritis, serta menjaga keamanan ruang belajar digital menunjukkan kualitas profesional yang lebih sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

Evaluasi berbasis *Maqashid Syariah* juga perlu dipandang sebagai proses pembinaan, bukan sekadar proses penilaian. Hasil evaluasi hendaknya menjadi dasar penyusunan program pengembangan profesional guru, baik melalui pelatihan, pendampingan, komunitas belajar, maupun refleksi bersama. Dengan cara ini, evaluasi tidak menimbulkan

rasa takut atau tekanan administratif, tetapi menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, integrasi rubrik evaluasi berbasis *Maqashid Syariah* dan etika digital merupakan langkah penting dalam membangun sistem penjaminan mutu pendidikan Islam yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini menghindarkan lembaga pendidikan dari penilaian yang hanya berorientasi pada aspek teknis, sekaligus memastikan bahwa setiap inovasi pembelajaran tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Guru tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuannya mengoperasikan teknologi, tetapi juga berdasarkan kemampuannya membimbing peserta didik menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, budaya mutu yang dibangun bukan sekadar budaya administrasi, melainkan budaya pembelajaran yang berkelanjutan, beretika, dan berorientasi pada pengembangan manusia secara utuh.

G. Simpulan

Bab ini membahas rekonstruksi peran guru di tengah disrupsi digital, mencakup pengembangan profesional berkelanjutan, transformasi guru sebagai fasilitator, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, serta alat penilaian kinerja inovatif.

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) menjadi keharusan di era perubahan cepat. CPD efektif bersifat berkelanjutan, terintegrasi dengan praktik mengajar, dan dilakukan melalui Professional Learning Communities (PLC) yang merevitalisasi tradisi halaqah dan bahtsul masail. CPD harus menyeimbangkan peningkatan kompetensi teknis (maharah) dan pembinaan spiritual (tazkiyatun nafs).

Guru bertransformasi dari pengajar tradisional (sage on the stage) menjadi fasilitator (guide on the side) berdasarkan

hermeneutika Gadamer tentang peleburan cakrawala. Fasilitator mengorkestrasi dialog antara pra-pemahaman siswa dengan cakrawala teks klasik, tanpa kehilangan otoritas sebagai penjaga gawang epistemologis dan muaddib. Re-kalibrasi otoritas ini menjawab keraguan teologis bahwa fasilitasi tidak berarti relativisme.

Kolaborasi tri-pusat pendidikan (guru, orang tua, komunitas) membangun bi'ah shalihah melalui: (1) transformasi orang tua sebagai ko-fasilitator dalam blended learning; (2) komunitas sebagai laboratorium sosial dan ekosistem kognitif otentik; dan (3) restorasi prinsip ta'awun, ukhuwah, dan aktualisasi Insan Kamil.

Alat penilaian kinerja guru direkonstruksi dari pengawasan panoptik menuju muhasabah formatif melalui: (1) portofolio digital berkelanjutan sebagai jejak ijtihad pedagogis; (2) penilaian 360-derajat berbasis komunitas (peer review, umpan balik siswa, orang tua); dan (3) integrasi rubrik evaluasi berbasis Maqashid Syariah dan etika digital (hifz al-din, hifz al-'aql, hifz al-nafs wa al-'irdh, hifz al-mal wa al-bi'ah).

H. Soal Latihan

1. Rancangan Program CPD

Rancanglah program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) untuk guru PAI di sebuah madrasah! Program harus: (a) berbasis kebutuhan, (b) kolaboratif (PLC), (c) terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, (d) mencakup peningkatan literasi digital dan pedagogi inovatif, serta (e) memiliki mekanisme evaluasi dampak. (CPMK2, CPMK4)

2. Simulasi Peran Fasilitator

Pilihlah satu topik kontroversial dalam pendidikan Islam (misalnya: penggunaan AI dalam fatwa, atau reinterpretasi hadis tentang kepemimpinan perempuan)!

Rancang skenario pembelajaran di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mengorkestrasi peleburan cakrawala antara pra-pemahaman siswa dan teks klasik. Sertakan pertanyaan-pertanyaan sokratik yang diajukan. (CPMK2, CPMK3)

3. Proyek Kolaborasi Tri-Pusat

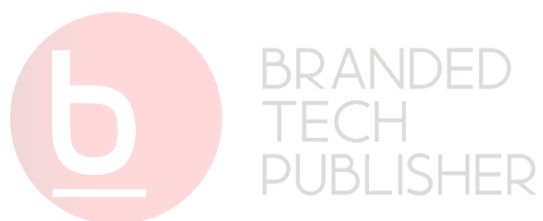
Rancanglah program kolaborasi antara guru, orang tua, dan komunitas untuk mengatasi satu isu pendidikan (misalnya: kecanduan gadget, rendahnya literasi Al-Qur'an, atau perundungan siber)! Sertakan: (a) analisis isu, (b) peran masing-masing pihak, (c) aktivitas kolaboratif, (d) strategi komunikasi, dan (e) mekanisme evaluasi. (CPMK2, CPMK4)

4. Desain Instrumen Penilaian Kinerja

Kembangkanlah alat penilaian kinerja guru inovatif berbasis Maqashid Syariah dan etika digital! Sertakan: (a) rubrik evaluasi dengan 4 dimensi (hifz al-din, hifz al-'aql, hifz al-nafs wa al-'irdh, hifz al-mal wa al-bi'ah), (b) mekanisme portofolio digital, (c) format penilaian 360-derajat, dan (d) pedoman penggunaan untuk pengembangan profesional. (CPMK2, CPMK4)

5. Studi Kasus Kepemimpinan Guru

Carilah satu contoh guru inovatif di lembaga pendidikan Islam (bisa dari pengalaman atau literatur)! Analisis: (a) peran yang dijalankan (mu'allim, murabbi, muaddib), (b) strategi fasilitasi yang digunakan, (c) kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, (d) dampak terhadap peserta didik, dan (e) pelajaran yang dapat dipetik. (CPMK1, CPMK3)



BAB VII

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG INOVASI PENDIDIKAN

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Merancang konsep *Smart School* dan kampus digital yang mengintegrasikan ruang belajar fisik, infrastruktur digital, dan tata kelola yang inklusif.
2. Menganalisis tantangan kesenjangan digital (*digital divide*) dan merumuskan strategi pemerataan akses internet dan perangkat berdasarkan kondisi lokal.
3. Mengelola skema pendanaan dan kemitraan publik-privat (*Public-Private Partnership*) serta filantropi Islam (*zakat, wakaf, infak*) untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan.
4. Mengevaluasi studi kasus sekolah inovatif di Indonesia untuk mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan dan hambatan implementasi infrastruktur.

A. Pembangunan *Smart School* dan Kampus Digital

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam cara lembaga pendidikan mengelola proses pembelajaran dan layanan akademik. Konsep *smart school* dan kampus digital muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem pendidikan yang lebih adaptif, efisien, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan. Namun, penerapan konsep tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya perangkat digital yang dimiliki atau tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan. Keberhasilan sebuah *smart school* justru ditentukan oleh kemampuannya memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki proses belajar, memperkuat hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga.

Dalam praktiknya, sebagian lembaga masih memandang digitalisasi sebagai proses pengadaan perangkat keras semata. Investasi difokuskan pada pembangunan jaringan internet, pemasangan layar interaktif, kamera pengawas, atau perangkat komputer tanpa disertai perubahan dalam budaya belajar dan tata kelola pendidikan. Akibatnya, teknologi hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak dapat dilepaskan dari perubahan cara berpikir, strategi pembelajaran, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Bagi pendidikan Islam, pembangunan *smart school* memiliki tujuan yang lebih mendasar, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus pembinaan karakter. Teknologi diposisikan sebagai sarana untuk memperluas akses terhadap ilmu, memperkuat interaksi akademik, dan mempermudah layanan pendidikan, bukan sebagai tujuan akhir dari proses

transformasi. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur digital tetap berada dalam kerangka nilai-nilai pendidikan Islam yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh aktivitas pembelajaran.

1. Merancang Ruang Belajar yang Fleksibel dan Terintegrasi

Perubahan pola pembelajaran menuntut perubahan dalam desain ruang belajar. Kelas tidak lagi hanya digunakan untuk menyampaikan materi secara satu arah, tetapi menjadi ruang kolaborasi, diskusi, pemecahan masalah, dan pengembangan kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, desain ruang belajar perlu memberikan fleksibilitas sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai metode pembelajaran yang digunakan.

Pengaturan tempat duduk yang mudah diubah, ketersediaan akses internet yang stabil, perangkat presentasi digital, serta fasilitas pendukung diskusi kelompok menjadi bagian penting dari lingkungan belajar modern. Di lingkungan pesantren maupun madrasah, ruang belajar juga dapat tetap mempertahankan tradisi halaqah atau musyawarah sambil memanfaatkan teknologi untuk memperkaya proses pembelajaran. Perpaduan antara pendekatan tradisional dan fasilitas digital memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih beragam tanpa kehilangan karakter pendidikan Islam.

Integrasi ruang fisik dengan ruang digital juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengakses sumber belajar kapan pun diperlukan. Perpustakaan digital, koleksi kitab elektronik, jurnal ilmiah, maupun materi pembelajaran daring dapat menjadi pelengkap pembelajaran tatap muka sehingga proses belajar tidak berhenti ketika kegiatan di kelas selesai.

2. Membangun Infrastruktur yang Inklusif

Pembangunan infrastruktur pendidikan perlu memperhatikan prinsip pemerataan akses. Transformasi digital akan kehilangan maknanya apabila hanya dapat dinikmati oleh sebagian peserta didik, sementara kelompok lain masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, konsep *smart school* perlu dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.

Penerapan prinsip *Universal Design for Learning* dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara. Penyediaan perangkat pembaca layar, teks otomatis untuk materi audiovisual, aksesibilitas ruang kelas, serta platform pembelajaran yang ramah bagi berbagai kelompok pengguna merupakan contoh langkah yang dapat dilakukan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Lembaga pendidikan dapat menyediakan ruang belajar bersama, akses internet yang dapat dimanfaatkan peserta didik di luar jam sekolah, maupun layanan perpustakaan digital yang dapat diakses oleh masyarakat. Pendekatan ini memperluas fungsi lembaga pendidikan sebagai pusat pembelajaran yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

3. Mengembangkan Tata Kelola Digital

Infrastruktur pendidikan tidak hanya mencakup fasilitas pembelajaran, tetapi juga sistem pengelolaan lembaga. Digitalisasi administrasi membantu mempercepat berbagai layanan akademik sekaligus meningkatkan akurasi pengelolaan data. Pendaftaran peserta didik, pengelolaan nilai, absensi, jadwal pembelajaran, hingga layanan keuangan dapat dikelola melalui sistem yang saling terintegrasi sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif.

Pemanfaatan sistem informasi juga memungkinkan pimpinan lembaga memperoleh data yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi mengenai perkembangan hasil belajar, kehadiran peserta didik, penggunaan fasilitas, maupun kebutuhan pengembangan sumber daya dapat dianalisis secara lebih cepat sehingga kebijakan yang diambil memiliki dasar yang lebih kuat.

Bagi para pendidik, sistem administrasi yang terintegrasi membantu mengurangi pekerjaan administratif yang berulang. Waktu yang sebelumnya digunakan untuk pengelolaan dokumen dapat dialihkan pada kegiatan yang lebih berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, pendampingan peserta didik, pengembangan bahan ajar, maupun kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengembangan *smart school* dan kampus digital pada akhirnya merupakan bagian dari proses membangun ekosistem pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Teknologi menjadi sarana untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan, sementara nilai-nilai keislaman tetap menjadi landasan dalam setiap proses pengembangannya. Dengan dukungan infrastruktur yang dirancang secara matang, lembaga pendidikan Islam akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan sekaligus mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan pada masa depan.

B. Akses Internet dan Perangkat untuk Semua Siswa

Keberhasilan transformasi digital dalam pendidikan sangat bergantung pada pemerataan akses terhadap teknologi. Kurikulum berbasis digital, pembelajaran hibrida, maupun pemanfaatan berbagai platform pendidikan hanya dapat berjalan secara optimal apabila seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengaksesnya. Apabila akses terhadap internet dan perangkat belajar masih terbatas pada kelompok tertentu, maka inovasi yang dirancang untuk

meningkatkan kualitas pendidikan justru berpotensi melahirkan kesenjangan baru. Oleh karena itu, pemerataan akses harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda peningkatan mutu pendidikan Islam.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesiapan setiap lembaga pendidikan masih sangat beragam. Madrasah dan pesantren di wilayah perkotaan umumnya lebih mudah memperoleh jaringan internet berkecepatan tinggi, perangkat pembelajaran digital, serta dukungan teknis yang memadai. Sebaliknya, banyak lembaga di daerah pedesaan atau wilayah 3T masih menghadapi persoalan mendasar, seperti keterbatasan jaringan internet, pasokan listrik yang belum stabil, minimnya perangkat komputer, hingga tingginya biaya akses internet. Perbedaan kondisi tersebut berdampak langsung pada kesempatan belajar peserta didik. Mereka yang memiliki akses digital dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar global, sedangkan peserta didik yang tidak memiliki fasilitas serupa harus belajar dengan sumber yang jauh lebih terbatas.

Dalam perspektif pendidikan Islam, kesenjangan akses terhadap teknologi tidak hanya berkaitan dengan persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pemerataan kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan. Islam menempatkan pencarian ilmu sebagai hak sekaligus kewajiban yang harus didukung oleh lingkungan yang memungkinkan setiap individu berkembang secara optimal. Karena itu, penyediaan akses internet dan perangkat pembelajaran menjadi bagian dari ikhtiar mewujudkan keadilan dalam pendidikan. Upaya tersebut tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan kondisi seluruh lembaga, melainkan memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, mengembangkan potensi, dan memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan yang tersedia.

1. Mewujudkan Pemerataan Akses sebagai Prioritas Pengembangan

Pemerataan akses perlu menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pengembangan pendidikan digital. Pembangunan infrastruktur sebaiknya tidak hanya difokuskan pada lembaga yang telah memiliki kesiapan tinggi, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada madrasah dan pesantren yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Pendekatan ini penting agar transformasi digital tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil lembaga pendidikan.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah pemetaan kebutuhan berdasarkan kondisi masing-masing daerah. Data mengenai kualitas jaringan internet, jumlah perangkat yang tersedia, kondisi listrik, serta kemampuan ekonomi peserta didik perlu menjadi dasar dalam penyusunan program. Dengan pemetaan tersebut, bantuan yang diberikan akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Selain pembangunan infrastruktur, lembaga juga perlu menyediakan mekanisme peminjaman perangkat bagi peserta didik yang belum memiliki gawai atau komputer pribadi. Sistem perpustakaan perangkat (*device lending*) dapat menjadi solusi yang relatif mudah diterapkan sehingga peserta didik tetap dapat mengikuti proses pembelajaran tanpa terbebani oleh keterbatasan ekonomi keluarga.

2. Mengoptimalkan Filantropi dan Kemitraan untuk Mendukung Infrastruktur

Pemenuhan kebutuhan perangkat dan jaringan internet memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada orang tua peserta didik ataupun kepada lembaga pendidikan. Dibutuhkan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga sosial, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan pendidikan.

Dalam tradisi Islam, berbagai instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Selama ini, pemanfaatan dana tersebut lebih banyak diarahkan pada pembangunan sarana fisik. Ke depan, pengelolaannya dapat diperluas untuk mendukung kebutuhan infrastruktur digital, seperti penyediaan komputer, tablet, jaringan internet, pusat belajar digital, maupun bantuan kuota bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Selain filantropi, kerja sama dengan perusahaan, perguruan tinggi, penyedia layanan internet, serta organisasi kemasyarakatan juga dapat memberikan manfaat yang besar. Program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), hibah perangkat, maupun pendampingan teknologi dapat mempercepat pemerataan akses sekaligus memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dengan berbagai pemangku kepentingan.

3. Mengembangkan Solusi Teknologi yang Sesuai dengan Kondisi Lokal

Tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengadopsi teknologi berkecepatan tinggi. Karena itu, strategi pengembangan infrastruktur perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan kemampuan masing-masing lembaga. Pendekatan yang sederhana tetapi berfungsi dengan baik sering kali memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan penerapan teknologi yang mahal namun sulit dipelihara.

Di wilayah yang memiliki keterbatasan jaringan internet, misalnya, madrasah dan pesantren dapat memanfaatkan server lokal yang berisi berbagai bahan ajar digital. Buku elektronik, video pembelajaran, modul interaktif, koleksi kitab digital, serta berbagai sumber belajar lainnya dapat diakses melalui jaringan lokal tanpa memerlukan koneksi internet secara terus-menerus. Sistem seperti ini membantu mengurangi biaya

operasional sekaligus memastikan bahwa peserta didik tetap memperoleh akses terhadap sumber belajar yang berkualitas.

Lembaga juga dapat mengembangkan pembelajaran yang mengombinasikan materi daring dan luring sesuai dengan kondisi yang tersedia. Guru dapat mendistribusikan materi melalui media penyimpanan digital, jaringan lokal, atau aplikasi yang dapat digunakan secara *offline*. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas bagi peserta didik yang belum dapat mengakses internet setiap saat.

4. Meningkatkan Literasi Digital Bersama Akses Teknologi

Pemerataan akses akan memberikan hasil yang lebih optimal apabila diikuti dengan peningkatan literasi digital bagi seluruh warga sekolah. Kepemilikan perangkat dan jaringan internet belum tentu menghasilkan pembelajaran yang berkualitas apabila peserta didik maupun pendidik belum mampu memanfaatkannya secara efektif.

Program literasi digital perlu mencakup kemampuan mencari informasi yang valid, menggunakan platform pembelajaran, menjaga keamanan data pribadi, berkomunikasi secara etis di ruang digital, serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan akademik. Dengan demikian, teknologi tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Guru juga perlu memperoleh pelatihan yang berkelanjutan agar mampu mengembangkan pembelajaran digital sesuai dengan kondisi peserta didik. Kemampuan memilih aplikasi yang ringan, menyusun materi yang dapat diakses melalui berbagai perangkat, serta mengelola kelas digital menjadi kompetensi yang semakin penting dalam mendukung pemerataan akses pendidikan.

Penyediaan akses internet dan perangkat pembelajaran pada akhirnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemerataan

akses bukan hanya persoalan menyediakan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kolaborasi berbagai pihak, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal, pendidikan Islam dapat membangun ekosistem digital yang menjangkau seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat mereka belajar.

C. Pendanaan dan Kemitraan Publik–Privat

Transformasi pendidikan tidak hanya membutuhkan gagasan yang visioner, tetapi juga dukungan sumber daya yang memadai. Berbagai bentuk inovasi, mulai dari pembangunan ruang belajar digital, penyediaan perangkat teknologi, pengembangan platform pembelajaran, hingga peningkatan kompetensi pendidik, memerlukan pembiayaan yang berkelanjutan. Tanpa dukungan finansial yang kuat, berbagai program pembaruan sering kali berhenti pada tahap perencanaan atau hanya dapat dijalankan dalam skala terbatas.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi banyak lembaga pendidikan Islam. Sebagian madrasah dan pesantren masih mengandalkan sumber pendanaan tradisional, seperti bantuan pemerintah, iuran peserta didik, serta dukungan masyarakat sekitar. Meskipun sumber-sumber tersebut memiliki peran penting, jumlahnya sering kali belum mampu mengimbangi kebutuhan pengembangan lembaga yang terus meningkat. Di sisi lain, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga kebutuhan pembaruan perangkat, jaringan, maupun sistem informasi juga terus bertambah dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, keberlanjutan inovasi pendidikan memerlukan pola pembiayaan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan. Salah satu pendekatan yang semakin banyak dikembangkan adalah kemitraan antara

pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal. Dalam konteks pendidikan Islam, kemitraan tersebut bukan sekadar upaya mencari tambahan dana, tetapi merupakan bentuk kerja sama untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan, memperluas akses belajar, dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

1. Membangun Kemitraan yang Berlandaskan Kepentingan Pendidikan

Kemitraan publik–privat (*Public-Private Partnership* atau PPP) dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat pengembangan infrastruktur pendidikan. Namun, kerja sama semacam ini harus dibangun di atas prinsip saling menghormati serta memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Dunia usaha tidak ditempatkan semata-mata sebagai penyedia dana atau penjual produk, melainkan sebagai mitra yang ikut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik.

Dalam praktiknya, kemitraan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti pembangunan laboratorium komputer, penyediaan jaringan internet, pengembangan perpustakaan digital, pelatihan guru, penyediaan perangkat lunak pendidikan, maupun pendampingan transformasi digital di tingkat sekolah. Kerja sama tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila disertai dengan transfer pengetahuan sehingga lembaga pendidikan mampu mengelola dan mengembangkan fasilitas yang dimiliki secara mandiri.

Meski demikian, setiap bentuk kerja sama tetap memerlukan batas yang jelas. Lembaga pendidikan harus menjaga independensi dalam menentukan kurikulum, metode pembelajaran, maupun arah pengembangan kelembagaan. Kemitraan tidak boleh mengubah orientasi pendidikan menjadi sekadar kepentingan komersial ataupun menjadikan peserta didik sebagai sasaran pemasaran produk tertentu.

2. Mengembangkan Skema Pendanaan yang Beragam

Ketergantungan pada satu sumber pembiayaan membuat lembaga pendidikan menjadi rentan ketika terjadi perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi. Karena itu, diversifikasi sumber pendanaan menjadi strategi yang penting untuk menjaga keberlanjutan program inovasi.

Selain dukungan pemerintah melalui berbagai program bantuan pendidikan, lembaga dapat mengembangkan kerja sama dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), lembaga zakat, badan wakaf, yayasan sosial, organisasi kemasyarakatan, hingga alumni. Setiap pihak memiliki potensi untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya, baik dalam bentuk dana, fasilitas, keahlian, maupun jaringan kerja sama.

Dalam tradisi Islam, instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki ruang yang sangat luas untuk mendukung pengembangan pendidikan. Pengelolaan wakaf produktif, misalnya, dapat diarahkan untuk membiayai pembangunan laboratorium, pusat teknologi informasi, perpustakaan digital, maupun beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan. Pendekatan semacam ini menjadikan filantropi tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sesaat, tetapi sebagai investasi sosial yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Di samping itu, perkembangan keuangan syariah juga membuka peluang bagi lahirnya berbagai model pembiayaan yang lebih inovatif, seperti dana investasi sosial, sukuk sosial, maupun berbagai skema pembiayaan berbasis dampak (*impact financing*). Pemanfaatan instrumen tersebut memungkinkan lembaga pendidikan memperoleh dukungan pendanaan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

3. Membangun Tata Kelola Kemitraan yang Transparan

Keberhasilan kemitraan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diperoleh, tetapi juga oleh kualitas tata

kelola yang diterapkan. Setiap bentuk kerja sama harus didasarkan pada perencanaan yang jelas, pembagian peran yang proporsional, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi aspek yang sangat penting. Laporan penggunaan dana, capaian program, serta dampak yang dihasilkan perlu disampaikan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini bukan hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga mendorong lahirnya budaya akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

Selain transparansi, evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik. Kemitraan yang baik bukan diukur dari banyaknya nota kesepahaman yang ditandatangani, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan oleh sekolah, guru, dan peserta didik.

4. Menjaga Keseimbangan antara Inovasi dan Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, lembaga pendidikan Islam perlu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap inovasi dan komitmen terhadap nilai-nilai yang menjadi identitasnya. Teknologi, sumber pendanaan, maupun dukungan dari sektor swasta merupakan sarana untuk memperkuat proses pendidikan, bukan tujuan akhir yang harus dikejar tanpa batas.

Setiap bentuk kemitraan hendaknya tetap berorientasi pada kemaslahatan bersama. Keputusan yang diambil perlu mempertimbangkan keberlanjutan program, keadilan akses bagi seluruh peserta didik, perlindungan terhadap data dan privasi, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dengan demikian, modernisasi tidak berjalan dengan mengorbankan karakter lembaga, melainkan memperkuat kemampuannya dalam menjalankan fungsi pendidikan.

Kemitraan publik–privat yang dikelola secara sehat memberikan peluang besar bagi pendidikan Islam untuk berkembang lebih cepat tanpa kehilangan jati dirinya. Dukungan pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi, masyarakat, dan komunitas pendidikan dapat saling melengkapi dalam membangun ekosistem yang lebih kuat. Ketika kolaborasi tersebut dibangun atas dasar kepercayaan, transparansi, dan tujuan yang sama, inovasi tidak lagi bergantung pada kemampuan satu lembaga semata, tetapi menjadi gerakan bersama yang membuka lebih banyak kesempatan bagi lahirnya pendidikan Islam yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing.

D. Simpulan

Bab ini membahas infrastruktur pendukung inovasi pendidikan Islam, mencakup pembangunan smart school dan kampus digital, pemerataan akses internet dan perangkat, serta pendanaan dan kemitraan publik-privat.

Smart School dan kampus digital memerlukan: (1) ruang belajar yang fleksibel dan terintegrasi, menggabungkan tradisi halaqah dengan fasilitas digital; (2) infrastruktur inklusif berdasarkan Universal Design for Learning; dan (3) tata kelola digital yang mengintegrasikan administrasi akademik, pembelajaran, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Pemerataan akses internet dan perangkat untuk semua siswa mengatasi digital divide melalui: (1) pemetaan kebutuhan berbasis kondisi daerah; (2) optimalisasi filantropi (zakat, wakaf, infak) dan kemitraan; (3) pengembangan solusi teknologi sesuai kondisi lokal (server lokal, offline digital library); dan (4) peningkatan literasi digital bersama akses teknologi.

Pendanaan dan kemitraan publik-privat dikelola melalui: (1) kemitraan berlandaskan kepentingan pendidikan, bukan komersial; (2) diversifikasi skema pendanaan (CSR, filantropi Islam, impact financing, sukuk sosial); (3) tata kelola

kemitraan yang transparan dan akuntabel; dan (4) keseimbangan antara inovasi dan nilai-nilai pendidikan Islam.

E. Soal Latihan

1. Desain Smart School

Rancanglah konsep Smart School untuk sebuah madrasah atau pesantren! Sertakan: (a) desain ruang belajar fleksibel, (b) integrasi infrastruktur digital, (c) tata kelola digital yang terintegrasi, (d) prinsip inklusivitas, dan (e) rencana implementasi bertahap. (CPMK2, CPMK4)

2. Strategi Pemerataan Akses

Buatlah makalah strategi pemerataan akses internet dan perangkat untuk siswa di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)! Sertakan: (a) analisis kondisi dan kebutuhan, (b) solusi teknologi sesuai kondisi lokal (server lokal, offline content), (c) skema pendanaan dan kemitraan, (d) program literasi digital, dan (e) mekanisme monitoring dan evaluasi. (CPMK1, CPMK3)

3. Proyek Filantropi Digital

Rancanglah program pemanfaatan filantropi Islam (zakat, wakaf, infak) untuk mendukung infrastruktur digital pendidikan! Sertakan: (a) jenis infrastruktur yang dibiayai (perangkat, jaringan, konten), (b) skema pengelolaan wakaf produktif, (c) mekanisme transparansi dan akuntabilitas, (d) target penerima manfaat, dan (e) indikator keberhasilan. (CPMK2, CPMK4)

4. Analisis Kemitraan Publik-Privat

Pilihlah satu contoh kemitraan publik-privat dalam pendidikan Islam (misalnya: program CSR perusahaan telekomunikasi untuk madrasah)! Analisis: (a) bentuk

kemitraan, (b) manfaat yang diperoleh, (c) potensi risiko (komersialisasi, ketergantungan), (d) kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, dan (e) rekomendasi perbaikan. (CPMK1, CPMK3)

5. Studi Kasus Sekolah Inovatif

Carilah satu studi kasus sekolah/madrasah/pesantren di Indonesia yang berhasil membangun infrastruktur inovatif! Identifikasi: (a) faktor kunci keberhasilan, (b) hambatan yang dihadapi, (c) strategi mengatasi hambatan, (d) dampak terhadap pembelajaran, dan (e) pelajaran yang dapat diadaptasi oleh lembaga lain. (CPMK3, CPMK4)



BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB VIII

TANTANGAN DAN SOLUSI IMPLEMENTASI

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi hambatan budaya dan resistensi perubahan dalam implementasi inovasi di lembaga pendidikan Islam dan merumuskan pendekatan kultural untuk mengatasinya.
2. Menganalisis dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pembelajaran dan merumuskan solusi berbasis infrastruktur, filantropi, dan peningkatan literasi digital.
3. Mengembangkan strategi mengatasi masalah evaluasi dan sertifikasi melalui penilaian autentik, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), dan sertifikat digital.
4. Mengelola risiko inovasi (etika, keuangan, organisasi) berdasarkan prinsip *ikhtiyat* (kehati-hatian), *maslahah* (kemanfaatan), dan *dar'u al-mafasid* (pencegahan kemudaratannya).

A. Hambatan Budaya dan Resistensi Perubahan

Dalam banyak kasus, hambatan terbesar dalam pelaksanaan inovasi pendidikan bukan terletak pada keterbatasan teknologi atau pendanaan, melainkan pada budaya organisasi yang telah mengakar. Setiap lembaga pendidikan memiliki sistem nilai, kebiasaan, dan pola kerja yang terbentuk melalui pengalaman panjang. Budaya tersebut menjadi identitas sekaligus sumber stabilitas, tetapi dalam situasi tertentu juga dapat membuat lembaga lebih berhati-hati terhadap perubahan. Kondisi ini banyak dijumpai di lingkungan pendidikan Islam yang memiliki tradisi keilmuan dan sistem pembelajaran yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Di pesantren dan madrasah, proses pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai kegiatan akademik, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi yang mengandung nilai religius, moral, dan sosial. Peran kiai atau guru sebagai teladan, pembelajaran kitab klasik, metode hafalan, serta hubungan yang erat antara pendidik dan peserta didik merupakan karakter yang membedakan pendidikan Islam dari sistem pendidikan lainnya. Oleh karena itu, ketika diperkenalkan pembelajaran digital, kelas hibrida, *Learning Management System* (LMS), atau pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), sebagian warga lembaga menunjukkan sikap hati-hati. Kekhawatiran tersebut umumnya berkaitan dengan kemungkinan berkurangnya interaksi langsung, menurunnya kualitas pembinaan karakter, atau bergesernya nilai-nilai yang selama ini dijaga.

Resistensi terhadap perubahan merupakan fenomena yang wajar dalam setiap organisasi. Penolakan sering kali bukan disebabkan oleh ketidakmauan untuk berkembang, tetapi karena adanya kekhawatiran bahwa perubahan akan menghilangkan identitas dan budaya lembaga. Oleh sebab itu, keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan

teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam membangun komunikasi, melibatkan seluruh warga sekolah, serta menciptakan rasa memiliki terhadap perubahan yang dilakukan.

1. Memperkuat Inovasi melalui Pendekatan Kultural

Pengembangan pendidikan Islam perlu berangkat dari pemahaman bahwa tradisi dan inovasi dapat berjalan secara berdampingan. Kaidah *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah* memberikan landasan bahwa tradisi yang masih baik tetap dipertahankan, sedangkan pembaruan yang membawa kemaslahatan dapat diadopsi. Prinsip ini menunjukkan bahwa inovasi bukan berarti meninggalkan warisan pendidikan Islam, tetapi menyempurnakannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Atas dasar itu, teknologi perlu diposisikan sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan sebagai pengganti peran guru maupun tradisi keilmuan pesantren. Pemanfaatan platform digital, *Artificial Intelligence* (AI), perpustakaan digital, maupun media pembelajaran interaktif dapat digunakan untuk memperluas akses terhadap sumber belajar, mempermudah kolaborasi, meningkatkan efektivitas evaluasi, serta memperkaya metode pembelajaran. Namun demikian, fungsi guru sebagai *murabbi*, *mu'allim*, dan pembimbing karakter tetap menjadi pusat proses pendidikan.

Keberhasilan pendekatan kultural sangat bergantung pada proses komunikasi yang terbuka. Pimpinan lembaga perlu menjelaskan tujuan perubahan, manfaat yang akan diperoleh, serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Guru, tenaga kependidikan, santri, orang tua, dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan agar inovasi dipahami sebagai kebutuhan bersama, bukan sebagai kebijakan yang dipaksakan dari atas. Musyawarah, diskusi,

dan uji coba terbatas dapat menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan terhadap perubahan.

Selain itu, lembaga pendidikan perlu memberikan pendampingan yang memadai kepada para pendidik. Tidak semua guru memiliki tingkat literasi digital yang sama. Sebagian guru, khususnya yang telah lama mengajar, memerlukan waktu dan bimbingan agar mampu memanfaatkan teknologi secara percaya diri. Pelatihan yang berkelanjutan, pendampingan oleh rekan sejawat, serta pembentukan *Professional Learning Communities* (PLC) akan membantu menciptakan budaya belajar bersama sehingga inovasi berkembang melalui kolaborasi, bukan melalui tekanan.

2. Membangun Ruang Belajar yang Aman bagi Pendidik

Keberhasilan implementasi inovasi sangat ditentukan oleh kesiapan guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran. Tidak semua pendidik memiliki pengalaman, keterampilan, atau tingkat literasi digital yang sama. Sebagian guru telah terbiasa menggunakan berbagai platform pembelajaran digital, sementara sebagian lainnya masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Perbedaan kemampuan ini merupakan kondisi yang wajar dan perlu disikapi sebagai bagian dari proses pengembangan profesional, bukan sebagai kelemahan individu.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu menciptakan ruang belajar yang aman (*safe learning environment*) bagi para pendidik. Guru perlu diberikan kesempatan untuk mencoba metode baru, memanfaatkan teknologi digital, dan mengembangkan inovasi pembelajaran tanpa rasa takut terhadap kritik atau penilaian yang berlebihan. Kesalahan dalam menggunakan aplikasi, media digital, atau strategi pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian dari proses belajar yang akan menghasilkan pengalaman dan peningkatan kompetensi.

Pelatihan guru juga perlu dirancang secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan. Selain pelatihan formal, pendampingan secara langsung (*mentoring*), praktik bersama, serta berbagi pengalaman antarguru akan lebih efektif dalam membantu guru menguasai keterampilan baru. Pendekatan ini memungkinkan setiap pendidik belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing, sehingga proses adaptasi berlangsung lebih nyaman dan berkelanjutan.

Pembentukan *Professional Learning Communities* (PLC) menjadi salah satu strategi yang dapat memperkuat budaya belajar di lingkungan sekolah atau madrasah. Melalui komunitas ini, guru dapat berdiskusi mengenai pengalaman mengajar, saling memberikan masukan, berbagi praktik baik, serta menyelesaikan berbagai persoalan pembelajaran secara kolaboratif. Budaya saling mendukung tersebut tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional, tetapi juga membangun rasa percaya diri dalam menghadapi perubahan.

Di samping itu, pimpinan lembaga memiliki peran penting dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif. Kepala madrasah atau pimpinan sekolah perlu memberikan apresiasi terhadap setiap upaya inovasi yang dilakukan guru, meskipun hasilnya belum sempurna. Penghargaan terhadap proses akan mendorong lahirnya budaya kreatif, sementara budaya yang terlalu berorientasi pada kesempurnaan justru dapat menghambat keberanian guru untuk mencoba pendekatan baru.

Perubahan budaya dalam pendidikan merupakan proses bertahap yang memerlukan komitmen, kesabaran, dan pendampingan yang berkelanjutan. Ketika guru merasa didukung, dihargai, dan memiliki ruang untuk terus belajar, inovasi akan tumbuh sebagai bagian dari budaya organisasi. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa

meninggalkan nilai-nilai keislaman, tradisi keilmuan, dan karakter yang menjadi identitasnya.

B. Kesenjangan Digital (*Digital Divide*)

Transformasi digital telah membawa banyak peluang bagi peningkatan mutu pendidikan, mulai dari kemudahan akses informasi, pembelajaran yang lebih interaktif, hingga perluasan kolaborasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh lembaga pendidikan. Perbedaan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, serta ketersediaan infrastruktur menyebabkan setiap sekolah, madrasah, dan pesantren memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam memanfaatkan teknologi. Sebagian lembaga telah menggunakan *Learning Management System* (LMS), perpustakaan digital, dan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses pembelajaran, sementara sebagian lainnya masih menghadapi keterbatasan akses internet, perangkat belajar, bahkan pasokan listrik yang belum stabil.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya persoalan penguasaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ketika akses terhadap teknologi hanya dinikmati oleh sebagian peserta didik, sementara kelompok lainnya tertinggal karena keterbatasan fasilitas, maka kesenjangan pendidikan akan semakin lebar. Dalam konteks pendidikan Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan pemerataan kesempatan belajar yang menjadi bagian dari tujuan pendidikan.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, penyediaan akses terhadap teknologi dan informasi merupakan bagian dari upaya menjaga dan mengembangkan akal (*hifz al-'aql*). Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan digital tidak cukup dilakukan melalui penyediaan perangkat semata, tetapi memerlukan kebijakan yang mampu menjamin setiap peserta

didik memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, mengembangkan kompetensi, dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

1. Mengembangkan Infrastruktur yang Sesuai dengan Kondisi Daerah

Pemerataan akses digital tidak selalu identik dengan penggunaan teknologi yang paling mutakhir. Setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda sehingga pengembangan infrastruktur perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing wilayah. Pendekatan yang fleksibel dan bertahap akan lebih efektif dibandingkan menerapkan model yang sama untuk seluruh lembaga pendidikan.

Di daerah yang masih memiliki keterbatasan jaringan internet, madrasah atau pesantren dapat memanfaatkan server lokal, perpustakaan digital luring (*offline digital library*), maupun jaringan intranet sebagai pusat penyimpanan bahan ajar. Melalui sistem ini, peserta didik tetap dapat mengakses buku elektronik, video pembelajaran, modul interaktif, maupun koleksi kitab digital tanpa bergantung pada koneksi internet secara terus-menerus. Solusi semacam ini relatif lebih murah, mudah dikelola, dan sesuai dengan kondisi wilayah yang belum memiliki infrastruktur telekomunikasi yang memadai.

Selain itu, penggunaan perangkat yang hemat energi, pemanfaatan sumber energi alternatif seperti panel surya, serta pengembangan pusat belajar bersama (*shared learning center*) dapat menjadi pilihan yang realistis bagi daerah dengan keterbatasan sumber daya. Langkah-langkah tersebut memungkinkan lembaga pendidikan memulai transformasi digital secara bertahap tanpa harus menunggu tersedianya infrastruktur yang sepenuhnya ideal.

Pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah juga memberikan ruang bagi pemerintah, masyarakat, dan

lembaga pendidikan untuk mengembangkan solusi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya dinikmati oleh sekolah-sekolah di perkotaan, tetapi juga mampu menjangkau madrasah dan pesantren di wilayah terpencil sehingga pemerataan mutu pendidikan dapat diwujudkan secara lebih adil dan inklusif.

2. Memperkuat Dukungan melalui Filantropi dan Kemitraan

Pemerataan infrastruktur digital membutuhkan pembiayaan yang besar sehingga tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah atau lembaga pendidikan. Pengadaan perangkat, pembangunan jaringan internet, pemeliharaan sistem, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar transformasi digital dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan digital perlu dibangun melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai lembaga mitra.

Dalam tradisi Islam, semangat berbagi dan saling membantu merupakan bagian dari nilai *ta'awun* yang diwujudkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen filantropi tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung penyediaan perangkat digital, pembangunan jaringan internet, pengembangan laboratorium komputer, perpustakaan digital, maupun pusat belajar bersama bagi madrasah dan pesantren yang memiliki keterbatasan sarana. Pengelolaan dana filantropi yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas partisipasi dalam mendukung pemerataan pendidikan.

Selain filantropi, kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lembaga sosial perlu terus diperkuat. Melalui kerja sama tersebut, lembaga pendidikan tidak hanya memperoleh dukungan pendanaan, tetapi juga akses terhadap pelatihan guru,

pendampingan teknis, pengembangan kurikulum digital, penyediaan perangkat lunak, serta kesempatan mengikuti berbagai program inovasi pendidikan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, misalnya, dapat membuka peluang penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi pada pengembangan teknologi pembelajaran di madrasah dan pesantren.

Kemitraan yang dibangun hendaknya dilandasi prinsip saling menguntungkan, transparansi, dan penghormatan terhadap karakter pendidikan Islam. Dengan demikian, dukungan yang diberikan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga memperkuat kapasitas lembaga dalam mengelola teknologi secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui sinergi berbagai pihak, kesenjangan digital dapat dikurangi sehingga seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang lebih setara untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

3. Meningkatkan Literasi Digital Pendidik

Pemerataan akses terhadap perangkat dan jaringan internet hanya akan memberikan dampak yang terbatas apabila tidak diikuti oleh peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas transformasi digital di sekolah lebih banyak ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dibandingkan oleh kecanggihan perangkat yang dimiliki. Oleh karena itu, pengembangan literasi digital pendidik harus menjadi prioritas utama dalam strategi inovasi pendidikan Islam.

Literasi digital tidak hanya berarti kemampuan mengoperasikan komputer, menggunakan aplikasi presentasi, atau mengelola kelas melalui *Learning Management System* (LMS). Kompetensi tersebut mencakup kemampuan memilih teknologi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, menyusun media belajar yang menarik, mengelola interaksi kelas secara

efektif, memanfaatkan berbagai sumber belajar digital secara bertanggung jawab, serta menanamkan etika penggunaan teknologi kepada peserta didik. Guru juga perlu memiliki kemampuan mengevaluasi informasi yang beredar di ruang digital agar dapat membimbing peserta didik membedakan informasi yang akurat dari informasi yang menyesatkan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, literasi digital merupakan bagian dari pengembangan kompetensi profesional sekaligus tanggung jawab moral seorang pendidik. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memperkuat proses pembelajaran, memperluas wawasan keilmuan, serta membentuk karakter peserta didik yang kritis, jujur, dan beretika dalam kehidupan digital.

Program peningkatan kompetensi digital perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata setiap daerah. Tidak semua guru menghadapi kondisi yang sama. Guru di wilayah perkotaan umumnya telah terbiasa menggunakan berbagai platform pembelajaran daring, sedangkan guru di daerah dengan keterbatasan jaringan lebih membutuhkan pelatihan mengenai pemanfaatan aplikasi yang dapat digunakan secara luring, penyusunan media pembelajaran sederhana, maupun pengelolaan kelas dengan dukungan teknologi yang terbatas. Oleh sebab itu, pelatihan yang bersifat seragam sering kali kurang efektif karena tidak mempertimbangkan perbedaan kondisi infrastruktur dan karakteristik peserta didik.

Selain memperhatikan kondisi wilayah, materi pelatihan juga perlu disusun secara bertahap. Tahap pertama dapat difokuskan pada penguasaan keterampilan dasar, seperti penggunaan perangkat digital, pengelolaan dokumen elektronik, pemanfaatan aplikasi komunikasi, dan penyusunan

bahan ajar digital sederhana. Setelah kemampuan dasar terbentuk, pelatihan dapat dikembangkan menuju kompetensi yang lebih kompleks, seperti pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan media interaktif, penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), analisis hasil belajar peserta didik, hingga pengembangan evaluasi berbasis teknologi.

Peningkatan kompetensi guru tidak cukup dilakukan melalui pelatihan yang bersifat insidental. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan tidak berlanjut karena minimnya kesempatan untuk mempraktikkannya. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pendampingan yang berkelanjutan. Guru memerlukan ruang untuk berdiskusi, mencoba berbagai metode baru, memperoleh umpan balik, serta memperbaiki praktik pembelajaran berdasarkan pengalaman yang mereka alami di kelas. Pendekatan seperti ini jauh lebih efektif dibandingkan pelatihan yang hanya berlangsung satu atau dua hari tanpa tindak lanjut.

Pembentukan komunitas belajar guru menjadi salah satu strategi yang dapat mendukung proses tersebut. Melalui kelompok kerja guru, *Professional Learning Community* (PLC), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), maupun forum-forum kolaboratif lainnya, para pendidik dapat saling berbagi pengalaman, bertukar bahan ajar, mendiskusikan kesulitan yang dihadapi, serta menemukan solusi bersama. Budaya belajar kolektif seperti ini tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional, tetapi juga memperkuat semangat saling membantu dan berbagi praktik baik antarpendidik.

Kemajuan teknologi juga membuka peluang bagi terbentuknya jejaring pembelajaran lintas wilayah. Guru dari daerah terpencil dapat mengikuti seminar daring, lokakarya virtual, maupun diskusi akademik bersama pendidik dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri. Akses terhadap komunitas profesional tersebut memungkinkan terjadinya

pertukaran gagasan, penyebaran inovasi pembelajaran, dan peningkatan kualitas pendidikan secara lebih merata. Dengan dukungan teknologi, keterbatasan geografis tidak lagi menjadi hambatan utama untuk memperoleh kesempatan belajar.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penguatan etika digital. Guru perlu memahami berbagai persoalan yang berkembang dalam ruang digital, seperti perlindungan data pribadi, keamanan informasi, hak cipta, penyebaran informasi palsu, penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab, serta etika komunikasi di media sosial. Pemahaman tersebut diperlukan agar guru dapat menjadi teladan dalam penggunaan teknologi sekaligus membimbing peserta didik membangun budaya digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Evaluasi terhadap program peningkatan literasi digital juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, tetapi perlu dilihat dari perubahan praktik pembelajaran di kelas. Indikator seperti meningkatnya penggunaan media pembelajaran digital yang sesuai, bertambahnya variasi metode pembelajaran, meningkatnya partisipasi peserta didik, serta kemampuan guru menghasilkan inovasi pembelajaran dapat menjadi ukuran keberhasilan program pengembangan kompetensi tersebut.

C. Strategi Mengatasi Masalah Evaluasi dan Sertifikasi

Perubahan dalam sistem pembelajaran perlu diikuti oleh perubahan dalam cara mengevaluasi hasil belajar dan memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik. Inovasi dalam kurikulum, metode pembelajaran, maupun pemanfaatan teknologi tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila masih diukur menggunakan sistem evaluasi yang hanya berorientasi pada kemampuan mengingat materi. Selama ini, banyak lembaga pendidikan masih menempatkan ujian tertulis sebagai indikator utama keberhasilan belajar.

Padahal, perkembangan dunia pendidikan menunjukkan bahwa peserta didik juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja sama, beradaptasi, serta mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, sistem evaluasi perlu berkembang agar mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses dan hasil belajar.

Di sisi lain, persoalan sertifikasi juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Pendidikan Islam menghasilkan berbagai kompetensi yang tidak seluruhnya tercermin dalam dokumen akademik formal. Kemampuan membaca dan mengkaji kitab klasik, hafalan Al-Qur'an, kepemimpinan organisasi, pengalaman dakwah, keterampilan sosial, hingga pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dari proses pembentukan peserta didik di pesantren dan madrasah. Namun, berbagai capaian tersebut sering kali belum memperoleh pengakuan yang proporsional dalam sistem kualifikasi nasional. Akibatnya, sebagian lulusan mengalami kesulitan ketika melanjutkan pendidikan ataupun memasuki dunia kerja karena kompetensi yang dimiliki belum terdokumentasi secara komprehensif.

Perbaikan sistem evaluasi dan sertifikasi perlu dilakukan secara terpadu agar keduanya saling mendukung. Evaluasi harus mampu memberikan informasi yang akurat mengenai perkembangan peserta didik, sedangkan sertifikasi harus menjadi bukti yang mencerminkan seluruh kompetensi yang telah dicapai selama proses pendidikan. Dengan demikian, sistem penilaian tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan potensi peserta didik, serta penguatan daya saing lulusan pendidikan Islam.

1. Mengembangkan Penilaian yang Lebih Menyeluruh

Perubahan paradigma pembelajaran perlu diikuti oleh perubahan dalam sistem penilaian. Selama bertahun-tahun,

keberhasilan belajar sering kali diukur melalui tes tertulis yang berfokus pada kemampuan mengingat dan mengulang informasi. Model penilaian seperti ini masih memiliki fungsi tertentu, terutama untuk mengetahui penguasaan konsep dasar. Namun, apabila dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan, hasilnya tidak mampu menggambarkan kemampuan peserta didik secara utuh. Padahal, pembelajaran abad ke-21 menuntut peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai situasi kehidupan.

Dalam konteks pendidikan Islam, tujuan pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan ilmu (*ta'lim*), tetapi juga mencakup pembentukan karakter (*tarbiyah*) dan penanaman adab (*ta'dib*). Oleh karena itu, sistem evaluasi harus mampu menangkap perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Seorang peserta didik yang memperoleh nilai akademik tinggi tetapi belum menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, atau kepedulian terhadap sesama belum sepenuhnya mencapai tujuan pendidikan Islam. Sebaliknya, peserta didik yang memiliki perkembangan karakter yang baik juga perlu memperoleh apresiasi sebagai bagian dari keberhasilan proses pendidikan.

Penilaian yang menyeluruh tidak berarti menghapus ujian tertulis, tetapi melengkapinya dengan berbagai bentuk evaluasi yang mampu menggambarkan proses belajar secara lebih komprehensif. Guru dapat mengombinasikan tes tertulis dengan penilaian berbasis proyek, portofolio, presentasi, praktik, observasi, diskusi kelompok, maupun refleksi belajar. Melalui kombinasi tersebut, peserta didik memiliki lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pendekatan ini

juga membantu guru memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan setiap peserta didik.

Penilaian berbasis proyek memungkinkan peserta didik mengintegrasikan berbagai kompetensi dalam satu kegiatan. Mereka tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu merencanakan kegiatan, mencari informasi, bekerja sama dalam tim, menyelesaikan masalah, dan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selama proses tersebut, guru dapat mengamati kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kepemimpinan, serta tanggung jawab peserta didik.

Selain itu, penggunaan portofolio pembelajaran memberikan kesempatan bagi guru untuk melihat perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Berbagai hasil karya, laporan, dokumentasi proyek, jurnal refleksi, maupun tugas yang telah diselesaikan dapat dikumpulkan sebagai bukti perkembangan kompetensi. Portofolio menunjukkan bahwa proses belajar merupakan perjalanan yang berlangsung secara bertahap, bukan sekadar hasil yang diperoleh pada saat ujian berlangsung.

Aspek karakter juga perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem evaluasi. Sikap disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, kemampuan bekerja sama, serta etika dalam berkomunikasi dapat diamati secara sistematis selama proses pembelajaran. Dengan indikator yang jelas, penilaian karakter dapat dilakukan secara objektif tanpa mengurangi aspek akademik yang tetap menjadi bagian penting dari evaluasi.

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat memperkuat proses evaluasi. Berbagai platform pembelajaran, *Learning Management System* (LMS), maupun *e-portfolio* memungkinkan guru mendokumentasikan perkembangan peserta didik secara lebih terstruktur. Aktivitas belajar, hasil tugas, partisipasi dalam diskusi, hingga perkembangan proyek

dapat direkam sehingga guru memperoleh informasi yang lebih lengkap dalam melakukan penilaian. Di sisi lain, peserta didik juga memperoleh umpan balik yang lebih cepat sehingga mereka dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

2. Memperluas Pengakuan terhadap Berbagai Bentuk Pembelajaran

Proses belajar tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga terjadi melalui berbagai pengalaman yang diperoleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan organisasi, pengabdian kepada masyarakat, praktik kewirausahaan, kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan, hingga aktivitas di lingkungan pesantren merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Oleh karena itu, sistem evaluasi dan sertifikasi perlu memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap berbagai bentuk pembelajaran tersebut.

Dalam pendidikan Islam, proses pembentukan kompetensi berlangsung melalui beragam aktivitas yang tidak selalu dapat diukur melalui ujian akademik. Kemampuan membaca dan memahami kitab turats, menghafal Al-Qur'an, mengikuti *bahtsul masail*, menjadi pengurus organisasi santri, berdakwah di tengah masyarakat, mengelola unit usaha pesantren, maupun terlibat dalam kegiatan sosial merupakan pengalaman belajar yang memiliki nilai pendidikan yang tinggi. Berbagai aktivitas tersebut membentuk kemampuan berpikir, kepemimpinan, komunikasi, kerja sama, tanggung jawab, serta penguatan akhlak yang menjadi tujuan utama pendidikan Islam.

Sayangnya, banyak capaian tersebut belum terdokumentasi secara memadai dalam sistem sertifikasi formal. Akibatnya, lulusan pesantren atau madrasah sering kali hanya dinilai berdasarkan ijazah akademik, sementara berbagai kompetensi lain yang telah diperoleh melalui

pengalaman belajar kurang memperoleh pengakuan. Kondisi ini menyebabkan sebagian lulusan menghadapi kendala ketika melanjutkan pendidikan, mengikuti seleksi kerja, maupun memperoleh pengakuan atas kemampuan yang sebenarnya telah dimiliki.

Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah penerapan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui mekanisme ini, pengalaman belajar yang diperoleh melalui jalur nonformal maupun informal dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan diakui sebagai bagian dari capaian kompetensi. Dengan demikian, proses belajar yang berlangsung di pesantren, organisasi kemasyarakatan, lembaga dakwah, dunia kerja, maupun kegiatan sosial memperoleh posisi yang setara sebagai pengalaman pendidikan yang bernilai.

Implementasi RPL memerlukan sistem dokumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai bukti pencapaian, seperti sertifikat kegiatan, portofolio, karya tulis, laporan pengabdian masyarakat, rekam jejak kepemimpinan organisasi, hingga rekomendasi dari pembimbing atau pengasuh pesantren dapat digunakan sebagai dasar penilaian. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan kompetensinya melalui bukti nyata, bukan hanya melalui hasil ujian tertulis.

Selain RPL, lembaga pendidikan juga dapat mengembangkan sistem portofolio kompetensi yang mendokumentasikan seluruh pengalaman belajar peserta didik selama menempuh pendidikan. Portofolio tersebut memuat capaian akademik, pengalaman organisasi, kegiatan penelitian, prestasi, karya inovatif, aktivitas sosial, kemampuan bahasa, keterampilan digital, hingga kompetensi keagamaan seperti hafalan Al-Qur'an atau penguasaan kitab klasik. Dengan dokumentasi yang lebih lengkap, profil lulusan

menjadi lebih komprehensif dan mampu menggambarkan kemampuan yang sesungguhnya.

Perkembangan teknologi digital semakin memudahkan proses dokumentasi tersebut. Portofolio elektronik (*e-portfolio*), sertifikat digital (*digital certificate*), maupun lencana kompetensi (*digital badges*) dapat digunakan untuk merekam berbagai capaian peserta didik secara sistematis. Setiap kompetensi yang diperoleh, baik melalui pembelajaran formal maupun pengalaman di luar kelas, dapat terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah diverifikasi oleh perguruan tinggi, dunia kerja, maupun lembaga profesi.

Bagi pendidikan Islam, pengakuan terhadap berbagai bentuk pembelajaran juga merupakan bentuk penghargaan terhadap proses pendidikan yang berlangsung secara menyeluruh. Pendidikan tidak hanya membentuk kemampuan akademik, tetapi juga mengembangkan kepemimpinan, kepedulian sosial, kemandirian, kedisiplinan, dan akhlak mulia. Seluruh pengalaman tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya dalam membentuk kualitas lulusan sehingga layak memperoleh pengakuan dalam sistem evaluasi dan sertifikasi.

3. Membangun Sistem Sertifikasi yang Lebih Adaptif

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan sistem sertifikasi yang lebih efektif, aman, dan mudah diakses. Selama ini, sertifikat dan dokumen akademik umumnya masih berbentuk fisik sehingga rentan mengalami kerusakan, kehilangan, maupun pemalsuan. Selain itu, proses verifikasi dokumen sering memerlukan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan sistem sertifikasi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Salah satu bentuk pembaruan yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan sertifikat digital, *digital badges*, dan berbagai bentuk kredensial elektronik lainnya. Melalui sistem ini, capaian belajar peserta didik dapat didokumentasikan secara lebih lengkap dan tersimpan dalam basis data yang aman. Setiap sertifikat dapat dilengkapi dengan identitas digital yang memudahkan proses verifikasi oleh perguruan tinggi, dunia kerja, maupun lembaga profesi. Dengan demikian, proses pengakuan terhadap kompetensi lulusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terpercaya.

Penggunaan teknologi dalam sistem sertifikasi bukan berarti menghilangkan tradisi akademik yang telah berkembang dalam pendidikan Islam. Berbagai bentuk pengakuan keilmuan, seperti sanad keilmuan, ijazah pengajaran kitab, atau pengakuan dari seorang guru kepada muridnya, tetap memiliki nilai yang sangat penting. Tradisi tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang transmisi ilmu dalam Islam yang menekankan kesinambungan keilmuan, integritas, dan tanggung jawab akademik. Oleh karena itu, teknologi sebaiknya diposisikan sebagai sarana untuk memperkuat dokumentasi dan memperluas pengakuan terhadap tradisi tersebut, bukan menggantikannya.

Integrasi antara sistem sertifikasi modern dan tradisi keilmuan Islam dapat menghasilkan model pengakuan kompetensi yang lebih komprehensif. Selain memuat informasi mengenai capaian akademik formal, sertifikat juga dapat mencantumkan kompetensi lain yang diperoleh peserta didik, seperti hafalan Al-Qur'an, penguasaan kitab turats, kemampuan bahasa asing, keterampilan digital, pengalaman kepemimpinan, kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun prestasi lainnya. Dengan demikian, dokumen akademik tidak hanya menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan,

tetapi juga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kemampuan yang dimiliki.

Penerapan sistem sertifikasi yang adaptif juga mendukung konsep pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Rekam jejak kompetensi peserta didik dapat terus diperbarui seiring dengan pengalaman belajar yang diperoleh, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, seminar, sertifikasi profesi, maupun pengalaman kerja. Setiap pencapaian menjadi bagian dari portofolio kompetensi yang terdokumentasi secara berkelanjutan sehingga mencerminkan perkembangan kemampuan seseorang dari waktu ke waktu.

Di samping itu, sistem sertifikasi yang terintegrasi secara digital akan memudahkan lembaga pendidikan dalam melakukan pengelolaan data akademik. Proses penerbitan, penyimpanan, pembaruan, hingga verifikasi dokumen dapat dilakukan secara lebih efisien. Hal ini tidak hanya mengurangi beban administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta didik dan alumni. Bagi dunia kerja maupun perguruan tinggi, sistem tersebut memberikan kemudahan dalam memastikan keabsahan dokumen akademik sehingga proses seleksi dapat berlangsung secara lebih objektif dan transparan.

Pembaruan sistem sertifikasi juga perlu didukung oleh kebijakan yang mampu menghubungkan berbagai bentuk pengakuan kompetensi. Sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dunia usaha, organisasi profesi, dan masyarakat menjadi penting agar kompetensi yang dimiliki lulusan memperoleh pengakuan yang lebih luas. Dengan adanya standar yang jelas dan sistem dokumentasi yang baik, berbagai pengalaman belajar yang diperoleh melalui jalur formal, nonformal, maupun informal dapat diakui sebagai bagian dari kompetensi profesional peserta didik.

D. Manajemen Risiko dalam Inovasi Pendidikan Islam

Perkembangan inovasi dalam pendidikan Islam menghadirkan berbagai peluang untuk meningkatkan mutu pembelajaran, memperluas akses pendidikan, serta memperkuat tata kelola lembaga. Pemanfaatan teknologi digital, pembelajaran berbasis kecerdasan buatan, sistem informasi akademik, hingga berbagai bentuk kemitraan telah membuka ruang bagi lahirnya model pendidikan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Inovasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masyarakat modern yang semakin dinamis.

Di sisi lain, setiap proses perubahan selalu membawa konsekuensi yang perlu dikelola secara bijaksana. Semakin luas inovasi diterapkan, semakin besar pula kemungkinan munculnya berbagai risiko, baik yang berkaitan dengan aspek akademik, etika, keuangan, maupun tata kelola lembaga. Risiko tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk kegagalan yang terlihat secara langsung, tetapi dapat berkembang secara bertahap apabila tidak diantisipasi sejak tahap perencanaan. Misalnya, penggunaan teknologi yang tidak disertai pedoman etika dapat memunculkan penyalahgunaan data, ketergantungan terhadap aplikasi tertentu, atau menurunnya kualitas interaksi antara guru dan peserta didik.

Dalam konteks pendidikan Islam, pengelolaan risiko memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar menjaga keberlangsungan program. Manajemen risiko merupakan bagian dari tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap inovasi tetap berjalan dalam koridor nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta didik serta masyarakat. Prinsip *ikhtiyat* (kehati-hatian), *maslahah* (kemanfaatan), dan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (mencegah kemudaratannya didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan) menjadi landasan dalam setiap

proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, inovasi tidak hanya dinilai dari keberhasilannya menghadirkan teknologi baru, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kualitas pendidikan, membangun karakter, serta mempertahankan identitas lembaga pendidikan Islam.

1. Mengantisipasi Risiko Etika dan Nilai

Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan membawa berbagai kemudahan yang sebelumnya sulit dibayangkan. Guru dapat menyusun bahan ajar dengan lebih cepat, peserta didik memperoleh akses terhadap berbagai sumber belajar dari seluruh dunia, sementara proses evaluasi dapat dilakukan secara otomatis melalui berbagai platform pembelajaran. Kehadiran *Artificial Intelligence* (AI), *Learning Management System* (LMS), dan aplikasi pembelajaran interaktif telah membantu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru yang tidak dapat diabaikan.

Salah satu risiko yang paling penting adalah persoalan etika dalam penggunaan teknologi. Informasi yang dihasilkan oleh sistem berbasis AI tidak selalu akurat, objektif, ataupun sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Algoritma dapat menghasilkan informasi yang mengandung bias, kesalahan interpretasi, bahkan materi yang bertentangan dengan prinsip akidah dan akhlak apabila digunakan tanpa proses verifikasi. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi peserta didik, pelanggaran hak cipta, plagiarisme, hingga penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya.

Dalam proses pembelajaran, guru memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi berfungsi sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti proses berpikir kritis peserta didik. Kehadiran AI, misalnya, tidak seharusnya menjadikan siswa bergantung sepenuhnya pada jawaban yang

dihasilkan mesin. Sebaliknya, teknologi perlu dimanfaatkan sebagai media untuk memperkaya diskusi, mengembangkan kreativitas, serta melatih kemampuan melakukan *tabayyun* terhadap setiap informasi yang diperoleh. Dengan demikian, literasi digital harus selalu disertai dengan literasi etika dan literasi keagamaan.

Lembaga pendidikan juga perlu menyusun kebijakan yang jelas mengenai penggunaan teknologi di lingkungan sekolah, madrasah, maupun pesantren. Kebijakan tersebut dapat mencakup pedoman penggunaan AI dalam pembelajaran, aturan perlindungan data pribadi, standar keamanan sistem informasi, mekanisme penggunaan media sosial, hingga tata cara pemanfaatan berbagai platform digital dalam proses belajar mengajar. Kejelasan aturan akan membantu seluruh warga sekolah memahami batasan serta tanggung jawab masing-masing dalam memanfaatkan teknologi.

Selain itu, pembentukan tim atau komite etik digital dapat menjadi salah satu langkah yang efektif. Tim ini bertugas melakukan kajian terhadap berbagai inovasi yang akan diterapkan, mengevaluasi dampaknya terhadap proses pembelajaran, serta memberikan rekomendasi sebelum teknologi digunakan secara luas. Keterlibatan guru, pimpinan lembaga, tenaga teknologi informasi, dan ahli pendidikan Islam dalam tim tersebut akan menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan aspek akademik, teknis, dan nilai-nilai keislaman secara bersamaan.

Pendidikan kepada peserta didik mengenai etika digital juga perlu menjadi bagian dari kurikulum. Siswa tidak cukup diajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga perlu memahami tanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang digital, menghargai karya orang lain, menjaga privasi, menghindari penyebaran informasi palsu, serta menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan demikian, kemampuan

digital berkembang seiring dengan pembentukan karakter yang menjadi tujuan utama pendidikan Islam.

2. Mengelola Risiko Keuangan dan Organisasi

Pelaksanaan inovasi dalam pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan dukungan sumber daya yang memadai. Pengembangan *Learning Management System* (LMS), penyediaan perangkat pembelajaran digital, peningkatan kapasitas jaringan internet, pembangunan laboratorium, hingga pelatihan guru merupakan investasi yang memerlukan biaya cukup besar. Selain biaya pengadaan, lembaga juga harus memperhitungkan biaya operasional jangka panjang, seperti pemeliharaan perangkat, pembaruan perangkat lunak, keamanan siber, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap program inovasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan lembaga agar tidak menimbulkan beban yang mengganggu keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Perencanaan anggaran menjadi langkah awal yang sangat penting dalam manajemen risiko keuangan. Sebelum suatu program dilaksanakan, lembaga perlu melakukan analisis kebutuhan, menghitung estimasi biaya, serta memperkirakan manfaat yang akan diperoleh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pendekatan ini membantu pengelola menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Dengan demikian, keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada keinginan mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga pada kebutuhan riil lembaga dan kemampuan pendanaan yang dimiliki.

Penerapan skala prioritas juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan risiko. Tidak semua inovasi harus diwujudkan secara bersamaan. Lembaga dapat memulai dari program-program yang memiliki dampak langsung terhadap

proses pembelajaran, seperti peningkatan kualitas jaringan internet, penyediaan perangkat bagi guru, atau pengembangan perpustakaan digital. Setelah program tersebut berjalan dengan baik, pengembangan dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya, misalnya pembangunan laboratorium digital, integrasi sistem informasi akademik, atau penerapan teknologi berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Pendekatan bertahap seperti ini lebih realistis dan memungkinkan evaluasi dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan.

Selain aspek keuangan, inovasi juga membawa risiko organisasi yang perlu dikelola dengan baik. Perubahan sistem kerja, penerapan teknologi baru, maupun pembagian tugas yang berbeda sering kali memerlukan penyesuaian struktur organisasi. Apabila proses perubahan tidak disertai pembagian peran yang jelas, koordinasi antarpersonel dapat terganggu sehingga menghambat pelaksanaan program. Oleh karena itu, setiap inovasi perlu diikuti dengan penyusunan mekanisme kerja, pembagian tanggung jawab, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar seluruh unsur lembaga memahami perannya masing-masing.

Diversifikasi sumber pendanaan merupakan strategi yang dapat memperkuat ketahanan keuangan lembaga pendidikan Islam. Selain memanfaatkan dukungan pemerintah, lembaga dapat mengembangkan berbagai sumber pembiayaan lain, seperti wakaf produktif, zakat, infak, sedekah, dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR), hibah penelitian, kerja sama dengan perguruan tinggi, maupun kemitraan dengan dunia usaha. Pengelolaan berbagai sumber pendanaan tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjamin keberlanjutan program inovasi.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko. Setiap

penggunaan anggaran perlu didokumentasikan dengan baik, disampaikan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan, dan dievaluasi secara berkala. Sistem pelaporan yang akuntabel akan memudahkan lembaga melakukan pengawasan, mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, serta memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan.

3. Menjaga Kepercayaan Masyarakat

Keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan internal lembaga, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat. Orang tua, alumni, tokoh agama, dan berbagai unsur masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan pendidikan Islam. Apabila perubahan dilakukan tanpa komunikasi yang baik, berbagai kebijakan baru dapat menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan penolakan.

Oleh sebab itu, setiap proses transformasi perlu disertai dengan komunikasi yang terbuka. Pimpinan lembaga perlu menjelaskan tujuan perubahan, manfaat yang diharapkan, serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menjaga kualitas pendidikan dan nilai-nilai yang telah menjadi identitas lembaga. Keterlibatan masyarakat dalam proses diskusi maupun evaluasi juga dapat memperkuat rasa memiliki terhadap program yang dijalankan.

Pelaksanaan inovasi secara bertahap melalui program percontohan merupakan salah satu strategi yang dapat mengurangi risiko. Hasil pelaksanaan pada tahap awal dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sebelum program diperluas ke seluruh lembaga. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan apabila masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan.

Manajemen risiko pada dasarnya merupakan bagian dari tata kelola lembaga yang baik. Kemampuan mengenali potensi

masalah sejak awal akan membantu institusi mengambil keputusan secara lebih tepat dan terukur. Dengan pengelolaan risiko yang sistematis, pendidikan Islam dapat terus mengembangkan berbagai inovasi tanpa mengabaikan stabilitas organisasi, kepercayaan masyarakat, serta nilai-nilai yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikannya.

E. Simpulan

Bab ini membahas berbagai tantangan implementasi inovasi pendidikan Islam dan solusinya, mencakup hambatan budaya dan resistensi perubahan, kesenjangan digital, masalah evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen risiko.

Hambatan budaya dan resistensi perubahan diatasi melalui: (1) pendekatan kultural yang memposisikan teknologi sebagai alat pendukung, bukan pengganti peran guru dan tradisi; (2) komunikasi terbuka dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan; (3) ruang belajar yang aman bagi guru untuk bereksperimen; dan (4) pembentukan Professional Learning Communities (PLC) sebagai budaya belajar bersama.

Kesenjangan digital (digital divide) diatasi melalui: (1) pengembangan infrastruktur sesuai kondisi daerah (server lokal, offline library); (2) penguatan filantropi dan kemitraan; dan (3) peningkatan literasi digital pendidik secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk etika digital dan penggunaan AI secara bertanggung jawab.

Masalah evaluasi dan sertifikasi diatasi melalui: (1) penilaian autentik dan formatif yang mengukur kompetensi holistik; (2) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang mengakui pengalaman belajar di berbagai lingkungan; (3) portofolio digital dan digital badges; dan (4) sistem sertifikasi adaptif yang mengintegrasikan tradisi sanad dengan kredensial modern.

Manajemen risiko inovasi dilakukan melalui: (1) antisipasi risiko etika dan nilai dengan kebijakan penggunaan

teknologi dan komite etik digital; (2) pengelolaan risiko keuangan melalui perencanaan anggaran, skala prioritas, dan diversifikasi pendanaan; (3) pengelolaan risiko organisasi melalui pembagian peran jelas dan penguatan kapasitas; dan (4) menjaga kepercayaan masyarakat melalui komunikasi terbuka dan implementasi bertahap.

F. Soal Latihan

1. Analisis Hambatan Budaya

Pilihlah satu inovasi yang ditolak atau diresistensi di lembaga pendidikan Islam (misalnya: penggunaan LMS, pembelajaran berbasis proyek, atau kurikulum terintegrasi)! Analisis: (a) sumber resistensi (kultural, struktural, personal), (b) dampak resistensi terhadap implementasi, (c) strategi pendekatan kultural untuk mengatasi, dan (d) rencana komunikasi perubahan. (CPMK1, CPMK3)

2. Strategi Mengatasi Digital Divide

Buatlah proposal strategi mengatasi kesenjangan digital untuk sebuah madrasah di daerah terpencil! Sertakan: (a) analisis kondisi infrastruktur, (b) solusi teknologi sesuai kondisi lokal, (c) program peningkatan literasi digital pendidik, (d) skema pendanaan (filantropi, kemitraan), dan (e) mekanisme monitoring dan evaluasi. (CPMK2, CPMK4)

3. Proyek Reformasi Evaluasi dan Sertifikasi

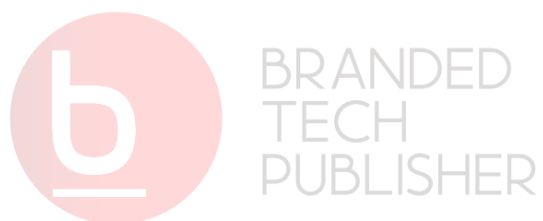
Rancanglah sistem evaluasi dan sertifikasi inovatif untuk sebuah lembaga pendidikan Islam yang mengakui berbagai bentuk pembelajaran! Sertakan: (a) model penilaian autentik dan formatif, (b) mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), (c) sistem portofolio digital dan digital badges, (d) integrasi tradisi sanad dengan kredensial modern, dan (e) kebijakan implementasi. (CPMK2, CPMK4)

4. Analisis Manajemen Risiko

Pilihlah satu program inovasi (misalnya: implementasi AI di kelas, atau pembangunan laboratorium VR) yang berpotensi mengandung risiko! Lakukan analisis risiko menggunakan kerangka ikhtiyat (kehati-hatian), masalah (kemanfaatan), dan dar'u al-mafasid (pencegahan kemudaratatan) dengan mencakup: (a) identifikasi risiko (etika, keuangan, organisasi), (b) analisis dampak, (c) strategi mitigasi, dan (d) rencana kontijensi. (CPMK1, CPMK3)

5. Studi Kasus Implementasi

Carilah satu studi kasus implementasi inovasi pendidikan Islam di Indonesia (bisa dari literatur atau observasi langsung)! Analisis: (a) jenis inovasi, (b) tantangan yang dihadapi (budaya, infrastruktur, evaluasi, risiko), (c) strategi mengatasi tantangan, (d) faktor kunci keberhasilan, dan (e) rekomendasi untuk replikasi. (CPMK3, CPMK4)



BAB IX

PENILAIAN DAN EVALUASI INOVASI PENDIDIKAN

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengimplementasikan metode penilaian autentik dan formatif untuk mengukur kompetensi abad 21 dan perkembangan karakter peserta didik secara holistik.
2. Menganalisis penggunaan data analytics untuk memantau pola keterlibatan peserta didik, menilai efektivitas program, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).
3. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi berbasis portofolio digital yang mengakui capaian akademik, tradisi keilmuan (*sanad*), dan pengalaman belajar di berbagai lingkungan.
4. Melakukan benchmarking dengan standar internasional untuk peningkatan mutu kelembagaan serta menyelaraskannya dengan prinsip *Maqashid Syariah* dan akreditasi global.

A. Metode Penilaian Autentik dan Formatif

Sistem penilaian merupakan salah satu komponen penting yang menentukan arah pembelajaran. Cara guru melakukan evaluasi akan memengaruhi cara peserta didik belajar, menentukan prioritas mereka selama mengikuti pembelajaran, bahkan membentuk budaya akademik di lingkungan sekolah atau madrasah. Apabila penilaian hanya berorientasi pada hasil ujian akhir dan kemampuan menghafal materi, peserta didik cenderung memusatkan perhatian pada pencapaian nilai, bukan pada pemahaman yang mendalam. Akibatnya, proses belajar menjadi kurang bermakna karena keberhasilan diukur dari jawaban yang benar pada saat ujian, bukan dari kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata.

Perkembangan pendidikan abad ke-21 menuntut perubahan paradigma tersebut. Pembelajaran saat ini tidak hanya bertujuan mengembangkan pengetahuan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, literasi digital, serta kemampuan memecahkan berbagai persoalan kehidupan. Kompetensi tersebut sulit diukur hanya melalui tes tertulis. Oleh karena itu, sistem penilaian perlu dirancang agar mampu menggambarkan proses belajar secara lebih utuh, termasuk perkembangan sikap, keterampilan, dan kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu yang dipelajarinya.

Dalam pendidikan Islam, perubahan sistem penilaian memiliki makna yang lebih luas. Tujuan pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penilaian tidak cukup hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga perlu memperhatikan perkembangan karakter, adab, kepedulian sosial, serta

kemampuan peserta didik mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aktivitas kehidupan. Atas dasar itulah, penilaian autentik dan penilaian formatif menjadi dua pendekatan yang semakin relevan dalam pengembangan pendidikan Islam yang inovatif.

1. Penilaian Autentik

Penilaian autentik merupakan pendekatan evaluasi yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan kompetensi melalui tugas-tugas yang mencerminkan situasi nyata. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya diminta mengingat konsep atau menjawab soal pilihan ganda, tetapi juga menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan karya, melakukan presentasi, menyusun proyek, atau melaksanakan praktik sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penilaian menjadi lebih bermakna karena menggambarkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan ilmu secara nyata.

Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan kesatuan antara ilmu, amal, dan akhlak. Keberhasilan belajar tidak hanya dilihat dari banyaknya materi yang dihafal, tetapi juga dari kemampuan peserta didik mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan. Oleh karena itu, penilaian autentik memberikan ruang bagi guru untuk menilai bagaimana peserta didik memahami suatu konsep, menerapkannya dalam berbagai situasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menunjukkan tanggung jawab dan etika selama proses pembelajaran berlangsung.

Sebagai contoh, dalam pembelajaran fikih muamalah, peserta didik tidak hanya diminta menjelaskan rukun dan syarat jual beli berdasarkan dalil. Guru dapat memberikan tugas berupa analisis praktik transaksi digital yang berkembang di masyarakat, penyusunan rancangan usaha sederhana berbasis prinsip syariah, simulasi akad bisnis, atau

pembuatan konten edukasi mengenai etika transaksi melalui media digital. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik belajar menghubungkan konsep-konsep keislaman dengan persoalan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah.

Demikian pula dalam mata pelajaran lain, penilaian autentik dapat diterapkan dalam berbagai bentuk. Pada pembelajaran Al-Qur'an dan hadis, peserta didik dapat membuat proyek dakwah digital, video edukasi, atau infografis yang menjelaskan kandungan ayat dan hadis. Pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, peserta didik dapat menyusun dokumentasi sejarah lokal, membuat peta digital perjalanan tokoh Islam, atau melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat mengenai tradisi keislaman di daerahnya. Beragam bentuk penugasan tersebut memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual sekaligus meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Perkembangan teknologi semakin memperluas peluang pelaksanaan penilaian autentik. Melalui *Learning Management System* (LMS), guru dapat mengelola proyek pembelajaran, memantau perkembangan tugas, memberikan umpan balik secara bertahap, serta menyimpan seluruh hasil belajar dalam bentuk portofolio digital. Peserta didik dapat mendokumentasikan proses belajarnya melalui foto, video, laporan, rekaman presentasi, maupun refleksi pribadi sehingga guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga perkembangan kemampuan selama proses pembelajaran berlangsung.

Selain itu, penilaian autentik memberikan kesempatan bagi guru untuk menggunakan rubrik penilaian yang lebih jelas dan objektif. Kriteria penilaian dapat mencakup penguasaan materi, kemampuan menganalisis masalah, kreativitas, kualitas komunikasi, kerja sama dalam kelompok, tanggung jawab, hingga kemampuan mengintegrasikan nilai-

nilai Islam dalam penyelesaian tugas. Dengan adanya rubrik yang terstruktur, peserta didik memahami aspek-aspek yang dinilai sehingga proses evaluasi menjadi lebih transparan dan mendorong mereka untuk terus memperbaiki kualitas belajarnya.

2. Penilaian Formatif

Selain menilai hasil akhir pembelajaran, guru juga perlu memahami bagaimana proses belajar berlangsung dari waktu ke waktu. Di sinilah penilaian formatif memiliki peran yang sangat penting. Penilaian formatif merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tujuan memberikan informasi mengenai perkembangan peserta didik. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki strategi pembelajaran, memberikan pendampingan yang sesuai, serta membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Berbeda dengan penilaian sumatif yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran, penilaian formatif dilaksanakan secara berkala melalui berbagai kegiatan sederhana, seperti pertanyaan reflektif, kuis singkat, diskusi kelas, tugas individu, presentasi, observasi aktivitas belajar, maupun umpan balik terhadap hasil pekerjaan peserta didik. Melalui kegiatan tersebut, guru dapat mengetahui sejauh mana materi telah dipahami, konsep apa yang masih menimbulkan kesulitan, serta peserta didik mana yang memerlukan pendampingan lebih lanjut. Informasi yang diperoleh memungkinkan guru melakukan penyesuaian metode mengajar sebelum kesulitan belajar berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Salah satu keunggulan penilaian formatif adalah kemampuannya memberikan umpan balik (*feedback*) secara

cepat. Umpan balik yang diberikan tidak sekadar menunjukkan benar atau salahnya jawaban, tetapi juga memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan peserta didik untuk meningkatkan pemahamannya. Guru dapat menjelaskan bagian yang masih perlu diperbaiki, memberikan contoh penyelesaian yang lebih tepat, atau merekomendasikan sumber belajar tambahan. Dengan cara ini, peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan selama proses belajar masih berlangsung, bukan setelah proses pembelajaran selesai.

Perkembangan teknologi digital semakin memperkuat pelaksanaan penilaian formatif. Melalui *Learning Management System* (LMS), guru dapat menyelenggarakan kuis daring, memberikan tugas secara bertahap, memantau tingkat penyelesaian pembelajaran, serta menganalisis hasil belajar peserta didik secara otomatis. Berbagai aplikasi pembelajaran juga menyediakan data mengenai tingkat partisipasi, waktu belajar, dan pencapaian kompetensi yang dapat digunakan guru sebagai dasar dalam mengambil keputusan pembelajaran. Pemanfaatan teknologi tersebut membantu proses evaluasi menjadi lebih cepat, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik.

Meskipun demikian, penggunaan teknologi tidak boleh mengurangi peran guru dalam memberikan bimbingan secara langsung. Data yang dihasilkan oleh sistem digital hanya menjadi alat bantu dalam memahami perkembangan peserta didik. Interpretasi terhadap data tersebut tetap memerlukan pertimbangan profesional guru yang memahami karakter, kebutuhan, serta latar belakang setiap peserta didik. Oleh karena itu, penilaian formatif yang efektif merupakan perpaduan antara pemanfaatan teknologi dan interaksi edukatif yang berlangsung secara personal.

Dalam pendidikan Islam, penilaian formatif memiliki kesesuaian dengan prinsip pembinaan yang dilakukan secara

bertahap (*tadarruj*). Proses pendidikan tidak diarahkan untuk mencari kesalahan peserta didik, tetapi membantu mereka berkembang melalui bimbingan, nasihat, dan perbaikan yang terus-menerus. Guru berperan sebagai pembimbing yang mendampingi peserta didik dalam setiap tahap pembelajaran, memberikan motivasi ketika mengalami kesulitan, serta mengarahkan mereka agar terus meningkatkan kualitas ilmu, akhlak, dan keterampilannya. Dengan demikian, evaluasi menjadi bagian dari proses *muhasabah*, yaitu refleksi yang mendorong perbaikan diri secara berkelanjutan.

Penilaian formatif juga mendorong tumbuhnya budaya belajar yang lebih aktif. Peserta didik tidak lagi hanya menunggu hasil ujian akhir untuk mengetahui kemampuan mereka, tetapi memperoleh kesempatan melakukan refleksi terhadap proses belajar yang sedang dijalani. Mereka dapat mengenali kelebihan dan kekurangan, menyusun strategi belajar yang lebih efektif, serta meningkatkan tanggung jawab terhadap perkembangan dirinya sendiri. Kondisi ini membantu membangun kemandirian belajar yang menjadi salah satu kompetensi penting dalam pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*).

B. Pengukuran Dampak Inovasi dengan *Data Analytics*

Keberhasilan inovasi dalam pendidikan tidak dapat diukur hanya dari banyaknya program yang dilaksanakan, jumlah perangkat teknologi yang dimiliki, atau besarnya anggaran yang telah digunakan. Inovasi baru dapat dikatakan berhasil apabila mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, perkembangan kompetensi peserta didik, efektivitas kinerja guru, serta peningkatan mutu pengelolaan lembaga. Oleh karena itu, setiap program inovasi memerlukan sistem evaluasi yang mampu menunjukkan hasil secara objektif sehingga keberhasilan maupun kelemahannya dapat diketahui secara jelas.

Selama ini, proses evaluasi di banyak lembaga pendidikan masih didominasi oleh laporan administratif dan pengamatan yang bersifat subjektif. Meskipun pengalaman guru dan pimpinan lembaga tetap memiliki nilai yang penting, pengambilan keputusan akan menjadi lebih tepat apabila didukung oleh data yang akurat. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan berbagai aktivitas pembelajaran direkam secara sistematis sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu program. Pendekatan ini dikenal sebagai pemanfaatan *data analytics* dalam pengelolaan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan Islam, penggunaan *data analytics* tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru ataupun mengubah pendidikan menjadi sekadar proses yang diukur melalui angka. Sebaliknya, data diposisikan sebagai alat bantu dalam memahami kondisi pembelajaran secara lebih menyeluruh. Guru tetap menjadi pihak yang menafsirkan informasi tersebut berdasarkan karakter peserta didik, kondisi lingkungan belajar, serta tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Dengan demikian, data menjadi dasar yang memperkuat pengambilan keputusan, bukan menggantikan kebijaksanaan pendidik.

1. Memahami Pola Keterlibatan Peserta Didik

Salah satu manfaat utama *data analytics* adalah kemampuannya menggambarkan tingkat keterlibatan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Melalui *Learning Management System* (LMS) maupun berbagai platform pembelajaran digital lainnya, guru dapat memperoleh informasi mengenai kehadiran peserta didik, frekuensi mengakses materi, waktu yang digunakan untuk belajar, tingkat partisipasi dalam forum diskusi, penyelesaian tugas, hingga perkembangan hasil evaluasi dari waktu ke waktu. Data tersebut memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai proses belajar dibandingkan hanya mengandalkan nilai ujian.

Informasi yang terkumpul memungkinkan guru mengenali pola belajar setiap peserta didik. Misalnya, terdapat peserta didik yang aktif mengikuti diskusi tetapi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas tertulis. Sebaliknya, ada pula peserta didik yang memperoleh nilai baik, tetapi jarang berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif. Dengan memahami karakteristik tersebut, guru dapat memberikan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik sehingga proses belajar menjadi lebih efektif.

Data analytics juga membantu guru mengidentifikasi gejala awal terjadinya kesulitan belajar. Penurunan frekuensi kehadiran, keterlambatan mengumpulkan tugas, berkurangnya aktivitas dalam forum diskusi, atau penurunan hasil evaluasi secara bertahap dapat menjadi indikator bahwa peserta didik sedang menghadapi kendala tertentu. Kendala tersebut tidak selalu berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor motivasi, kondisi keluarga, kesehatan, maupun keterbatasan akses terhadap teknologi. Dengan mengetahui kondisi tersebut sejak dini, guru dapat memberikan pendampingan sebelum masalah berkembang menjadi lebih kompleks.

Pendekatan ini menjadikan proses pembelajaran lebih bersifat preventif daripada reaktif. Guru tidak perlu menunggu hingga nilai akhir peserta didik menurun untuk memberikan bantuan. Sebaliknya, berbagai indikator yang diperoleh melalui *data analytics* dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) sehingga intervensi dilakukan pada waktu yang tepat. Bentuk pendampingan yang diberikan dapat berupa bimbingan belajar, konsultasi pribadi, penyesuaian metode pembelajaran, maupun komunikasi dengan orang tua apabila diperlukan.

Meskipun demikian, pemanfaatan data harus tetap memperhatikan prinsip etika dan perlindungan privasi peserta

didik. Informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan pembelajaran dan tidak boleh disalahgunakan untuk memberikan stigma atau perlakuan yang diskriminatif. Lembaga pendidikan perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan data, termasuk mekanisme penyimpanan, akses, serta perlindungan informasi pribadi sesuai dengan prinsip keamanan data.

Dalam perspektif pendidikan Islam, penggunaan *data analytics* perlu diarahkan untuk memperkuat fungsi pembinaan (*tarbiyah*), bukan sekadar meningkatkan pengawasan. Data menjadi sarana untuk memahami kebutuhan peserta didik secara lebih baik sehingga guru dapat memberikan perhatian yang lebih tepat, adil, dan proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan perkembangan yang berbeda sehingga memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

2. Menilai Efektivitas Program dan Pembelajaran

Selain membantu memantau perkembangan peserta didik, *data analytics* juga berperan penting dalam mengevaluasi efektivitas berbagai program dan inovasi yang diterapkan di lembaga pendidikan. Setiap kebijakan, baik berupa perubahan kurikulum, penerapan metode pembelajaran baru, penggunaan teknologi digital, maupun pengembangan program penguatan karakter, perlu dievaluasi berdasarkan bukti yang dapat diukur. Evaluasi semacam ini membantu lembaga mengetahui apakah suatu inovasi benar-benar memberikan dampak positif atau masih memerlukan penyempurnaan.

Dalam praktiknya, keberhasilan suatu program tidak cukup dinilai dari antusiasme peserta didik atau kesan positif selama pelaksanaan. Lembaga perlu membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program diterapkan dengan menggunakan berbagai indikator yang relevan. Misalnya,

ketika sebuah madrasah mulai menerapkan model *flipped classroom*, pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*), atau laboratorium virtual, evaluasi dapat dilakukan dengan melihat perubahan hasil belajar, tingkat partisipasi siswa, kualitas diskusi, kemampuan berpikir kritis, keterampilan kolaborasi, serta tingkat kehadiran selama proses pembelajaran. Analisis tersebut memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai manfaat program sekaligus menunjukkan bagian mana yang masih perlu diperbaiki.

Pemanfaatan *data analytics* juga memungkinkan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Data yang terkumpul dari waktu ke waktu dapat menunjukkan tren perkembangan suatu program sehingga pengelola tidak hanya mengetahui hasil akhirnya, tetapi juga memahami proses perubahan yang terjadi. Apabila suatu inovasi belum memberikan hasil yang diharapkan, lembaga dapat segera melakukan penyesuaian terhadap metode pembelajaran, materi, atau strategi pelaksanaannya tanpa harus menunggu program berakhir. Dengan demikian, evaluasi menjadi bagian dari proses peningkatan mutu yang berlangsung secara terus-menerus.

Pendekatan berbasis data juga membantu mengurangi pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada asumsi atau pengalaman pribadi. Setiap kebijakan dapat dirancang berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses pembelajaran sehingga perencanaan program berikutnya menjadi lebih tepat sasaran. Budaya kerja seperti ini mendorong lahirnya *evidence-based decision making*, yaitu pengambilan keputusan yang bertumpu pada data, hasil evaluasi, dan kebutuhan nyata di lapangan. Bagi lembaga pendidikan Islam, pendekatan tersebut mendukung terciptanya tata kelola yang lebih akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

3. Menjaga Etika dalam Pengelolaan Data

Pemanfaatan *data analytics* dalam pendidikan harus selalu diiringi dengan tanggung jawab etis. Informasi mengenai identitas peserta didik, perkembangan akademik, aktivitas belajar, maupun rekam jejak digital merupakan bagian dari data pribadi yang harus dilindungi. Oleh karena itu, setiap proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan data perlu dilakukan sesuai dengan prinsip keamanan informasi, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap hak-hak peserta didik.

Dalam konteks pendidikan Islam, pengelolaan data tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga. Informasi yang dimiliki lembaga pendidikan tidak boleh digunakan untuk memberikan stigma, membandingkan peserta didik secara tidak adil, atau membatasi kesempatan belajar berdasarkan hasil analisis tertentu. Sebaliknya, data harus dimanfaatkan untuk membantu guru memahami kebutuhan peserta didik, memberikan pendampingan yang lebih tepat, serta menciptakan layanan pembelajaran yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Lembaga pendidikan juga perlu membangun sistem tata kelola data yang jelas dan transparan. Kebijakan tersebut mencakup jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, pihak yang berhak mengakses, jangka waktu penyimpanan, serta mekanisme perlindungan terhadap kebocoran informasi. Selain itu, guru dan tenaga kependidikan perlu memperoleh pelatihan mengenai etika penggunaan data digital agar mampu mengelola informasi secara profesional dan bertanggung jawab.

Seiring berkembangnya pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) dalam dunia pendidikan, perhatian terhadap etika menjadi semakin penting. Analisis yang dihasilkan oleh sistem AI dapat membantu

mengidentifikasi pola belajar peserta didik, tetapi hasil tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan. Penilaian profesional guru, kondisi sosial peserta didik, serta pertimbangan kemanusiaan tetap harus menjadi bagian utama dalam proses evaluasi. Teknologi berfungsi sebagai alat pendukung, bukan sebagai pengganti pertimbangan pedagogis yang dimiliki pendidik.

C. Sertifikasi Kompetensi Berbasis Portofolio

Perkembangan sistem pendidikan dan dunia kerja menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kompetensi tidak lagi hanya didasarkan pada nilai ujian atau ijazah. Lembaga pendidikan tinggi, dunia industri, dan berbagai organisasi semakin membutuhkan bukti nyata mengenai kemampuan seseorang dalam menerapkan pengetahuan, menyelesaikan masalah, bekerja sama, serta menghasilkan karya. Oleh karena itu, sistem sertifikasi perlu bergeser dari pendekatan yang hanya menilai hasil akhir menuju pendekatan yang mampu mendokumentasikan proses, pengalaman, dan pencapaian peserta didik secara lebih menyeluruh.

Dalam konteks pendidikan Islam, perubahan tersebut memiliki relevansi yang tinggi. Selama ini banyak kompetensi yang berkembang di madrasah dan pesantren belum terdokumentasi secara optimal dalam dokumen akademik formal. Kemampuan membaca dan memahami *turats*, hafalan Al-Qur'an, pengalaman berdakwah, kepemimpinan organisasi santri, pengabdian kepada masyarakat, hingga keterampilan memanfaatkan teknologi digital merupakan bagian penting dari proses pendidikan yang membentuk karakter dan kompetensi lulusan. Namun, berbagai kemampuan tersebut sering kali belum memperoleh ruang yang memadai dalam sistem sertifikasi konvensional.

Sertifikasi berbasis portofolio memberikan alternatif yang lebih komprehensif karena mampu merekam perjalanan belajar peserta didik secara berkelanjutan. Portofolio tidak

hanya menunjukkan apa yang telah dipelajari, tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam berbagai kegiatan akademik, sosial, maupun profesional. Dengan demikian, sertifikasi tidak lagi dipahami sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai representasi perkembangan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Membangun Portofolio Digital yang Komprehensif

Portofolio digital merupakan kumpulan bukti belajar yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan perkembangan kompetensi peserta didik selama menempuh pendidikan. Berbeda dengan rapor yang hanya menampilkan nilai numerik, portofolio memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kemampuan, pengalaman, kreativitas, dan kontribusi peserta didik dalam berbagai bidang.

Melalui platform digital, peserta didik dapat mendokumentasikan hasil proyek, karya tulis, laporan penelitian, presentasi, video pembelajaran, sertifikat pelatihan, dokumentasi kegiatan organisasi, maupun pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam satu sistem yang terintegrasi. Seluruh dokumen tersebut tersusun secara kronologis sehingga perkembangan kompetensi dapat diamati dari waktu ke waktu.

Di lingkungan pendidikan Islam, isi portofolio dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga. Selain capaian akademik, peserta didik dapat menambahkan bukti hafalan Al-Qur'an, kemampuan membaca kitab *turats*, karya dakwah digital, aktivitas kewirausahaan pesantren, prestasi musabaqah, keterlibatan dalam kegiatan sosial keagamaan, maupun berbagai bentuk kepemimpinan yang pernah dijalankan. Dengan demikian, portofolio mampu menampilkan keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter.

Keberadaan portofolio digital juga memberikan manfaat dalam jangka panjang. Seluruh rekam jejak kompetensi tersimpan secara lebih rapi, mudah diperbarui, dan dapat dimanfaatkan ketika peserta didik melanjutkan pendidikan, mengikuti program sertifikasi profesi, maupun memasuki dunia kerja. Portofolio menjadi bukti konkret mengenai kemampuan yang dimiliki, bukan sekadar daftar nilai yang tercantum dalam ijazah.

2. Menghubungkan Tradisi Keilmuan dengan Sistem Kredensial Modern

Salah satu tantangan dalam pengembangan pendidikan Islam adalah membangun hubungan antara sistem pengakuan keilmuan yang telah lama berkembang di pesantren dengan sistem sertifikasi yang digunakan dalam pendidikan modern. Selama berabad-abad, pesantren mengenal tradisi *sanad*, *ijazah* keilmuan, dan pengakuan langsung dari guru sebagai bentuk legitimasi atas penguasaan suatu disiplin ilmu. Pengakuan tersebut memiliki nilai akademik dan moral yang tinggi karena diberikan setelah guru menilai kemampuan, adab, dan kesiapan peserta didik untuk mengajarkan kembali ilmu yang telah dipelajarinya. Akan tetapi, bentuk pengakuan seperti ini sering kali belum mudah dipahami oleh lembaga pendidikan, dunia kerja, maupun institusi internasional yang lebih terbiasa menggunakan sertifikat formal dan standar kompetensi yang terstruktur.

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang untuk menjembatani kedua sistem tersebut tanpa harus menghilangkan karakteristik pendidikan Islam. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah penggunaan *digital badges* dan *micro-credentials* sebagai pelengkap sertifikasi konvensional. Setiap kompetensi yang berhasil dikuasai peserta didik dapat diberikan kredensial digital yang memuat informasi mengenai capaian pembelajaran, standar kompetensi, metode penilaian, waktu pencapaian, serta

lembaga atau guru yang memberikan pengakuan. Dengan sistem ini, kompetensi yang diperoleh melalui berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik dapat terdokumentasi secara lebih sistematis dan mudah diverifikasi.

Di lingkungan madrasah dan pesantren, *digital badges* dapat digunakan untuk mendokumentasikan beragam kemampuan peserta didik, seperti hafalan Al-Qur'an, penguasaan kitab *turats*, kemampuan berbahasa Arab dan Inggris, keterampilan dakwah, kepemimpinan organisasi, literasi digital, hingga partisipasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap capaian memperoleh pengakuan tersendiri sehingga perkembangan kompetensi peserta didik dapat terlihat secara lebih rinci dibandingkan hanya melalui nilai rapor atau ijazah.

Penerapan sistem kredensial digital juga memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk terus memperbarui rekam jejak kompetensinya. Setiap pelatihan, seminar, proyek, kompetisi, maupun pengalaman belajar lainnya dapat ditambahkan ke dalam portofolio digital sehingga proses belajar tercatat sebagai perjalanan yang berkelanjutan (*lifelong learning*). Dengan demikian, sertifikasi tidak berhenti ketika peserta didik menyelesaikan pendidikan formal, tetapi terus berkembang mengikuti peningkatan kompetensi yang dimilikinya.

Yang tidak kalah penting, integrasi antara tradisi keilmuan pesantren dan sistem kredensial modern tidak dimaksudkan untuk menggantikan nilai-nilai yang telah diwariskan dalam pendidikan Islam. Tradisi *sanad*, *ijazah* keilmuan, dan hubungan guru-murid tetap menjadi fondasi utama dalam proses transmisi ilmu. Teknologi berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat dokumentasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas pengakuan terhadap kompetensi lulusan. Dengan pendekatan tersebut, lulusan madrasah dan pesantren memiliki identitas akademik yang tetap berakar pada

tradisi keilmuan Islam, sekaligus lebih mudah diterima dan dipahami dalam sistem pendidikan serta dunia kerja yang semakin terdigitalisasi.

3. Mengakui Pengalaman Belajar di Berbagai Lingkungan

Pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga terjadi melalui berbagai aktivitas yang dijalani peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi, kegiatan sosial, pengabdian kepada masyarakat, program magang, pelatihan, kompetisi, penelitian, hingga kegiatan kewirausahaan merupakan bagian dari proses belajar yang berkontribusi terhadap pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Oleh karena itu, sistem sertifikasi perlu memberikan ruang bagi pengakuan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh dari berbagai lingkungan, baik formal, nonformal, maupun informal.

Sertifikasi berbasis portofolio memungkinkan seluruh pengalaman tersebut didokumentasikan secara sistematis sebagai bukti pencapaian kompetensi. Melalui portofolio digital, peserta didik dapat menyimpan laporan kegiatan, sertifikat, dokumentasi proyek, karya yang dihasilkan, surat keterangan, maupun refleksi pribadi yang menunjukkan proses belajar yang telah dilalui. Bukti-bukti tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kemampuan peserta didik dibandingkan hanya mengandalkan nilai ujian atau transkrip akademik.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Rekognisi Pembelajaran Lampau* (RPL), yaitu mekanisme yang memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang diperoleh melalui pengalaman belajar di luar jalur pendidikan formal. Melalui RPL, pengalaman yang relevan dapat dinilai dan diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran apabila memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peserta didik tidak perlu mengulang proses

pembelajaran untuk kompetensi yang telah benar-benar mereka kuasai.

Dalam pendidikan Islam, penerapan RPL memiliki relevansi yang sangat besar karena banyak proses pembelajaran berlangsung melalui praktik langsung di tengah masyarakat. Pengalaman mengelola unit usaha pesantren, menjadi imam atau khatib, membimbing kegiatan keagamaan, mengikuti program dakwah, menjadi pengurus organisasi santri, mengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), atau terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk pembelajaran yang menghasilkan kompetensi nyata. Selama ini, berbagai pengalaman tersebut sering kali belum memperoleh pengakuan yang memadai dalam sistem sertifikasi formal, padahal memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan kepemimpinan, komunikasi, manajemen, dan tanggung jawab sosial.

Portofolio juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perkembangan kompetensinya secara berkelanjutan. Setiap pengalaman baru dapat ditambahkan ke dalam portofolio sehingga rekam jejak pembelajaran terus berkembang sepanjang proses pendidikan. Hal ini mendorong peserta didik untuk aktif mencari pengalaman belajar di berbagai lingkungan, bukan hanya berorientasi pada penyelesaian tugas akademik di kelas.

D. *Benchmarking* dengan Standar Internasional

Meningkatnya mobilitas peserta didik, kerja sama akademik lintas negara, serta perkembangan ilmu pengetahuan yang berlangsung sangat cepat menyebabkan kualitas pendidikan semakin sering diukur dengan mengacu pada standar internasional. Lembaga pendidikan tidak lagi hanya dinilai berdasarkan capaian di tingkat lokal atau nasional, tetapi juga berdasarkan kemampuannya memenuhi indikator mutu yang diakui secara global. Bagi pendidikan Islam, kondisi ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Di satu

sisi, lembaga perlu mempertahankan identitas, nilai, dan tradisi keilmuan Islam yang menjadi karakter utamanya. Di sisi lain, lembaga juga perlu terus meningkatkan mutu agar lulusan memiliki daya saing, memperoleh pengakuan yang lebih luas, dan mampu berpartisipasi dalam komunitas akademik internasional.

Dalam konteks tersebut, *benchmarking* perlu dipahami sebagai proses pembelajaran kelembagaan yang bertujuan mengidentifikasi, mempelajari, dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari berbagai institusi pendidikan. *Benchmarking* bukan berarti meniru seluruh sistem pendidikan yang berkembang di negara lain, melainkan memilih berbagai praktik yang telah terbukti efektif, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan, budaya, dan tujuan pendidikan Islam. Dengan pendekatan seperti ini, peningkatan mutu dapat dilakukan tanpa menghilangkan jati diri lembaga.

1. Menjadikan *Benchmarking* sebagai Proses Pembelajaran

Penerapan *benchmarking* sebaiknya dimulai dengan membangun budaya belajar di tingkat kelembagaan. Madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi Islam perlu memandang institusi lain sebagai sumber pembelajaran, bukan semata-mata sebagai pesaing. Melalui kegiatan studi banding, kerja sama akademik, forum ilmiah, penelitian bersama, maupun pertukaran pengalaman, lembaga dapat memperoleh wawasan mengenai berbagai strategi yang berhasil diterapkan dalam pengelolaan pembelajaran, pengembangan kurikulum, pemanfaatan teknologi, sistem penjaminan mutu, tata kelola kelembagaan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Proses tersebut memberikan kesempatan bagi lembaga pendidikan Islam untuk memahami bagaimana institusi lain meningkatkan kualitas layanan pendidikan, membangun budaya akademik yang kuat, mengembangkan inovasi pembelajaran, serta memanfaatkan teknologi secara efektif. Berbagai pengalaman tersebut dapat menjadi bahan evaluasi

sekaligus inspirasi dalam menyusun strategi pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga.

Meskipun demikian, *benchmarking* tidak boleh dipahami sebagai proses menyalin praktik pendidikan dari luar secara utuh. Setiap inovasi perlu dianalisis terlebih dahulu dengan mempertimbangkan visi lembaga, karakteristik peserta didik, kondisi sosial budaya, serta nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan Islam. Pendekatan yang berhasil diterapkan di suatu negara belum tentu memberikan hasil yang sama apabila diterapkan pada konteks yang berbeda. Oleh karena itu, proses adaptasi menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan *benchmarking*.

Bagi pendidikan Islam, proses adaptasi tersebut juga harus memastikan bahwa setiap inovasi tetap mendukung tujuan pembentukan insan yang berilmu, berakhlak, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Penguatan literasi digital, pembelajaran berbasis proyek, pengembangan riset, maupun sistem penjaminan mutu internasional dapat diadopsi sepanjang tidak menghilangkan peran pendidikan dalam membentuk karakter, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial peserta didik.

2. Menyelaraskan Standar Mutu dengan Tujuan Pendidikan Islam

Berbagai standar mutu internasional umumnya menggunakan indikator yang berkaitan dengan capaian akademik, seperti kemampuan literasi dan numerasi, kualitas pembelajaran, produktivitas penelitian, tata kelola kelembagaan, inovasi pendidikan, internasionalisasi, serta kepuasan peserta didik dan pemangku kepentingan. Indikator-indikator tersebut memberikan ukuran yang objektif untuk menilai kinerja lembaga pendidikan dan memudahkan perbandingan antarinstansi di tingkat nasional maupun internasional. Melalui standar yang jelas, lembaga dapat mengetahui kekuatan yang dimiliki sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Namun, pendidikan Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Pendidikan Islam juga bertujuan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, memiliki integritas, bertanggung jawab terhadap masyarakat, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan lembaga pendidikan tidak cukup diukur hanya dari prestasi akademik, jumlah publikasi, atau tingkat kelulusan, tetapi juga dari keberhasilannya membangun karakter, etika, kepedulian sosial, dan spiritualitas peserta didik.

Atas dasar tersebut, proses *benchmarking* perlu diarahkan pada upaya mengintegrasikan standar mutu internasional dengan tujuan pendidikan Islam. Berbagai indikator global tetap dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tata kelola, penelitian, maupun inovasi, tetapi perlu dilengkapi dengan indikator yang mencerminkan keberhasilan pembinaan karakter dan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, sistem penjaminan mutu menjadi lebih komprehensif karena menilai aspek akademik sekaligus perkembangan moral dan sosial peserta didik.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah menjadikan prinsip *maqashid syariah* sebagai kerangka dalam menyusun indikator mutu lembaga. Perlindungan agama (*hifz al-din*), pengembangan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), penguatan tanggung jawab ekonomi (*hifz al-mal*), serta perlindungan terhadap keturunan dan martabat manusia (*hifz al-nasl* dan *hifz al-'irdh*) dapat menjadi landasan dalam mengevaluasi dampak pendidikan. Dengan kerangka tersebut, keberhasilan lembaga tidak hanya dilihat dari tingginya prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan lulusan yang berintegritas, memiliki kepedulian sosial, mampu berpikir kritis, serta berkontribusi bagi kemajuan masyarakat.

Pendekatan yang memadukan standar mutu internasional dengan prinsip *maqashid syariah* memungkinkan proses evaluasi berlangsung secara lebih seimbang. Pendidikan Islam tetap mampu memenuhi tuntutan kualitas global tanpa kehilangan orientasi utamanya sebagai proses pembentukan manusia yang berilmu, berakhlak, dan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan. Dengan demikian, *benchmarking* tidak hanya menjadi sarana meningkatkan daya saing lembaga, tetapi juga memperkuat kontribusi pendidikan Islam dalam membangun peradaban yang berlandaskan ilmu, etika, dan tanggung jawab sosial.

3. Memperluas Pengakuan Mutu melalui Akreditasi Internasional

Salah satu bentuk nyata penerapan *benchmarking* adalah keikutsertaan lembaga pendidikan dalam sistem penjaminan mutu yang diakui secara internasional. Akreditasi dan sertifikasi internasional tidak seharusnya dipandang hanya sebagai upaya memperoleh pengakuan formal atau meningkatkan reputasi lembaga. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan sarana untuk membangun budaya evaluasi yang berkelanjutan, memperkuat tata kelola, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Bagi madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi Islam, keterlibatan dalam berbagai skema akreditasi internasional dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kelembagaan. Melalui proses tersebut, lembaga didorong untuk melakukan evaluasi diri secara berkala, menyempurnakan sistem pembelajaran, memperkuat kompetensi pendidik, meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Proses ini tidak hanya menghasilkan dokumen akreditasi, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous*

quality improvement) di seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan.

Akreditasi internasional juga membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan jejaring kerja sama. Lembaga yang memiliki sistem penjaminan mutu yang diakui secara global akan lebih mudah menjalin kemitraan dengan sekolah, universitas, lembaga penelitian, maupun organisasi internasional dalam bentuk pertukaran pelajar, kolaborasi penelitian, pengembangan kurikulum, pelatihan dosen dan guru, serta berbagai program akademik lainnya. Kemitraan tersebut memperkaya pengalaman belajar peserta didik sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik.

Yang tidak kalah penting, penerapan standar internasional tidak berarti menghilangkan identitas pendidikan Islam. Kurikulum keislaman, pembinaan akhlak, tradisi pesantren, dan nilai-nilai spiritual tetap menjadi ciri khas yang membedakan lembaga pendidikan Islam dengan institusi lainnya. Standar internasional justru dapat dimanfaatkan untuk memperkuat aspek tata kelola, manajemen mutu, sistem pembelajaran, serta pelayanan akademik, sementara substansi pendidikan tetap berlandaskan ajaran Islam. Dengan demikian, peningkatan mutu berlangsung melalui integrasi antara standar global dan karakteristik lokal yang menjadi kekuatan lembaga.

Manfaat dari penguatan mutu tersebut juga dirasakan secara langsung oleh peserta didik dan lulusan. Lembaga yang memiliki pengakuan internasional umumnya lebih dipercaya oleh perguruan tinggi, dunia usaha, maupun berbagai institusi profesional. Kondisi ini membuka peluang yang lebih besar bagi lulusan untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti program pertukaran mahasiswa, memperoleh beasiswa, maupun memasuki dunia kerja pada tingkat nasional dan internasional. Selain membawa manfaat bagi individu, hal

tersebut juga meningkatkan reputasi lembaga dan memperluas kontribusinya dalam pengembangan pendidikan Islam.

E. Simpulan

Bab ini membahas sistem penilaian dan evaluasi inovasi pendidikan Islam, mencakup metode penilaian autentik dan formatif, pemanfaatan data analytics, sertifikasi berbasis portofolio, dan benchmarking dengan standar internasional.

Penilaian autentik memberikan kesempatan peserta didik menunjukkan kompetensi melalui tugas yang mencerminkan situasi nyata, sejalan dengan kesatuan ilmu-amal-akhlak dalam pendidikan Islam. Penilaian formatif dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan umpan balik cepat dan mendorong perbaikan, sesuai prinsip tadarruj dan muhasabah.

Data Analytics dimanfaatkan untuk: (1) memahami pola keterlibatan peserta didik melalui early warning system; (2) menilai efektivitas program dan pembelajaran secara berkelanjutan; dan (3) mendukung evidence-based decision making, dengan tetap menjaga etika pengelolaan data dan perlindungan privasi.

Sertifikasi berbasis portofolio digital mengakui: (1) capaian akademik, tradisi keilmuan (sanad), dan pengalaman belajar di berbagai lingkungan; (2) menghubungkan tradisi keilmuan pesantren dengan sistem kredensial modern melalui digital badges dan micro-credentials; dan (3) menerapkan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Benchmarking dengan standar internasional dilakukan sebagai proses pembelajaran, bukan peniruan buta, dengan: (1) menyelaraskan standar mutu dengan tujuan pendidikan Islam dan Maqashid Syariah; (2) mengintegrasikan indikator global dengan indikator pembinaan karakter dan nilai-nilai keislaman; dan (3) memperluas pengakuan mutu melalui akreditasi internasional tanpa kehilangan identitas.

F. Soal Latihan

1. Desain Penilaian Autentik dan Formatif

Rancanglah sistem penilaian autentik dan formatif untuk satu mata pelajaran PAI (pilih salah satu)! Sertakan: (a) jenis penilaian autentik (proyek, portofolio, presentasi), (b) mekanisme penilaian formatif berkelanjutan, (c) rubrik penilaian yang mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, (d) strategi pemberian umpan balik, dan (e) integrasi nilai-nilai Islam. (CPMK2, CPMK4)

2. Analisis Pemanfaatan Data Analytics

Pilihlah satu skenario penggunaan data analytics di lembaga pendidikan Islam (misalnya: memantau keterlibatan siswa di LMS, atau mengevaluasi efektivitas program)! Analisis: (a) jenis data yang dikumpulkan, (b) manfaat analisis data, (c) tantangan implementasi, (d) etika pengelolaan data dan perlindungan privasi, dan (e) rekomendasi kebijakan. (CPMK1, CPMK3)

3. Proyek Sistem Sertifikasi Portofolio

Rancanglah sistem sertifikasi berbasis portofolio digital untuk sebuah lembaga pendidikan Islam (pesantren atau madrasah)! Sertakan: (a) struktur portofolio (akademik, tradisi sanad, pengalaman nonformal), (b) mekanisme digital badges dan micro-credentials, (c) integrasi dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), (d) sistem verifikasi dan keamanan, dan (e) kebijakan implementasi. (CPMK2, CPMK4)

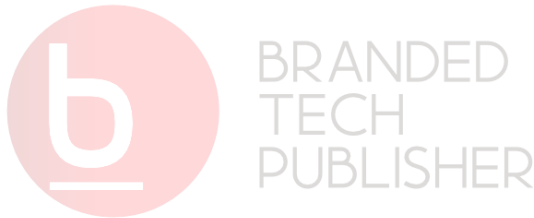
4. Analisis Benchmarking

Pilihlah satu standar akreditasi internasional (misalnya: FIBAA, AUN-QA, atau Cambridge)! Analisis: (a) indikator mutu yang digunakan, (b) kesesuaian dengan

tujuan pendidikan Islam, (c) strategi harmonisasi dengan Maqashid Syariah, (d) tantangan implementasi di lembaga pendidikan Islam, dan (e) rekomendasi adaptasi. (CPMK1, CPMK3)

5. Studi Kasus Evaluasi Inovasi

Carilah satu studi kasus evaluasi inovasi pendidikan di lembaga pendidikan Islam! Analisis: (a) metode evaluasi yang digunakan, (b) temuan evaluasi, (c) dampak temuan terhadap kebijakan, (d) kelebihan dan kelemahan metode, dan (e) rekomendasi perbaikan sistem evaluasi. (CPMK3, CPMK4)



BAB X

MASA DEPAN INOVASI PENDIDIKAN ISLAM

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Merumuskan visi pendidikan berkelanjutan pasca-pandemi yang mengintegrasikan kesadaran ekologis (*eco-theology*), ketahanan institusional, dan penguatan modal sosial.
2. Merancang strategi kolaborasi global untuk pemerataan pendidikan melalui kemitraan akademik, pengembangan sumber belajar terbuka (OER), dan penguatan solidaritas kemanusiaan.
3. Menganalisis etika dan tanggung jawab sosial inovasi pendidikan dengan fokus pada perlindungan martabat manusia, keadilan akses, dan orientasi riset untuk kemaslahatan umum.
4. Mengembangkan roadmap implementasi inovasi pendidikan Islam yang melibatkan peran aktif pemerintah, pimpinan lembaga, guru, dan tenaga pendidik sebagai pemangku kepentingan utama.

A. Visi Pendidikan Berkelanjutan Pasca-Pandemi

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu peristiwa yang membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Penutupan sekolah, pembatasan aktivitas tatap muka, dan penerapan pembelajaran jarak jauh mendorong lembaga pendidikan di berbagai negara untuk melakukan penyesuaian dalam waktu yang relatif singkat. Madrasah, pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi Islam juga mengalami tantangan yang sama. Berbagai aktivitas pembelajaran yang sebelumnya berlangsung secara langsung harus dialihkan ke platform digital dengan memanfaatkan *Learning Management System* (LMS), konferensi video, media sosial, maupun berbagai aplikasi pembelajaran lainnya.

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa kemampuan beradaptasi merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Lembaga yang mampu memanfaatkan teknologi, mengelola sumber daya secara fleksibel, dan membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik serta orang tua cenderung lebih siap menghadapi perubahan. Sebaliknya, lembaga yang belum memiliki kesiapan infrastruktur maupun sumber daya manusia menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan kualitas pembelajaran.

Meskipun pandemi telah berakhir, berbagai perubahan yang terjadi selama masa tersebut meninggalkan dampak yang bersifat jangka panjang. Pembelajaran digital, kolaborasi daring, pemanfaatan sumber belajar terbuka, serta penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan telah menjadi bagian dari praktik pendidikan sehari-hari. Oleh karena itu, sistem pendidikan tidak lagi dapat kembali sepenuhnya pada pola sebelum pandemi, tetapi perlu mengembangkan model yang lebih adaptif dengan memadukan keunggulan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Namun demikian, transformasi digital bukanlah tujuan akhir pendidikan. Teknologi harus dipahami sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran, memperluas akses pendidikan, memperkuat kolaborasi, dan mempermudah pengelolaan lembaga. Keberhasilan pendidikan tetap ditentukan oleh kualitas interaksi antara guru dan peserta didik, relevansi kurikulum, budaya akademik yang sehat, serta kemampuan lembaga dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan teknologi harus selalu diarahkan untuk mendukung tujuan pendidikan, bukan menggantikan peran manusia dalam proses pembelajaran.

Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam memerlukan visi pendidikan berkelanjutan (*sustainable education*) yang mampu mengintegrasikan aspek akademik, sosial, spiritual, teknologi, dan lingkungan secara seimbang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia, mampu berpikir kritis, peduli terhadap sesama, menghargai keberagaman, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan visi seperti ini, lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi landasan utamanya.

Konsep keberlanjutan dalam pendidikan Islam memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama. Islam memandang manusia sebagai *khalifah fil ardh* yang memiliki amanah untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab, menjaga keseimbangan alam, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan ekonomi atau teknologi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Nilai-nilai ini sejalan

dengan berbagai agenda pembangunan berkelanjutan yang berkembang pada tingkat global.

Oleh karena itu, visi pendidikan berkelanjutan pasca-pandemi tidak hanya berfokus pada pemulihan dampak krisis, tetapi juga pada pembangunan sistem pendidikan yang lebih tangguh (*resilient*), inklusif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Lembaga pendidikan perlu memiliki kemampuan untuk merespons perubahan sosial, perkembangan teknologi, dinamika ekonomi, maupun berbagai tantangan global lainnya tanpa mengabaikan fungsi utamanya sebagai tempat pembentukan karakter, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pembinaan nilai-nilai keislaman.

Dengan visi tersebut, pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi institusi yang tidak hanya bertahan menghadapi perubahan, tetapi juga mampu memimpin inovasi pendidikan yang berpijak pada ilmu pengetahuan, nilai-nilai Islam, dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan yang berkelanjutan pada akhirnya menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang memiliki kompetensi akademik, kecakapan hidup, kepedulian sosial, kesadaran lingkungan, serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijaksana untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan prinsip tersebut, visi pendidikan berkelanjutan pasca-pandemi dalam pendidikan Islam dapat dikembangkan melalui tiga pilar strategis yang saling melengkapi, yaitu penguatan ketahanan sistem pendidikan, pengembangan inovasi yang berkelanjutan, serta pembentukan generasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan kehidupannya.

1. Integrasi Kesadaran Ekologis dan *Maqashid Syariah*

Visi pendidikan Islam pada masa depan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab menjaga keberlanjutan

lingkungan. Perubahan iklim, berkurangnya ketersediaan air bersih, pencemaran, hingga meningkatnya frekuensi bencana alam menunjukkan bahwa persoalan lingkungan telah menjadi bagian dari kehidupan yang akan dihadapi oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, pendidikan tidak cukup hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan akademik, tetapi juga perlu membangun kesadaran bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari amanah yang diberikan Allah Swt.

Dalam perspektif Islam, kepedulian terhadap lingkungan bukan sekadar persoalan sosial atau ilmiah, melainkan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai keagamaan. Al-Qur'an berulang kali mengingatkan manusia agar tidak melakukan kerusakan (*fasad*) di muka bumi serta memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Konsep manusia sebagai *khalifah fil ardh* menegaskan bahwa setiap individu memiliki amanah untuk mengelola alam secara bijaksana sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan lingkungan dalam Islam tidak hanya bertujuan membentuk perilaku ramah lingkungan, tetapi juga menanamkan kesadaran spiritual bahwa menjaga alam merupakan bagian dari ibadah.

Prinsip tersebut sejalan dengan kerangka *maqashid syariah*, khususnya dalam upaya menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah*). Kerusakan lingkungan pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia, ketahanan pangan, keberlangsungan ekonomi, bahkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan perlu dipandang sebagai bagian dari tujuan pendidikan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

Implementasi kesadaran ekologis tidak cukup dilakukan melalui penambahan materi tentang lingkungan dalam kurikulum. Nilai-nilai tersebut perlu diintegrasikan ke dalam

berbagai mata pelajaran dan kegiatan pendidikan. Dalam pembelajaran sains, peserta didik dapat mempelajari perubahan iklim, konservasi energi, dan pengelolaan sumber daya alam. Pada mata pelajaran fikih, pembahasan mengenai kebersihan, pemanfaatan air, dan etika terhadap lingkungan dapat dikaitkan dengan praktik kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pada pembelajaran akhlak, peserta didik dapat diajak memahami bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan wujud tanggung jawab sosial sekaligus pengamalan nilai-nilai keislaman.

Pembelajaran juga perlu memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik. Berbagai kegiatan seperti penanaman pohon, pengelolaan bank sampah, pembuatan kompos, pemanfaatan energi terbarukan dalam skala sederhana, konservasi air, maupun proyek penelitian lingkungan akan membantu peserta didik memahami bahwa menjaga alam bukan sekadar konsep, tetapi kebiasaan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan berbasis proyek semacam ini sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah.

Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan lingkungan. Sensor digital untuk memantau penggunaan listrik dan air, aplikasi pencatatan jejak karbon, *Internet of Things (IoT)* untuk pengelolaan energi, hingga sistem informasi lingkungan sekolah dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik. Peserta didik tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mampu membaca data, melakukan analisis sederhana, dan menyusun solusi berdasarkan kondisi nyata di lingkungan mereka. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana untuk membangun kesadaran ekologis, bukan sekadar alat pendukung pembelajaran.

Pada tingkat kelembagaan, madrasah dan pesantren dapat mengembangkan diri sebagai *Eco-Pesantren* atau *Green*

School. Konsep ini menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar program sesaat. Pengelolaan sampah berbasis pemilahan dan daur ulang, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penghijauan kawasan pendidikan, pemanfaatan pencahayaan alami, penghematan listrik dan air, serta penggunaan energi ramah lingkungan merupakan contoh langkah yang dapat diterapkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing lembaga.

Budaya ramah lingkungan juga perlu didukung oleh kebijakan kelembagaan. Penyusunan standar operasional yang mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, pengadaan produk yang lebih ramah lingkungan, serta pelibatan seluruh warga sekolah dalam kegiatan pelestarian lingkungan akan membentuk kebiasaan positif secara berkelanjutan. Ketika seluruh unsur lembaga memiliki komitmen yang sama, pendidikan lingkungan tidak lagi menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran tertentu, tetapi menjadi bagian dari budaya pendidikan.

Keberhasilan integrasi kesadaran ekologis juga memerlukan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Program penghijauan, bakti lingkungan, edukasi pengelolaan sampah, maupun kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi lingkungan, dan perguruan tinggi dapat memperluas dampak pendidikan di luar lingkungan sekolah. Peserta didik memperoleh pengalaman bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

2. Ketahanan Institusional dan Adaptabilitas Digital yang Berkeadilan

Keberlanjutan pendidikan Islam pada masa depan sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam menghadapi perubahan yang berlangsung semakin cepat. Pengalaman

selama pandemi menunjukkan bahwa lembaga yang mampu beradaptasi dengan cepat dapat mempertahankan proses pembelajaran dan tetap memberikan layanan kepada peserta didik, sedangkan lembaga yang kurang siap menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun tata kelola. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa ketahanan institusional (*institutional resilience*) perlu menjadi bagian penting dari strategi pengembangan pendidikan Islam.

Ketahanan institusional tidak hanya berarti kemampuan bertahan ketika menghadapi krisis, tetapi juga kemampuan untuk terus berkembang di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta dinamika kebutuhan masyarakat. Lembaga pendidikan perlu memiliki tata kelola yang adaptif, sistem pengambilan keputusan yang responsif, serta budaya organisasi yang terbuka terhadap pembelajaran dan inovasi. Dengan demikian, setiap perubahan dapat dikelola secara terencana tanpa mengganggu keberlangsungan proses pendidikan.

Salah satu karakter penting lembaga pendidikan masa depan adalah memiliki kelincahan organisasi (*institutional agility*). Kelincahan ini tercermin dari kemampuan lembaga dalam menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, maupun layanan akademik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan peserta didik. Perubahan tidak selalu harus dilakukan melalui reformasi besar, tetapi dapat diwujudkan melalui penyempurnaan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi yang berkelanjutan. Pendekatan seperti ini memungkinkan lembaga berkembang secara konsisten tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai yang menjadi landasannya.

Dalam konteks tersebut, pendidikan digital tidak perlu diposisikan sebagai pengganti pembelajaran tatap muka. Sebaliknya, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi.

Pembelajaran langsung tetap memiliki peran penting dalam membangun karakter, memperkuat interaksi antara guru dan peserta didik, serta menanamkan nilai-nilai keislaman. Di sisi lain, teknologi digital dapat memperluas akses terhadap sumber belajar, mempermudah komunikasi, mendukung pembelajaran mandiri, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, model pembelajaran hibrida (*hybrid learning*) menjadi salah satu alternatif yang memungkinkan lembaga memanfaatkan keunggulan kedua pendekatan tersebut secara seimbang.

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *learning analytics*, *Learning Management System (LMS)*, komputasi awan (*cloud computing*), hingga sumber belajar digital memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk menyusun materi yang lebih variatif, memberikan umpan balik secara lebih cepat, memantau perkembangan belajar peserta didik, serta mengidentifikasi kebutuhan belajar secara lebih tepat. Namun, seluruh pemanfaatan teknologi tersebut tetap memerlukan peran guru sebagai pembimbing yang memberikan arahan, membangun interaksi, serta menanamkan nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran.

Di sisi lain, transformasi digital harus dilaksanakan secara adil dan inklusif. Perbedaan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur masih menjadi tantangan di banyak wilayah, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Karena itu, strategi digitalisasi tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam. Lembaga pendidikan perlu mengembangkan solusi yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, seperti pemanfaatan *server* lokal, perpustakaan digital luring (*offline*), bahan ajar yang dapat diakses tanpa koneksi internet, maupun penggunaan perangkat dengan kebutuhan daya yang rendah.

Pendekatan bertahap seperti ini lebih memungkinkan seluruh lembaga ikut bertransformasi tanpa terbebani oleh tuntutan teknologi yang belum sesuai dengan kapasitasnya.

Pemerataan akses digital juga memerlukan dukungan berbagai pihak. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta lembaga filantropi dapat berkolaborasi dalam penyediaan infrastruktur, pelatihan guru, pengembangan konten pembelajaran, maupun pendampingan teknis. Kemitraan semacam ini akan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat kapasitas lembaga dalam memanfaatkan teknologi secara optimal.

Dalam perspektif pendidikan Islam, adaptasi digital tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan keadilan pendidikan. Prinsip *rahmatan lil 'alamin* menegaskan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, wilayah, maupun kondisi sosial. Teknologi tidak boleh menciptakan kesenjangan baru antara peserta didik yang memiliki akses dengan mereka yang menghadapi berbagai keterbatasan.

Selain itu, setiap pemanfaatan teknologi perlu disertai dengan penguatan literasi digital dan etika penggunaan teknologi. Peserta didik tidak hanya perlu menguasai keterampilan menggunakan perangkat digital, tetapi juga memahami tanggung jawab dalam memanfaatkan informasi secara bijaksana, menghormati privasi, menghindari penyebaran informasi yang tidak benar, serta menggunakan teknologi untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menghasilkan peserta didik yang kompeten secara teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang bertanggung jawab.

3. Penguatan Modal Sosial dan Ketahanan Komunitas

Kemajuan teknologi, otomatisasi, dan kecerdasan artifisial telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara manusia belajar, bekerja, dan berinteraksi. Meskipun berbagai pekerjaan dapat dibantu oleh mesin, terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Empati, kepedulian sosial, kejujuran, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan tetap menjadi kompetensi yang hanya dapat berkembang melalui proses pendidikan yang berpusat pada manusia. Oleh karena itu, visi pendidikan berkelanjutan perlu memberikan perhatian yang seimbang antara penguasaan teknologi dan pembentukan karakter.

Dalam konteks pendidikan Islam, pembangunan modal sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan. Modal sosial mengacu pada kepercayaan, kerja sama, kepedulian, serta hubungan yang saling menguatkan di antara anggota masyarakat. Keberadaan modal sosial yang kuat akan mempermudah terbentuknya budaya saling membantu, penyelesaian masalah secara musyawarah, serta partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bersama. Nilai-nilai tersebut telah lama hidup dalam tradisi pendidikan Islam melalui semangat *ukhuwah*, *ta'awun*, musyawarah, dan tanggung jawab sosial.

Madrasah dan pesantren memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun modal sosial tersebut. Selain menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan formal, kedua lembaga ini juga berfungsi sebagai pusat pembinaan karakter, pengembangan kepemimpinan, pembiasaan hidup sederhana, serta penanaman nilai-nilai kebersamaan. Kehidupan di lingkungan pesantren, misalnya, memberikan pengalaman kepada santri untuk belajar hidup berdampingan, saling membantu, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan berbagai persoalan melalui dialog. Pengalaman seperti ini

menjadi bekal penting dalam membentuk kemampuan sosial yang akan dibutuhkan ketika mereka hidup di tengah masyarakat.

Penguatan modal sosial juga dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang menghubungkan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Program pengabdian masyarakat, bakti sosial, pendampingan usaha mikro, edukasi kesehatan, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dan pesantren merupakan contoh kegiatan yang memungkinkan peserta didik menerapkan ilmu yang dipelajari sekaligus memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dan lingkungan sekitarnya. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik belajar bahwa ilmu pengetahuan memiliki fungsi sosial dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di era digital, pembangunan modal sosial menghadapi tantangan yang berbeda. Kemudahan berkomunikasi melalui media digital sering kali tidak diikuti dengan meningkatnya kualitas hubungan antarmanusia. Interaksi yang berlangsung melalui media sosial dapat memunculkan penyebaran informasi yang tidak benar, polarisasi, ujaran kebencian, hingga menurunnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi digital perlu disertai dengan penguatan etika, kemampuan berdialog, serta penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menanamkan adab berkomunikasi, sikap saling menghormati, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik.

Selain membangun hubungan sosial, lembaga pendidikan juga perlu memperkuat ketahanan komunitas (*community resilience*). Ketahanan komunitas merupakan kemampuan masyarakat untuk menghadapi berbagai perubahan, mengatasi tantangan, dan bangkit kembali ketika

menghadapi krisis. Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran bahwa komunitas yang memiliki solidaritas, kepemimpinan yang baik, dan budaya saling membantu cenderung lebih mampu menghadapi situasi sulit dibandingkan komunitas yang berjalan secara individual. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu membekali peserta didik dengan kemampuan bekerja sama, kepemimpinan, komunikasi, pemecahan masalah, dan kepedulian sosial agar mereka mampu menjadi bagian dari solusi ketika menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Penguatan ketahanan komunitas juga memerlukan kolaborasi yang erat antara sekolah, keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Pendidikan tidak dapat diselenggarakan secara efektif apabila hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan. Kemitraan dengan berbagai pihak memungkinkan tersedianya sumber daya, pengalaman, dan dukungan yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, madrasah dan pesantren dapat berkembang sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat yang memberikan manfaat tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya.

Dalam perspektif Islam, penguatan modal sosial merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bersama. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga mampu menjaga hubungan yang baik dengan Allah Swt., sesama manusia, dan lingkungan. Keseimbangan antara kemampuan akademik, karakter, dan tanggung jawab sosial inilah yang menjadi ciri penting pendidikan Islam yang berorientasi pada pembangunan peradaban.

B. Kolaborasi Global untuk Pendidikan Merata

Perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang interaksi yang semakin luas antarnegara, antarlembaga, dan antarkomunitas pendidikan. Akses terhadap pengetahuan kini dapat diperoleh tanpa dibatasi oleh jarak geografis sebagaimana terjadi beberapa dekade yang lalu. Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kualitas pendidikan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara lembaga pendidikan yang berada di kawasan perkotaan dengan lembaga yang berada di daerah terpencil, kepulauan, maupun wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Perbedaan akses terhadap infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia, fasilitas pembelajaran, hingga kesempatan mengembangkan jejaring akademik menyebabkan kualitas layanan pendidikan berkembang secara tidak merata.

Realitas tersebut juga dijumpai dalam pendidikan Islam. Sebagian pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam telah memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan administrasi, pembelajaran, maupun penelitian. Di sisi lain, masih banyak lembaga pendidikan yang menghadapi persoalan mendasar, seperti keterbatasan jaringan internet, minimnya perangkat pembelajaran, kurangnya tenaga pendidik sesuai bidang keahlian, serta terbatasnya akses terhadap sumber-sumber ilmu pengetahuan mutakhir. Perbedaan kondisi tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan masing-masing lembaga, melainkan sebagai tantangan bersama yang memerlukan kerja sama yang lebih luas. Upaya pemerataan pendidikan akan sulit dicapai apabila hanya mengandalkan kebijakan yang bersifat lokal atau berjalan sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, kolaborasi global menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat pemerataan mutu pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan kolaborasi global bukan sekadar penyelenggaraan kegiatan seremonial atau

penandatanganan nota kesepahaman antarlembaga, melainkan kerja sama yang dibangun atas dasar kebutuhan nyata, saling berbagi pengalaman, saling memperkuat kapasitas, dan bersama-sama mengembangkan inovasi pendidikan. Melalui kolaborasi semacam ini, pendidikan Islam dapat memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan, mempercepat peningkatan kualitas kelembagaan, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat global.

Beberapa langkah strategis dapat ditempuh untuk mewujudkan kolaborasi tersebut.

1. Membangun Kemitraan Akademik Lintas Negara

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan dunia pendidikan semakin terhubung tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Berbagai persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan, seperti transformasi digital, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, hingga penguatan karakter peserta didik, tidak lagi menjadi isu yang hanya dihadapi oleh satu negara. Kondisi ini membuka peluang bagi lembaga pendidikan Islam untuk membangun kerja sama yang lebih luas dengan berbagai institusi pendidikan, pusat penelitian, organisasi internasional, serta universitas di berbagai belahan dunia.

Kemitraan akademik internasional perlu dipahami sebagai proses saling belajar dan saling memperkuat, bukan sekadar upaya memperoleh pengakuan global. Melalui kerja sama yang setara, setiap lembaga dapat bertukar pengalaman, berbagi praktik baik, dan mengembangkan solusi bersama terhadap berbagai tantangan pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan pendidikan Islam terus berkembang tanpa kehilangan identitas, karena setiap inovasi yang diadopsi dapat disesuaikan dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat.

Bentuk kerja sama dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Penelitian kolaboratif mengenai pendidikan Islam, moderasi beragama, pembelajaran berbasis teknologi,

pendidikan karakter, hingga pengembangan kurikulum merupakan salah satu bentuk kemitraan yang dapat menghasilkan kontribusi ilmiah sekaligus memperkaya wawasan para peneliti. Selain itu, program pertukaran dosen, guru, mahasiswa, dan santri memberikan kesempatan untuk memahami sistem pendidikan di negara lain, memperluas pengalaman akademik, serta membangun jejaring profesional yang bermanfaat bagi pengembangan lembaga.

Kemitraan juga dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar internasional, lokakarya, pelatihan bersama, *joint conference*, maupun pengembangan kelas kolaboratif berbasis teknologi. Perkembangan platform digital memungkinkan kegiatan akademik tersebut dilakukan secara lebih mudah melalui pembelajaran daring, kuliah tamu internasional, *webinar*, maupun proyek penelitian lintas negara. Dengan demikian, keterbatasan jarak tidak lagi menjadi hambatan untuk membangun kolaborasi akademik.

Bagi madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam, kerja sama internasional merupakan kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan tradisi keilmuan Islam yang berkembang di Indonesia. Tradisi pesantren, sistem sanad keilmuan, kajian *turats*, pendidikan karakter, serta pengalaman dalam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern merupakan keunggulan yang memiliki nilai penting dalam diskusi akademik global. Melalui berbagai forum internasional, pengalaman tersebut dapat menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam pengembangan pendidikan Islam di tingkat dunia.

Di sisi lain, lembaga pendidikan Islam juga dapat memanfaatkan kemitraan internasional untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dosen dan guru memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan, penelitian, maupun program peningkatan kompetensi di luar negeri. Mahasiswa dan santri dapat memperluas wawasan akademik melalui program

pertukaran pelajar, magang internasional, atau kegiatan kolaboratif dengan peserta didik dari negara lain. Pengalaman tersebut akan memperkaya perspektif sekaligus meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam lingkungan yang multikultural.

Agar memberikan manfaat yang berkelanjutan, setiap kerja sama perlu dirancang berdasarkan kebutuhan nyata lembaga. Kemitraan tidak hanya diukur dari banyaknya nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang ditandatangani, tetapi dari program yang benar-benar terlaksana dan menghasilkan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan, pengembangan penelitian, serta peningkatan kompetensi peserta didik dan pendidik. Evaluasi secara berkala juga diperlukan agar setiap bentuk kerja sama dapat terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

2. Memperluas Akses terhadap Sumber Belajar Terbuka

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan pendidikan adalah belum meratanya akses terhadap sumber belajar yang berkualitas. Perbedaan kondisi ekonomi, letak geografis, dan kemampuan lembaga dalam menyediakan fasilitas pendidikan menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak selalu memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses buku, jurnal ilmiah, media pembelajaran, maupun berbagai referensi terbaru. Padahal, ketersediaan sumber belajar merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas proses pembelajaran.

Dalam konteks pendidikan Islam, pemerataan akses terhadap ilmu pengetahuan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam pendidikan. Semangat menuntut ilmu yang diajarkan dalam Islam mengandung pesan bahwa kesempatan belajar seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sumber belajar terbuka (*Open Educational Resources/OER*) menjadi

salah satu strategi yang dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan antarlembaga.

Kolaborasi antarnegara maupun antarlembaga dapat diarahkan pada pembangunan jaringan sumber belajar yang dapat dimanfaatkan secara bersama. Melalui kerja sama tersebut, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi pendidikan dapat saling berbagi buku digital, modul pembelajaran, video pembelajaran, media interaktif, hasil penelitian, perangkat evaluasi, hingga berbagai bahan ajar yang telah dikembangkan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dengan adanya mekanisme berbagi seperti ini, lembaga yang memiliki keterbatasan sumber daya tetap dapat memanfaatkan materi pembelajaran yang berkualitas.

Pengembangan perpustakaan digital bersama juga menjadi langkah yang penting. Perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi buku elektronik, tetapi juga jurnal ilmiah, disertasi, laporan penelitian, serta koleksi literatur Islam klasik (*turats*) yang telah didigitalisasi. Kehadiran koleksi digital tersebut memungkinkan guru, dosen, mahasiswa, santri, dan peneliti mengakses berbagai referensi kapan saja tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Bagi lembaga pendidikan yang berada di daerah dengan keterbatasan akses terhadap perpustakaan fisik, keberadaan perpustakaan digital menjadi solusi yang sangat membantu dalam mendukung kegiatan belajar dan penelitian.

Selain memperluas akses terhadap referensi, sumber belajar terbuka juga mendorong lahirnya budaya kolaborasi di kalangan pendidik. Guru dan dosen tidak lagi bekerja secara terpisah dalam menyusun bahan ajar, tetapi dapat saling berbagi pengalaman, memperbaiki materi yang telah tersedia, serta mengembangkan inovasi pembelajaran secara bersama. Forum berbagi praktik baik (*best practices*), bank soal bersama, modul kolaboratif, hingga komunitas pembelajaran

daring dapat menjadi wadah untuk memperkuat jejaring profesional antarpendidik.

Perkembangan teknologi juga memungkinkan sumber belajar disajikan dalam berbagai bentuk yang lebih interaktif. Selain buku elektronik, materi pembelajaran dapat dikembangkan dalam bentuk video, *podcast*, simulasi digital, infografis, maupun aplikasi pembelajaran yang mudah diakses melalui berbagai perangkat. Keragaman media tersebut membantu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman belajar.

Meskipun demikian, pengembangan sumber belajar terbuka tetap perlu memperhatikan kualitas akademik dan etika penggunaannya. Setiap materi yang dibagikan sebaiknya melalui proses penelaahan agar sesuai dengan standar ilmiah dan nilai-nilai pendidikan Islam. Selain itu, penghormatan terhadap hak cipta, pencantuman sumber referensi, serta penggunaan lisensi yang jelas menjadi bagian penting dalam membangun budaya berbagi pengetahuan yang bertanggung jawab.

Akses terhadap sumber belajar juga perlu didukung oleh peningkatan literasi digital. Guru, dosen, dan peserta didik perlu memiliki kemampuan mencari, memilih, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara kritis. Banyaknya informasi yang tersedia di internet tidak selalu menjamin kualitasnya, sehingga kemampuan melakukan verifikasi (*tabayyun*) terhadap sumber informasi menjadi kompetensi yang semakin penting di era digital.

3. Memperkuat Solidaritas Kemanusiaan melalui Pendidikan

Dalam tradisi Islam, kerja sama tidak hanya didasarkan pada kepentingan institusional, tetapi juga pada nilai persaudaraan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Prinsip *ta'awun* mengajarkan pentingnya saling membantu dalam mewujudkan kemaslahatan bersama, sedangkan semangat

rahmatan lil 'alamin menempatkan pendidikan sebagai sarana menghadirkan manfaat bagi seluruh umat manusia.

Atas dasar tersebut, kolaborasi internasional dalam pendidikan Islam seharusnya dipahami sebagai bagian dari upaya membangun solidaritas global. Lembaga yang memiliki pengalaman, sumber daya, dan kapasitas lebih baik dapat berperan dalam mendampingi lembaga yang masih menghadapi berbagai keterbatasan melalui program peningkatan kapasitas, pendampingan kelembagaan, bantuan pengembangan kurikulum, maupun penguatan kompetensi pendidik.

Pendekatan semacam ini akan menciptakan hubungan yang lebih setara karena setiap lembaga diposisikan sebagai mitra yang saling belajar, bukan sebagai pihak yang mendominasi atau bergantung sepenuhnya kepada pihak lain. Dengan cara demikian, kolaborasi menjadi sarana untuk memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mempererat hubungan kemanusiaan lintas bangsa dan budaya.

Pada akhirnya, pemerataan pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya investasi infrastruktur atau kemajuan teknologi, tetapi juga pada kemauan berbagai pihak untuk membangun kepercayaan, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama dalam jangka panjang. Ketika kolaborasi tumbuh sebagai budaya bersama, pendidikan Islam memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara merata di berbagai wilayah. Peserta didik, baik yang belajar di kota besar maupun di daerah terpencil, memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas, mengembangkan potensinya, dan mengambil bagian dalam membangun peradaban yang lebih adil dan berkeadaban.

C. Etika dan Tanggung Jawab Sosial Inovasi Pendidikan

Perkembangan teknologi telah menghadirkan banyak peluang bagi dunia pendidikan. Kecerdasan buatan, analisis data, platform pembelajaran digital, dan berbagai inovasi

lainnya memungkinkan proses belajar berlangsung lebih efektif, fleksibel, dan menjangkau lebih banyak peserta didik. Namun, setiap inovasi selalu membawa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan secara matang. Di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat persoalan mengenai privasi data, keadilan akses, transparansi pengambilan keputusan, hingga kemungkinan berkurangnya dimensi kemanusiaan dalam proses pendidikan. Karena itu, inovasi tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan etis.

Dalam perspektif pendidikan Islam, kemajuan teknologi bukanlah sesuatu yang perlu ditolak, tetapi harus diarahkan agar tetap sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Inovasi tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat teknologi diadopsi atau seberapa besar efisiensi yang dihasilkan, melainkan dari manfaat yang diberikan bagi perkembangan manusia secara utuh. Pendidikan Islam sejak awal bertujuan membentuk pribadi yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap perubahan yang dilakukan harus tetap menjaga martabat manusia, memperkuat nilai keadilan, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Berangkat dari pemahaman tersebut, etika dan tanggung jawab sosial perlu menjadi landasan dalam setiap proses inovasi pendidikan. Teknologi harus diposisikan sebagai sarana yang membantu manusia, bukan menggantikan peran kemanusiaan itu sendiri. Dalam praktiknya, terdapat tiga aspek yang perlu memperoleh perhatian.

1. Menjaga Martabat Manusia dalam Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), *learning analytics*, dan berbagai teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dibantu oleh sistem digital, mulai dari penyusunan materi pembelajaran, pemberian umpan balik, analisis hasil belajar, hingga penyusunan rekomendasi

pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Pemanfaatan teknologi tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses evaluasi, dan menghadirkan layanan pembelajaran yang lebih personal.

Meskipun demikian, kemajuan teknologi tidak boleh mengubah hakikat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Pendidikan pada dasarnya merupakan hubungan antara pendidik dan peserta didik yang dibangun melalui interaksi, keteladanan, dialog, serta pembinaan karakter. Unsur-unsur tersebut tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem otomatis, seberapa canggih pun teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus diposisikan sebagai alat bantu yang mendukung proses pendidikan, bukan sebagai pengganti peran guru dalam membimbing, mendampingi, dan membentuk kepribadian peserta didik.

Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah kemungkinan munculnya bias dalam penggunaan sistem berbasis kecerdasan buatan. Algoritma bekerja berdasarkan data yang digunakan untuk melatih sistem tersebut. Apabila data yang digunakan tidak lengkap, tidak mewakili keragaman peserta didik, atau mengandung kecenderungan tertentu, hasil analisis yang dihasilkan juga dapat bersifat bias. Akibatnya, rekomendasi yang diberikan sistem belum tentu menggambarkan kemampuan dan potensi peserta didik secara utuh.

Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai sekumpulan angka atau data statistik. Setiap individu memiliki latar belakang keluarga, pengalaman belajar, kondisi sosial, karakter, minat, serta cara belajar yang berbeda. Faktor-faktor tersebut sering kali tidak dapat sepenuhnya dibaca oleh sistem digital. Oleh karena itu, hasil analisis teknologi seharusnya diperlakukan sebagai informasi pendukung yang membantu

guru memahami kondisi peserta didik, bukan sebagai dasar tunggal dalam mengambil keputusan pendidikan.

Dalam praktiknya, guru tetap memiliki tanggung jawab profesional untuk menafsirkan informasi yang dihasilkan teknologi secara bijaksana. Misalnya, ketika sistem menunjukkan adanya penurunan hasil belajar seorang peserta didik, guru perlu melihat kondisi yang melatarbelakanginya melalui komunikasi, observasi, maupun dialog dengan peserta didik dan orang tua. Dengan cara demikian, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan data, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang menjadi inti dari proses pendidikan.

Perspektif Islam memberikan landasan yang kuat dalam menjaga martabat manusia di tengah perkembangan teknologi. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia dimuliakan oleh Allah Swt. (*karāmah al-insān*), sehingga setiap proses pendidikan harus menghormati harkat, kebebasan, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Prinsip ini menegaskan bahwa teknologi tidak boleh digunakan untuk memberikan label yang merugikan, membatasi kesempatan belajar, atau memperlakukan peserta didik secara tidak adil berdasarkan hasil analisis algoritma semata.

Penggunaan teknologi juga harus memperhatikan hak peserta didik atas privasi dan perlindungan data pribadi. Informasi mengenai identitas, perkembangan akademik, kondisi psikologis, maupun aktivitas digital peserta didik merupakan data yang harus dijaga kerahasiaannya. Lembaga pendidikan perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan perlindungan data agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan peserta didik.

Selain itu, pemanfaatan teknologi hendaknya tetap memberikan ruang bagi kreativitas, dialog, dan kebebasan berpikir. Pembelajaran yang terlalu bergantung pada sistem

otomatis berisiko mengurangi kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapat, berdiskusi, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Padahal, salah satu tujuan utama pendidikan adalah membentuk individu yang mampu berpikir mandiri, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, dan menyelesaikan berbagai persoalan melalui proses refleksi yang matang.

Karena itu, pendidikan Islam perlu mengembangkan pendekatan yang menempatkan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam posisi yang saling melengkapi. Kecerdasan buatan dapat membantu mempercepat proses administrasi, menyediakan sumber belajar yang lebih beragam, dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Namun, pembentukan akhlak, penanaman nilai, pembinaan karakter, serta hubungan emosional antara guru dan peserta didik tetap menjadi tugas yang hanya dapat dijalankan melalui interaksi manusia.

2. Mewujudkan Keadilan dalam Penyebaran Inovasi

Kemajuan pendidikan tidak akan memberikan dampak yang berarti apabila hanya dinikmati oleh sebagian kecil lembaga yang memiliki sumber daya lebih baik. Inovasi yang berkembang tanpa memperhatikan pemerataan justru berpotensi memperlebar kesenjangan antara lembaga pendidikan yang maju dan lembaga yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Karena itu, setiap inovasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek keadilan. Pengembangan platform pembelajaran, media digital, hasil penelitian, maupun model pembelajaran baru sebaiknya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh lebih banyak lembaga pendidikan. Semangat berbagi pengalaman, pendampingan, dan kolaborasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mempercepat pemerataan mutu pendidikan Islam.

Lembaga pendidikan yang telah memiliki kapasitas lebih baik juga memiliki tanggung jawab moral untuk berbagi praktik baik, mendampingi proses pengembangan lembaga lain, serta membuka ruang kerja sama yang saling menguatkan. Dengan cara tersebut, inovasi tidak menjadi simbol keunggulan sebagian pihak, tetapi berkembang menjadi kekuatan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas.

3. Mengarahkan Riset untuk Kepentingan Masyarakat

Riset merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan pendidikan Islam. Melalui penelitian, lembaga pendidikan tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga menemukan berbagai solusi yang dapat menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Karena itu, pengembangan riset tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan target publikasi atau peningkatan peringkat akademik. Penelitian perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, lembaga pendidikan, maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa tradisi penelitian selalu tumbuh berdampingan dengan kebutuhan sosial. Para ulama dan ilmuwan Muslim pada masa lalu mengembangkan berbagai disiplin ilmu sebagai respons terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat pada zamannya. Ilmu fikih berkembang untuk menjawab persoalan hukum, ilmu kedokteran untuk meningkatkan kualitas kesehatan, ilmu falak untuk mendukung pelaksanaan ibadah, sedangkan ilmu ekonomi dikembangkan guna menciptakan sistem perdagangan yang adil. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam selalu memiliki orientasi pada kemaslahatan.

Prinsip tersebut tetap relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan pada era digital. Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat menghadirkan berbagai persoalan

baru, seperti kesenjangan akses pendidikan, rendahnya literasi digital, penyebaran informasi yang tidak akurat, perubahan karakter peserta didik akibat penggunaan teknologi, hingga meningkatnya kebutuhan terhadap model pembelajaran yang lebih adaptif. Semua persoalan tersebut memerlukan dukungan penelitian yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan maupun inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan secara nyata.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu mendorong berkembangnya penelitian yang berorientasi pada penyelesaian masalah (*problem-based research*). Topik penelitian tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teori, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, sekolah, madrasah, pesantren, pemerintah daerah, maupun dunia kerja. Pendekatan seperti ini membuat hasil penelitian lebih mudah diimplementasikan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Beberapa bidang penelitian yang perlu terus dikembangkan antara lain peningkatan mutu pembelajaran, penguatan literasi digital, pengembangan pendidikan karakter, pengelolaan pesantren berbasis teknologi, inovasi kurikulum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan inklusif, penguatan moderasi beragama, hingga pendidikan lingkungan hidup. Berbagai tema tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan Islam pada masa depan.

Agar hasil penelitian benar-benar memberikan dampak, proses pelaksanaannya perlu melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan kolaboratif. Guru, dosen, peneliti, pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal dapat bekerja sama sejak tahap perencanaan hingga implementasi hasil penelitian. Kolaborasi semacam ini memungkinkan penelitian menghasilkan solusi yang lebih

sesuai dengan kondisi lapangan sekaligus mempercepat penerapan hasil riset dalam praktik pendidikan.

Selain itu, hasil penelitian perlu disebarluaskan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat. Publikasi ilmiah tetap penting sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi temuan penelitian juga perlu diterjemahkan menjadi panduan praktis, modul pembelajaran, rekomendasi kebijakan, bahan pelatihan, atau program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, manfaat penelitian tidak hanya dirasakan oleh kalangan akademisi, tetapi juga dapat digunakan secara langsung oleh para pendidik, pengelola lembaga pendidikan, dan masyarakat luas.

Dalam perspektif Islam, seluruh aktivitas penelitian harus berpijak pada nilai-nilai etika. Proses pengumpulan data perlu menghormati hak responden, menjaga kerahasiaan informasi, menghindari manipulasi hasil penelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran ilmiah. Nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan objektivitas menjadi landasan penting agar penelitian benar-benar menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya dan membawa manfaat bagi banyak pihak.

Kerangka *maqashid syariah* juga memberikan arah yang jelas bagi pengembangan riset pendidikan. Penelitian seharusnya memberikan kontribusi terhadap perlindungan agama (*hifz al-din*), pengembangan ilmu pengetahuan (*hifz al-'aql*), peningkatan kualitas kehidupan (*hifz al-nafs*), penguatan kesejahteraan ekonomi (*hifz al-mal*), serta keberlangsungan generasi yang akan datang (*hifz al-nasl*). Dengan orientasi tersebut, keberhasilan penelitian tidak hanya diukur dari banyaknya publikasi, sitasi, atau penghargaan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana hasil penelitian mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

D. Roadmap Implementasi bagi Pemangku Kepentingan

Berbagai gagasan mengenai transformasi pendidikan Islam hanya akan menjadi wacana apabila tidak diterjemahkan

ke dalam langkah-langkah yang dapat dilaksanakan. Pengembangan kurikulum, pemanfaatan teknologi digital, penguatan kompetensi pendidik, maupun pembentukan budaya inovasi membutuhkan perencanaan yang jelas, pembagian peran yang tegas, serta komitmen yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Karena itu, implementasi menjadi tahapan yang sama pentingnya dengan perumusan konsep.

Karakter pendidikan Islam yang sangat beragam juga menuntut pendekatan implementasi yang tidak bersifat seragam. Madrasah negeri, pesantren salaf, pesantren modern, sekolah Islam terpadu, maupun perguruan tinggi Islam memiliki karakteristik, kebutuhan, dan kapasitas yang berbeda. Roadmap implementasi harus memberikan ruang bagi setiap lembaga untuk berkembang sesuai konteksnya tanpa kehilangan arah bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada sinergi antarpemangku kepentingan. Pemerintah berperan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung, pimpinan lembaga menjadi penggerak perubahan di tingkat institusi, sedangkan guru dan tenaga kependidikan menjadi pelaksana utama yang berhadapan langsung dengan peserta didik setiap hari. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

1. Peran Pemerintah dan Regulator

Keberhasilan inovasi pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh kesiapan lembaga pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang disusun pemerintah sebagai regulator. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya berbagai inovasi sekaligus memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan memperoleh kesempatan yang setara dalam meningkatkan mutu layanan. Oleh karena itu, kebijakan

pendidikan perlu dirancang secara adaptif, inklusif, dan mampu menjawab dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

Peran pemerintah tidak berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi juga mencakup fungsi sebagai fasilitator, pembina, dan pengawas. Regulasi yang baik seharusnya memberikan arah yang jelas tanpa membatasi kreativitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan perlu mampu mengakomodasi keragaman bentuk penyelenggaraan pendidikan, mulai dari madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu, hingga perguruan tinggi keagamaan Islam. Setiap lembaga memiliki sejarah, budaya, dan pendekatan pembelajaran yang berbeda sehingga memerlukan ruang untuk berinovasi tanpa kehilangan identitasnya.

Salah satu kebijakan yang perlu terus diperkuat adalah pengakuan terhadap berbagai bentuk capaian pembelajaran. Selama ini, banyak kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan nonformal maupun pendidikan kepesantrenan belum sepenuhnya memperoleh pengakuan dalam sistem pendidikan nasional. Padahal, kemampuan membaca dan memahami kitab *turats*, hafalan Al-Qur'an, pengalaman berdakwah, kepemimpinan organisasi santri, maupun keterampilan kewirausahaan yang berkembang di lingkungan pesantren merupakan bagian penting dari proses pembentukan kompetensi peserta didik. Melalui kebijakan yang mendukung rekognisi pembelajaran lampau dan sistem sertifikasi yang lebih fleksibel, pemerintah dapat memperluas kesempatan lulusan pendidikan Islam untuk melanjutkan studi maupun memasuki dunia kerja tanpa menghilangkan kekhasan tradisi keilmuan yang dimiliki.

Di samping itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital sebagai

fondasi transformasi pendidikan. Masih terdapat banyak madrasah dan pesantren, terutama di wilayah terpencil dan daerah terdepan, terluar, serta tertinggal (3T), yang menghadapi keterbatasan akses internet, perangkat pembelajaran, maupun sarana pendukung lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat digital, pengembangan pusat sumber belajar, serta peningkatan kapasitas teknologi informasi harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan pendidikan nasional.

Penguatan sumber daya manusia juga perlu menjadi prioritas. Transformasi digital tidak akan memberikan dampak yang optimal apabila guru, kepala madrasah, maupun tenaga kependidikan belum memiliki kompetensi yang memadai dalam memanfaatkan teknologi. Pemerintah perlu memperluas program pelatihan, pendampingan, dan pengembangan profesional berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Program tersebut tidak hanya berfokus pada penguasaan perangkat digital, tetapi juga mencakup penguatan kompetensi pedagogik, literasi digital, etika pemanfaatan teknologi, serta kemampuan mengembangkan pembelajaran yang inovatif.

Dalam bidang kurikulum, pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kekhasan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Standar nasional tetap diperlukan sebagai acuan mutu, namun implementasinya perlu bersifat fleksibel sehingga madrasah dan pesantren dapat mengintegrasikan tradisi keilmuan Islam, potensi daerah, budaya lokal, serta perkembangan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Kebijakan semacam ini memungkinkan lahirnya inovasi yang beragam tanpa mengurangi kualitas pendidikan secara nasional.

Selain menyusun regulasi dan menyediakan fasilitas, pemerintah juga memiliki peran penting dalam membangun ekosistem kolaborasi. Kemitraan antara lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal perlu terus didorong melalui berbagai program bersama. Dukungan terhadap penelitian, pengembangan inovasi pembelajaran, pertukaran praktik baik, serta penguatan jejaring antarlembaga akan mempercepat penyebaran inovasi yang telah terbukti berhasil diterapkan di berbagai daerah.

2. Peran Pimpinan Lembaga Pendidikan

Keberhasilan inovasi di lingkungan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan. Kepala madrasah, pengasuh pesantren, pimpinan yayasan, maupun rektor perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab mengelola administrasi lembaga, tetapi juga menjadi pengarah perubahan yang menentukan arah pengembangan institusi. Kepemimpinan yang visioner akan mampu menciptakan lingkungan yang mendorong pembelajaran, kolaborasi, dan inovasi, tanpa mengabaikan nilai-nilai yang menjadi identitas lembaga.

Dalam proses transformasi, pemimpin berperan membangun visi bersama yang dapat dipahami oleh seluruh warga lembaga. Perubahan tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya dipahami oleh pimpinan, sementara guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak lainnya belum memahami tujuan serta manfaatnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan perlu dikomunikasikan secara terbuka melalui dialog, musyawarah, dan pelibatan berbagai unsur lembaga sejak tahap perencanaan. Pendekatan partisipatif seperti ini akan menumbuhkan rasa memiliki sehingga inovasi dipandang sebagai kebutuhan bersama, bukan sekadar program yang harus dilaksanakan.

Kepemimpinan juga ditunjukkan melalui kemampuan membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap pembelajaran. Pimpinan perlu memberikan ruang bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mencoba pendekatan baru, berbagi pengalaman, serta melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan. Lingkungan yang menghargai proses belajar akan mendorong lahirnya kreativitas dan mengurangi kekhawatiran terhadap kegagalan ketika mengembangkan inovasi. Dengan demikian, perubahan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari, bukan kegiatan yang hanya dilakukan ketika ada program atau proyek tertentu.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi yang tidak kalah penting dibandingkan penyediaan sarana dan prasarana. Pimpinan lembaga perlu memberikan perhatian terhadap peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, *workshop*, pendampingan, komunitas belajar, maupun program pengembangan profesional berkelanjutan. Selain meningkatkan kemampuan pedagogik dan literasi digital, program tersebut juga perlu memperkuat kepemimpinan, kemampuan berkolaborasi, serta budaya penelitian di kalangan pendidik. Ketika kualitas sumber daya manusia meningkat, kemampuan lembaga untuk beradaptasi terhadap perubahan juga akan semakin kuat.

Di sisi lain, tata kelola lembaga perlu dibangun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Informasi mengenai perkembangan peserta didik, kinerja pembelajaran, penggunaan sumber daya, serta capaian program perlu dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan. Pendekatan ini membantu pimpinan menentukan prioritas pengembangan secara lebih objektif sekaligus memastikan bahwa setiap program benar-benar menjawab kebutuhan lembaga.

Pimpinan juga memiliki peran penting dalam membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak. Kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, alumni, maupun lembaga internasional dapat membuka akses terhadap sumber daya, pelatihan, penelitian, dan berbagai inovasi yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kemitraan yang dikelola secara berkelanjutan akan memperluas kesempatan lembaga untuk berkembang tanpa harus bergantung pada sumber daya internal semata.

Dalam konteks pendidikan Islam, kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan mengelola organisasi, tetapi juga dari keteladanan dalam menjaga nilai-nilai keislaman. Pimpinan diharapkan mampu menjadi contoh dalam membangun integritas, kejujuran, tanggung jawab, semangat melayani, serta komitmen terhadap peningkatan mutu. Keteladanan tersebut akan membentuk budaya organisasi yang sehat dan memperkuat kepercayaan seluruh warga lembaga terhadap arah perubahan yang sedang dijalankan.

Peran pimpinan lembaga pendidikan adalah menciptakan ekosistem yang memungkinkan inovasi berkembang secara berkelanjutan. Melalui visi yang jelas, komunikasi yang terbuka, pengembangan sumber daya manusia, tata kelola yang baik, serta kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, lembaga pendidikan akan lebih siap menghadapi berbagai perubahan sekaligus tetap mempertahankan jati diri dan kualitas pendidikan yang menjadi harapan masyarakat.

3. Peran Guru dan Tenaga Pendidik

Guru dan tenaga pendidik merupakan unsur yang paling menentukan dalam keberhasilan transformasi pendidikan Islam. Berbagai kebijakan, kurikulum, maupun teknologi yang dikembangkan hanya akan memberikan dampak apabila mampu diterjemahkan menjadi pengalaman belajar yang

bermakna di dalam kelas. Oleh karena itu, guru tidak sekadar menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi penggerak utama yang menghubungkan berbagai inovasi dengan kebutuhan nyata peserta didik.

Peran guru pada era digital mengalami perubahan yang cukup mendasar. Jika sebelumnya guru lebih banyak berfungsi sebagai sumber utama informasi, kini perannya berkembang menjadi fasilitator, pembimbing, dan pendamping belajar. Peserta didik dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, tetapi mereka tetap memerlukan guru untuk membantu memahami informasi tersebut, menghubungkannya dengan konteks kehidupan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Dalam pendidikan Islam, perubahan peran ini tetap berlandaskan fungsi guru sebagai pendidik yang membimbing perkembangan ilmu, akhlak, dan kepribadian peserta didik secara seimbang.

Perubahan tersebut menuntut guru untuk terus mengembangkan kompetensinya. Penguasaan materi pelajaran perlu diimbangi dengan kemampuan memilih strategi pembelajaran yang sesuai, memanfaatkan teknologi digital secara efektif, menyusun penilaian autentik, serta menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kolaboratif. Pengembangan profesional tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang dilakukan sesekali melalui pelatihan, tetapi menjadi proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang karier seorang pendidik. Melalui komunitas belajar, pelatihan berkelanjutan, penelitian tindakan kelas, maupun kolaborasi antarguru, kompetensi pendidik dapat terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan pendidikan.

Selain meningkatkan kompetensi akademik dan pedagogik, guru juga memiliki tanggung jawab membangun budaya digital yang sehat di lingkungan pendidikan. Peserta didik perlu dibimbing agar mampu memanfaatkan teknologi

secara bijaksana, menghormati etika dalam berkomunikasi di ruang digital, menjaga keamanan data pribadi, serta memiliki kemampuan melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Literasi digital menjadi bagian penting dari pendidikan karakter karena kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab merupakan salah satu kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern.

Keteladanan guru memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses tersebut. Cara guru memanfaatkan teknologi, berkomunikasi di media digital, menghargai hak cipta, menggunakan kecerdasan buatan secara etis, maupun menyikapi perbedaan pendapat akan menjadi contoh yang diamati oleh peserta didik. Oleh karena itu, pembentukan budaya digital yang sehat tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi perlu diwujudkan melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, madrasah, maupun pesantren.

Guru juga perlu mengembangkan budaya refleksi dan evaluasi terhadap praktik pembelajaran yang dilaksanakannya. Setiap pengalaman mengajar dapat menjadi sumber pembelajaran untuk memperbaiki metode, media, maupun strategi yang digunakan. Sikap terbuka terhadap masukan dari peserta didik, rekan sejawat, dan pimpinan lembaga akan membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Dengan demikian, inovasi tidak dipahami sebagai perubahan yang bersifat sesaat, tetapi sebagai proses penyempurnaan yang terus berlangsung.

Keberhasilan transformasi pendidikan Islam sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, kepemimpinan lembaga, serta profesionalisme guru dan tenaga pendidik. Ketika ketiga unsur tersebut berjalan secara selaras, inovasi pendidikan tidak berhenti sebagai wacana atau dokumen perencanaan, tetapi berkembang menjadi praktik

pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat karakter peserta didik, serta mempersiapkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan masa depan tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasinya.

E. Simpulan

Bab ini merumuskan visi masa depan inovasi pendidikan Islam pasca-pandemi, mencakup pendidikan berkelanjutan, kolaborasi global, etika dan tanggung jawab sosial, serta roadmap implementasi bagi pemangku kepentingan.

Visi pendidikan berkelanjutan pasca-pandemi dibangun melalui tiga pilar: (1) integrasi kesadaran ekologis dan Maqashid Syariah melalui konsep khalifah fil ard, Eco-Pesantren, dan Green School yang menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah; (2) ketahanan institusional dan adaptabilitas digital yang berkeadilan melalui institutional agility dan hybrid learning yang inklusif; dan (3) penguatan modal sosial dan ketahanan komunitas melalui revitalisasi ukhuwah, ta'awun, dan peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

Kolaborasi global untuk pendidikan merata dilakukan melalui: (1) kemitraan akademik lintas negara yang setara dan saling belajar; (2) pengembangan sumber belajar terbuka (OER) dan perpustakaan digital bersama; dan (3) penguatan solidaritas kemanusiaan melalui pendidikan sebagai sarana rahmatan lil 'alamin.

Etika dan tanggung jawab sosial inovasi pendidikan menuntut: (1) menjaga martabat manusia dalam pemanfaatan teknologi (karāmah al-insān) dengan menempatkan teknologi sebagai alat bantu, bukan pengganti; (2) mewujudkan keadilan dalam penyebaran inovasi agar tidak memperlebar kesenjangan; dan (3) mengarahkan riset untuk kepentingan masyarakat (problem-based research) yang berorientasi pada kemaslahatan.

Roadmap implementasi melibatkan: (1) peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas yang menciptakan kebijakan adaptif dan inklusif; (2) peran pimpinan lembaga sebagai visioner, pembangun budaya inovasi, dan penggerak kolaborasi; dan (3) peran guru sebagai pelaksana utama, fasilitator, pembimbing, dan penggerak perubahan yang terus mengembangkan kompetensi profesional dan spiritual.

F. Soal Latihan

1. Visi Pendidikan Berkelanjutan

Rumuskan visi pendidikan berkelanjutan untuk sebuah lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah, atau PTKI) pasca-pandemi! Sertakan: (a) integrasi kesadaran ekologis dan Maqashid Syariah (Eco-Pesantren/Green School), (b) strategi ketahanan institusional dan adaptabilitas digital yang berkeadilan, (c) program penguatan modal sosial dan ketahanan komunitas, dan (d) indikator keberhasilan. (CPMK2, CPMK4)

2. Proyek Kolaborasi Global

Rancanglah program kolaborasi global untuk pemerataan pendidikan Islam (misalnya: kemitraan dengan universitas luar negeri, pengembangan OER, atau program pertukaran)! Sertakan: (a) bentuk kemitraan, (b) manfaat bagi kedua belah pihak, (c) strategi menjaga identitas keislaman, (d) mekanisme berbagi sumber belajar, dan (e) rencana keberlanjutan. (CPMK2, CPMK4)

3. Analisis Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Pilihlah satu inovasi teknologi dalam pendidikan (misalnya: AI generatif, VR, atau learning analytics)! Analisis dari perspektif: (a) potensi

pelanggaran martabat manusia (karāmah al-insān), (b) risiko ketidakadilan akses, (c) orientasi riset untuk kemaslahatan umum, dan (d) rekomendasi kerangka etis untuk pemanfaatannya dalam pendidikan Islam. (CPMK1, CPMK3)

4. Roadmap Implementasi Pemangku Kepentingan

Susunlah roadmap implementasi inovasi pendidikan Islam untuk 5 tahun ke depan dengan melibatkan tiga pemangku kepentingan: pemerintah, pimpinan lembaga, dan guru! Sertakan untuk setiap pemangku kepentingan: (a) peran dan tanggung jawab, (b) target tahunan (Year 1-5), (c) indikator keberhasilan, dan (d) mekanisme koordinasi dan evaluasi. (CPMK2, CPMK4)

5. Esai Visi Masa Depan

Tulislah esai visioner tentang "Pendidikan Islam di Tahun 2040: Tantangan dan Peluang"! Esai harus mencakup: (a) prediksi perkembangan teknologi dan sosial, (b) transformasi yang diperlukan dalam pendidikan Islam, (c) peran guru dan kurikulum di masa depan, (d) kontribusi pendidikan Islam bagi peradaban global, dan (e) rekomendasi strategis untuk mewujudkan visi tersebut. (CPMK1, CPMK3, CPMK4)

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: Definition, rationale, and a call for research. *Higher Education Research & Development*, 34(1), 1–14.
- Al-Attas, S. M. N. (1979). *Aims and objectives of Islamic education*. Jeddah: King Abdulaziz University.
- Al-Attas, S. M. N. (1980). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM).
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of knowledge: General principles and work plan*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Al-Khaṣā'is al-'Āmmah li al-Islām*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-'Ibādah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Alqahtani, A. S., et al. (2017). Kajian mengenai penggunaan *virtual reality* dalam pendidikan.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kencana.
- Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(4), 355–385.
- Bates, T. (2015). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. Vancouver: Tony Bates Associates.
- Bawden, D. (2008). Origins and concepts of digital literacy. In C. Lankshear & M. Knobel (Eds.), *Digital literacies*:

- Concepts, policies and practices* (pp. 17–32). New York: Peter Lang.
- Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. *The Clearing House*, 83(2), 39–43.
- Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip your classroom: Reach every student in every class every day*. Washington, DC: International Society for Technology in Education.
- Bower, M., et al. (2014). Augmented reality in education – cases, places and potentials. *Educational Media International*, 51(1), 1–15.
- Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are transforming religious authority*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Chou, Y. (2015). *Actionable gamification: Beyond points, badges, and leaderboards*. Fremont, CA: Octalysis Media.
- Christensen, C. M., Horn, M. B., & Johnson, C. W. (2008). *Disrupting class: How disruptive innovation will change the way the world learns*. New York: McGraw-Hill.
- Darling-Hammond, L. (2010). *The flat world and education: How America's commitment to equity will determine our future*. New York: Teachers College Press.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
- Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. *Psychological Bulletin*, 125(6), 627–668.
- Dede, C. (2009). Immersive interfaces for engagement and learning. *Science*, 323(5910), 66–69.

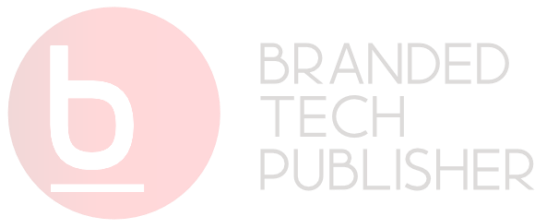
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 9–15.
- Epstein, J. L. (2011). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools* (2nd ed.). Boulder, CO: Westview Press.
- Fink, L. D. (2013). *Creating significant learning experiences: An integrated approach to designing college courses* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Fisk, P. (2017). *Education 4.0: The future of learning will be dramatically different, in school and throughout life*.
- Foucault, M. (1975). *Discipline and punish: The birth of the prison*. New York: Vintage Books.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.
- Fullan, M. (2001). *The new meaning of educational change* (3rd ed.). New York: Teachers College Press.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). New York: Teachers College Press.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method* (2nd rev. ed.). New York: Continuum.
- Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. *The Internet and Higher Education*, 7(2), 95–105.
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. New York: Wiley.
- Hargreaves, A. (2003). *Teaching in the knowledge society: Education in the age of insecurity*. New York: Teachers College Press.
- Hasan, N. (2011). Pendidikan Islam di Asia Tenggara: Tantangan dan adaptasi. (Publikasi mengenai pendidikan Islam kontemporer).

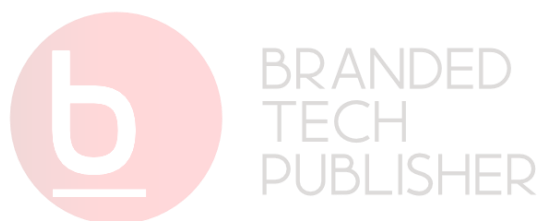
- Hasselbring, T. S., & Glaser, C. H. K. (2000). Use of computer technology to help students with special needs. *The Future of Children*, 10(2), 102–122.
- Hefner, R. W. (2016). Pendidikan Islam dan transformasi sosial di era digital. (Publikasi mengenai pendidikan Islam dan transformasi sosial).
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign.
- Ibnu Khaldun. (2001). *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education*. San Francisco: Pfeiffer.
- King, A. (1993). From sage on the stage to guide on the side. *College Teaching*, 41(1), 30–35.
- Madjid, N. (1992). Pembaruan pemikiran Islam dan relevansinya dengan pendidikan. (Publikasi mengenai pembaruan pemikiran Islam).
- Makdisi, G. (1981). *The rise of colleges: Institutions of learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Maksum. (1999). Sejarah pendidikan Islam di Indonesia. (Publikasi mengenai sejarah pendidikan Islam).
- Markham, T. (2011). Project based learning. In M. Orey (Ed.), *Emerging perspectives on learning, teaching, and technology*.
- Miles, S., & Singal, N. (2010). The Education for All and inclusive education debate: Conflict, contradiction or opportunity? *International Journal of Inclusive Education*, 14(1), 1–15.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for

- teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
- Mutahhari, M. (1985). *Tafsir al-Mizan* (Vol. 20). Beirut: Mu'assasah al-A'lami.
- Mutalib, H. (2012). Pendidikan Islam di Singapura dan Malaysia: Tantangan dan inovasi. (Publikasi mengenai pendidikan Islam di Asia Tenggara).
- Nizar, S. (2013). Transformasi pendidikan Islam di Indonesia: Dari IAIN ke UIN. (Publikasi mengenai transformasi pendidikan Islam).
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. New York: Crown.
- OECD. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. Paris: OECD Publishing.
- Pane, J. F., et al. (2015). Personalized learning: What it really is and why it matters. (Publikasi mengenai *personalized learning*).
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Regan, P. M., & Jesse, J. (2019). Ethical challenges of edtech, big data, and personalized learning. *Science and Engineering Ethics*, 25, 669–684.
- Reigeluth, C. M. (2014). *Instructional-design theories and models* (Vol. 4). New York: Routledge.
- Rissanen, I. (2014). Teaching Islamic education in Finnish schools. (Publikasi mengenai pendidikan Islam di Finlandia).
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social theory and global culture*. London: Sage.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.
- Sardar, Z. (1988). *The future of Muslim civilization*. London: Mansell Publishing.
- Sardar, Z. (2011). *Reading the Qur'an: The contemporary relevance of the sacred text of Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Standen, P. J., & Brown, D. J. (2005). Virtual reality in the rehabilitation of people with intellectual disabilities: Review. *CyberPsychology & Behavior*, 8(3), 272–282.
- Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern*. Jakarta: LP3ES.
- Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321–326.
- Thomas, J. W. (2000). *A review of research on project-based learning*. San Rafael, CA: Autodesk Foundation.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st century skills: Learning for life in our times*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Tsuneyoshi, R. (2013). *Tokkatsu* and character education in Japan. (Publikasi mengenai pendidikan Jepang dan Tokkatsu).
- Ulwan, A. N. (1992). *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam* (Pendidikan anak dalam Islam). Beirut: Dar al-Salam.
- Wan Daud, W. M. N. (1998). *The educational philosophy and practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas: An exposition of the original concept of Islamization*. Kuala Lumpur: ISTAC.

- Webster-Wright, A. (2009). Reframing professional development through understanding authentic professional learning. *Review of Educational Research*, 79(2), 702–739.
- Yuan, L., & Powell, S. (2013). *MOOCs and open education: Implications for higher education*. Bolton: JISC CETIS.
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(39).
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. New York: PublicAffairs.





BIOGRAFI PENULIS



Selamat, lahir di Lamongan tanggal 19 September 1985. Anak keenam dari tujuh bersaudara. Dari bapak Nuraji (Alm.) dan ibu Siti Afiyah. Kesibukan sehari-hari menjadi dosen program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Darussalam (UID) Ciamis Jawa Barat.

Menempuh pendidikan formal di:

(1) MI Miftahul Ulum Sukosongo Kembangbahu Lamongan Jawa Timur, lulus tahun 1998; (2) SMP IT Darul Hikmah Pakem Sleman Yogyakarta, lulus tahun 2003; (3) SMA Muhammadiyah Sewon Bantul Yogyakarta, lulus tahun 2006; (4) S1 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat, lulus tahun 2011; (5) S2 Prodi Pendidikan Islam, di Pascasarjana Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat, lulus tahun 2013; (6) S3 Prodi Pendidikan Islam di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2020-2025. Sedangkan pendidikan non formal di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pakem Sleman Yogyakarta, tahun 2000-2003.

Pengalaman pekerjaan sebagai: (1) Guru di MI Darussalam Ciamis, tahun 2010-2013; (2) Dosen Tetap Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UID Ciamis, tahun 2013-sekarang; (3) Sekretaris Prodi PAI S1 Fakultas Tarbiyah UID Ciamis, tahun 2015-2016; (4) Sekretaris Prodi PAI S2 Program Pascasarjana UID Ciamis, tahun 2016-sekarang; (5) Asesor BAN-S/M Provinsi Jawa Barat, tahun 2019-2024; (6) Asesor BAN-PDM Provinsi Jawa Barat, tahun 2024-sekarang; (7) Tutor Matakuliah PAI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka, tahun 2020-sekarang; (8) Fasilitator EDM dan E-RKAM Kementerian Agama RI, tahun 2021; (9) Mentor

Pejuang Muda Kementerian Sosial RI, tahun 2021; (10) Instruktur Visitasi Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) Kementerian Agama RI, tahun 2022 dan 2024; (11) Fasilitator Program Sekolah Penggerak BBGB Jawa Barat Kemendikbudristek RI, tahun 2022-2025; (12) Menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli III-b tahun 2014, Lektor III-c tahun 2017, Lektor III-d tahun 2019, dan Lektor Kepala IV-a tahun 2025.

Semasa menjadi mahasiswa S1-S3 sudah berkecimpung di dunia kerja bidang pendidikan, sehingga *skill* yang mendukung pekerjaan tersebut telah dikuasai secara profesional dan mengantarkan penulis berada di posisi seperti sekarang. Diantara keterampilan atau *skill* tersebut yaitu microsoft word, microsoft excel, microsoft power point dan Auditor Audit Mutu Internal UID Ciamis.

Untuk *menunjang* pengembangan diri di dunia profesional dan akademik penulis juga sering mengikuti pelatihan, seminar ataupun *Short Course*. Diantara pelatihan atau workshop yang pernah diikuti ialah : (1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di Jakarta pada tanggal 3 s.d. 14 November 2015; (2) Peserta Pelatihan Praktik yang Baik dalam Pembelajaran di SD/MI untuk Dosen Pedagogi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, di Bandung pada tanggal 9-11 Februari 2015. (3) Peserta Training Pedagogy Lecturers Teacher Training Curricula and Materials, di Bandung pada tanggal 23-25 April 2015. (4) Short Course Pengabdian kepada Masyarakat metodologi PAR (Participatory Action Research) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada tanggal 7-28 September 2020, (5) Presenter International Conference on Islam in Malay World X (ICON IMAD X), pada tanggal 2-3 Juni 2021 di International Convention Centre, Berakas, Brunei Darussalam, (6) Presenter

In The 1 th Alma Ata International Conference on Education (AAICE) 2023, pada tanggal 16 September 2023, dengan tema: Education For Sustainable Development Awareness Toward Society 5.0.

Pada tahun 2016 Menikah dengan Imas Komalasari, S.Pd.I., dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki yaitu (1) Salma Zakiyyah Khairunnisa, (2) Muhammad Fahri Salim, dan (3) Salman Khoirul Azzam. Kontak dengan penulis di email; selametsm@gmail.com atau selamet@uidc.ac.id.



Muhammad Nurcholis, M.Pd.I. lahir di Lampung pada tanggal 23 Februari 1985. Beliau adalah seorang dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Darussalam (UID) Ciamis, Jawa Barat. Dengan jabatan fungsional Lektor (III-d) dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 2123028502, beliau menetap di Dusun Desa, RT 003 RW 010, Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 46271. Kampus UID Ciamis berlokasi di Jalan Kiai Ahmad Fadlil No 2, PO Box 02, Kode Pos 46271, di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Beliau menikah dengan Tita Yulianti, S.H. dan memiliki dua orang putri, Khayla Afifah Syahirah Putri dan Adila Otca Chandani Kibishi. Aktif berkomunikasi melalui nomor WhatsApp 081323256447, alamat email mn230285@gmail.com, dan akun Facebook mcholis85@yahoo.co.id.

Perjalanan pendidikan Muhammad Nurcholis dimulai dari SD Negeri 2 Sekincau, Lampung Barat, yang diselesaikan pada tahun 2000. Kemudian beliau melanjutkan ke MTs Darussalam Ciamis dan lulus pada tahun 2003, lalu MAK Darussalam Ciamis pada tahun 2006. Pada jenjang sarjana, beliau menempuh studi

di Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis dan meraih gelar S1 pada tahun 2011. Tidak berhenti di situ, beliau menyelesaikan program magister di Pascasarjana IAID Ciamis dan memperoleh gelar M.Pd.I. pada tahun 2015. Seluruh perjalanan akademiknya mengantarkan beliau menjadi tenaga pendidik yang kompeten dan berdedikasi di perguruan tinggi keagamaan Islam.

Sebagai dosen, Muhammad Nurcholis aktif mengampu berbagai mata kuliah, seperti Inovasi Pendidikan Islam, Metodologi Penelitian Pendidikan, Pengembangan Kurikulum PAI, Evaluasi Pembelajaran PAI, Manajemen Pendidikan Islam, dan Filsafat Pendidikan Islam. Beliau juga rajin melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya di bidang inovasi kurikulum, pengembangan modul pembelajaran digital, pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka bagi guru PAI, pelatihan literasi digital guru madrasah, dan penguatan pendidikan karakter berbasis pesantren. Beberapa publikasi ilmiah telah dihasilkan, termasuk buku berjudul "Inovasi Pendidikan Islam: Peta Transformasi, Pedagogi Digital, dan Arah Masa Depan" yang ditulis bersama Dr. Selamat, M.Pd.I. dan diterbitkan pada tahun 2026. Semangat belajar sepanjang hayat dan berbagi ilmu menjadi prinsip hidup yang selalu dipegang, dengan harapan dapat terus mengabdikan diri bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia.



INOVASI PENDIDIKAN ISLAM

Peta Transformasi, Pedagogi Digital, dan Arah Masa Depan

Buku "Inovasi Pendidikan Islam: Peta Transformasi, Pedagogi Digital, dan Arah Masa Depan" hadir sebagai respons terhadap tantangan disrupsi digital dan Revolusi Industri 4.0 yang menuntut lembaga pendidikan Islam untuk bertransformasi tanpa kehilangan identitas keislamannya. Buku ini mengupas secara komprehensif fondasi inovasi pendidikan Islam, mulai dari pengertian dan sejarah, prinsip dasar, peran guru sebagai agen perubahan, hingga indikator keberhasilan inovasi. Pembahasan diperluas dengan analisis tren global, dampak teknologi (AI, VR/AR, LMS, MOOCs), model pembelajaran inovatif (PjBL, Flipped Classroom, gamifikasi, personalized learning), serta kurikulum adaptif dan inklusif berbasis kompetensi abad 21. Buku ini juga menyoroti peran strategis guru, infrastruktur pendukung, tantangan implementasi, dan masa depan pendidikan Islam yang berkelanjutan. Ditulis dengan pendekatan multidisipliner yang memadukan wawasan keislaman, teori pendidikan, dan teknologi mutakhir, buku ini menjadi panduan esensial bagi mahasiswa, calon guru, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam merancang inovasi pendidikan Islam yang adaptif, inklusif, dan berkeadaban.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Dusun Krajan RT 02 RW 01 Tempuran Bantaran
Probolinggo Jawa Timur 67261 | Hp : 0811101665
Website: www.brandedtechpublisher.biz.id
E-mail: brandedtechIndonesia@gmail.com

IKAPI No. : 458/JTI/2025

Harga P. Jawa Rp. 95.000,-